

## Laporan Pemeringkatan Bank 2024

# Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan



**Laporan Pemeringkatan Bank 2024**  
**Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan**

**Penulis:**

Dwi Rahayu Ningrum  
Eka Afrina Djamhari  
Ricko Nurmansyah  
Herni Ramdlaningrum  
Victoria Fanggidae



**P R A K A R S A**  
Welfare Initiative for Better Societies

**2024**

## **Laporan Pemeringkatan Bank 2024: Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan**

Perkumpulan PRAKARSA. (2024). Laporan Pemeringkatan Bank 2024: Analisis Kemajuan Kebijakan Bank dalam Pembiayaan Berkelanjutan. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

### **Penulis:**

Dwi Rahayu Ningrum, Eka Afrina Djahhari, Ricko Nurmansyah, Herni Ramdlaningrum, Victoria Fanggidae

### **Peneliti:**

Fiona Armintasari, Adella Indah Nurjanah, Meliana Lumban Toruan, Eksanti Amalia Kusumawardhani

### **Penanggung Jawab:**

Ah Maftuchan

### **Layout dan Desain:**

Bambang Nurjaman, Dedi Sunarya

### **Penerbit:**

Perkumpulan PRAKARSA  
Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12520, Indonesia

### **Kata Kunci:**

Keuangan berkelanjutan, pemeringkatan, perbankan, lingkungan, sosial, tata kelola

### **Disclaimer:**

Tulisan ini disusun sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui penyediaan evidence base yang dapat digunakan sebagai dasar advokasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Kajian ini merupakan hasil kolaborasi dari Koalisi Responsi Bank Indonesia. Isi buku ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Penelitian ini mendapatkan dukungan pendanaan dari FFA – SIDA, Swedish Embassy in Bangkok.

# Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Grafik	v
Daftar Tabel	vi
Kata Pengantar	vii
Ringkasan Eksekutif	ix
<b>Bagian 1 Pendahuluan</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
<b>Bagian 2 Metodologi Penilaian Kebijakan Bank</b>	<b>5</b>
2.1 Pemilihan Bank	6
2.2 Penentuan Tema Penilaian Kebijakan Bank	8
2.3 Elemen Penilaian, Ruang Lingkup dan Tata Cara Penilaian Kebijakan Bank	15
2.4 Batasan Penelitian	17
<b>Bagian 3 Perkembangan Kebijakan Bank dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan</b>	<b>19</b>
3.1 Hasil Penilaian Bank tahun 2024	20
3.2 Hasil Penilaian Berdasarkan Bank	23
<b>Bagian 4 Komitmen dan Kebijakan Bank pada Aspek Lingkungan untuk Mendukung Target Iklim Nasional</b>	<b>53</b>
4.1 Overview Kebijakan Bank pada Aspek Lingkungan	54
4.2 Penilaian pada Tema Perubahan Iklim	57
4.3 Penilaian pada Tema Alam	59

4.4 Penilaian pada Tema Kehutanan	61
4.5 Penilaian pada Tema Pertambangan	63
4.6 Penilaian pada Tema Minyak dan Gas	65
4.7 Penilaian pada Tema Pembangkit Listrik	67
<b>Bagian 5 Kemajuan Kebijakan dan Komitmen Bank pada Aspek Sosial dan Tata Kelola</b>	<b>69</b>
5.1 Kemajuan Bank dalam Integrasi Aspek Sosial pada Kebijakan Pembiayaan dan Investasi	70
5.2 Kemajuan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Bank pada Aspek Tata Kelola	77
<b>Bagian 6 Penutup</b>	<b>81</b>
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Rekomendasi	84
Daftar Pustaka	87

# Daftar Gambar

Gambar 1. Tahapan Penilaian Kebijakan Bank 2024	6
---	---

# Daftar Grafik

Grafik 1. Bank dengan modal Inti terbesar tahun 2023 (dalam triliun rupiah)	7
Grafik 2. Bank dengan Kapitalisasi Pasar dan Total Aset Tahun 2023 (dalam triliun rupiah)	8
Grafik 3. Skor Kebijakan Bank HSBC pada Aspek LST tahun 2024	23
Grafik 4. Skor Kebijakan Bank HSBC pada Aspek LST tahun 2024	26
Grafik 5. Skor Kebijakan Bank CIMB Niaga pada Aspek LST tahun 2024	28
Grafik 6. Skor Kebijakan Bank OCBC NISP pada Aspek LST tahun 2024	31
Grafik 7. Skor Kebijakan Bank BCA pada Aspek LST tahun 2024	33
Grafik 8. Skor Kebijakan Bank Maybank pada Aspek LST tahun 2024	36
Grafik 9. Skor Kebijakan Bank BRI pada Aspek LST tahun 2024	38
Grafik 10. Skor Kebijakan Bank Mandiri pada Aspek LST tahun 2024	41
Grafik 11. Skor Kebijakan Bank BNI pada Aspek LST tahun 2024	43
Grafik 12. Skor Kebijakan Bank Permata pada Aspek LST tahun 2024	46
Grafik 13. Skor Kebijakan Bank Danamon pada Aspek LST tahun 2024	48
Grafik 14. Skor Kebijakan Bank BSI pada Aspek LST tahun 2024	50
Grafik 15. Skor Rata-rata Kebijakan Bank pada Aspek Lingkungan	55
Grafik 16. Total pinjaman dan penerbitan saham dan obligasi terhadap perusahaan fosil dan energi terbarukan (2016-2022)	56
Grafik 17. Skor Bank pada Tema Perubahan Iklim	58
Grafik 18. Skor Bank pada Tema Alam	59
Grafik 19. Skor Bank pada Tema Kehutanan	62

Grafik 20. Skor Bank pada Tema Pertambangan	64
Grafik 21. Skor Bank pada Tema Minyak dan Gas	66
Grafik 22. Skor Bank pada Tema Pembangkit Listrik	67
Grafik 23. Skor rata-rata Kebijakan Bank pada aspek Sosial	71
Grafik 24. Skor Bank pada Tema Inklusi Keuangan	72
Grafik 25. Skor Bank pada Tema Perlindungan Konsumen	73
Grafik 26. Skor Bank pada Tema Hak Pekerja	75
Grafik 27. Skor Bank pada Tema Hak Asasi Manusia	75
Grafik 28. Skor Bank pada Tema Kesenjangan Gender	77
Grafik 29. Skor Rata-rata Bank pada Aspek Tata Kelola	78
Grafik 30. Skor Bank pada Tema Korupsi	78
Grafik 31. Skor Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas	79
Grafik 32. Skor Bank pada Tema Perpajakan	80

## Daftar Tabel

Tabel 1. Tema penilaian Asesmen Bank	9
Tabel 2. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor tahun 2024 (dalam poin)	20
Tabel 3. Ringkasan Perbandingan Peringkat Bank tahun 2024 dan 2022	21



## Kata Pengantar

Perubahan iklim telah menjadi perhatian global yang mendesak, mendorong berbagai negara untuk mengambil langkah konkret dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Indonesia, sebagai salah satu negara yang terdampak, juga turut memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam upaya ini. Sektor perbankan memainkan peran kunci dalam mendukung pencapaian target-target tersebut melalui pembiayaan berkelanjutan yang tidak hanya memperhatikan aspek finansial, tetapi juga dampak lingkungan, sosial dan tata kelolanya.

Dalam satu dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keuangan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari serangkaian kebijakan strategis yang diterbitkan untuk mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan dan sosial. Salah satu langkah signifikan adalah penerbitan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia, yang menjadi pedoman penting bagi lembaga keuangan dalam mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung pencapaian target pengurangan emisi karbon, tetapi juga mendorong investasi dalam sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.

Laporan pemeringkatan bank yang ada di tangan Anda saat ini bertujuan untuk mengeksplorasi komitmen sektor perbankan Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, termasuk adopsi standar Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola. Selain itu, kami juga membahas kemajuan yang telah dicapai dalam inklusi keuangan dan tantangan yang masih dihadapi, seperti kesetaraan gender dan hak pekerja. Dengan memahami dinamika ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memperkuat peran sektor perbankan dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

The PRAKARSA sebagai bagian dari Koalisi ResponsiBank Indonesia berharap laporan ini dapat memberikan wawasan yang mendalam dan mendorong diskusi mengenai langkah-

langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kontribusi sektor perbankan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan mendukung inklusi keuangan yang lebih luas di Indonesia.

Akhir kata, terima kasih kepada seluruh tim peneliti The PRAKARSA, PWYP Indonesia, anggota ResponsiBank Indonesia dan pelbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Saya berharap laporan ini dapat memberi penguat agar setiap pemangku kepentingan terutama Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan di Indonesia semakin berkontribusi dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta, November 2024

**Ah Maftuchan**

Direktur Eksekutif PRAKARSA

Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia



## Ringkasan Eksekutif

Pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap transisi keuangan berkelanjutan sejak 2014 melalui peluncuran peta jalan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, meskipun ada inisiatif seperti Taksonomi Hijau Indonesia dan Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia, pembiayaan untuk sektor ekonomi hijau masih rendah. Terdapat berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman tentang keuangan berkelanjutan dan standarisasi yang belum terwujud. Untuk mengatasi ini, industri keuangan perlu meningkatkan kebijakan dan pemahaman terkait, serta mengelola risiko perubahan iklim.

Koalisi ResponsiBank Indonesia juga berperan dalam menilai kemajuan kebijakan bank untuk mendukung keuangan berkelanjutan. Penilaian yang telah dilakukan enam kali ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank dalam memantau kemajuan dan meningkatkan kebijakan terkait Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST) dalam pembiayaan dan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kebijakan bank terkait integrasi LST dalam portofolio pembiayaan dan investasi berdasarkan metodologi FFGL, dan mengetahui komitmen dan kebijakan bank dalam pengarusutamaan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung target iklim nasional.

Sektor perbankan di Indonesia berperan vital dalam mendukung pengurangan emisi karbon dan transisi ke energi terbarukan melalui pembiayaan berkelanjutan. Hasil penilaian menunjukkan meskipun ada komitmen terhadap prinsip LST dan peningkatan skor dalam tema inklusi keuangan, namun rata-rata skor keseluruhan bank hanya mencapai 2,1 (dari maksimal skor 10) yang menandakan masih cukup rendah dan menunjukkan bahwa masih banyak aspek yang memerlukan perbaikan. Salah satu bank dalam penilaian yakni CIMB Niaga menunjukkan kemajuan signifikan, terutama dalam akses layanan keuangan bagi

masyarakat berpendapatan rendah dan kebijakan lingkungan yang ketat. Namun, beberapa bank besar yakni BCA, BRI, dan Danamon justru mengalami penurunan peringkat.

Peningkatan rata-rata kebijakan bank tahun 2024 pada aspek lingkungan mengalami peningkatan sebesar 0,3-point dibanding pemeringkatan tahun 2022. Tema kehutanan dan perubahan iklim merupakan tema yang meningkat cukup baik, sedangkan untuk tema pertambangan, alam dan pembangkit listrik hanya mengalami kenaikan yang cukup kecil di bawah 0,3, dan untuk tema minyak dan gas bumi justru mengalami penurunan sebesar 0,1 point.

Pada aspek sosial, sama seperti aspek lingkungan rata-rata kebijakan bank hanya mengalami peningkatan sebesar 0,3 point. Tema-tema kesetaraan gender, hak asasi manusia, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan mengalami kenaikan antara 0,5 - 0,7 point. Sedangkan untuk tema hak pekerja menurun sebesar 0,6-point dan tema kesehatan tidak mengalami perubahan skor. Meskipun tema seperti kesetaraan gender mengalami peningkatan karena beberapa bank telah memiliki regulasi pendukung, namun representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih cukup rendah.

Lebih lanjut pada aspek tata kelola, rata-rata kebijakan bank hanya meningkat sebesar 0,2-point dibandingkan tahun 2022. Tema korupsi merupakan yang cukup baik mengalami peningkatan sebesar 0,8 point, sementara transparansi dan akuntabilitas hanya meningkat 0,2-point dan perpajakan tidak mengalami perubahan point.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi utama yang perlu segera dilakukan oleh bank dan OJK. Bank-bank di Indonesia perlu 1) mengembangkan kebijakan tertulis yang jelas dan tegas terkait komitmen pembiayaan, termasuk penetapan kriteria spesifik, langkah-langkah safeguarding dan evaluasi risiko untuk sektor-sektor yang berisiko tinggi, dan 2) mengintegrasikan prinsip-prinsip sosial dalam kebijakan pembiayaan dan investasi, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan bagi staf mengenai prinsip LST dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan berdasarkan TKBI.

Otoritas Jasa Keuangan perlu 1) memperkuat dan memperluas Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI), 2) memberikan insentif dan disinsentif bagi bank yang berkomitmen untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan dan inklusi keuangan, dan 3) mendorong terbitnya aturan turunan yang spesifik bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan TKBI secara efektif, dengan audit independen untuk memastikan akuntabilitas.



## Bagian 1

# PENDAHULUAN

Industri keuangan di Indonesia menunjukkan tanggapan yang positif terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian PRAKARSA (2022) menunjukkan terdapat peningkatan kebijakan perbankan untuk mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia, namun masih dianggap kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh, di antaranya adalah rendahnya tingkat pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai konsep keuangan berkelanjutan dan belum adanya kesepakatan mengenai standardisasi kategori hijau di tingkat nasional.

## 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab merupakan komponen penting untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Untuk memastikan transisi yang efektif menuju pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha seharusnya tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola (LST). Dalam rangka mendukung transisi ini, sejak tahun 2014, Indonesia telah menunjukkan komitmen yang jelas untuk melakukan transisi dalam sektor jasa keuangan. Peluncuran peta jalan keuangan berkelanjutan oleh OJK menjadi panduan awal bagi lembaga jasa keuangan dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Peta jalan tahap I (2015 – 2019) telah menghasilkan beberapa capaian seperti pengenalan prinsip keuangan berkelanjutan, pengelompokan kriteria usaha berkelanjutan, pengembangan insentif serta pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan bagi industri keuangan (OJK, n.d).

Mengikuti langkah tersebut, OJK kembali mengeluarkan peta jalan tahap 2 (2021 – 2025) untuk mempercepat proses transisi. Pada tahun 2022, OJK mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia dan melaksanakan proyek percontohan untuk implementasi taksonomi hijau di 17 bank kategori KBMI 3 dan 4.

Industri keuangan di Indonesia menunjukkan tanggapan yang positif terhadap inisiatif keuangan berkelanjutan. Hasil penelitian PRAKARSA (2022) menunjukkan terdapat peningkatan kebijakan perbankan untuk mendukung keuangan berkelanjutan di Indonesia, namun masih dianggap kurang memadai. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai tujuan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh, di antaranya adalah rendahnya tingkat pemahaman di kalangan pelaku usaha mengenai konsep keuangan berkelanjutan dan belum adanya kesepakatan mengenai standardisasi kategori hijau di tingkat nasional. Untuk mengoptimalkan peluang yang ada, industri keuangan harus segera menyelesaikan gap ini, terutama mengingat meningkatnya tuntutan dari pasar dan masyarakat untuk produk dan jasa keuangan yang ramah lingkungan. Pemanfaatan peluang tersebut juga perlu disertai dengan pengelolaan risiko yang berkaitan dengan perubahan iklim.

Untuk itu, Koalisi ResponsiBank Indonesia, sebagai bagian dari Fair Finance International, secara berkelanjutan melakukan penilaian terhadap kebijakan bank untuk meninjau kemajuan dalam penerapan keuangan berkelanjutan. Penilaian yang telah dilakukan enam kali ini bertujuan untuk menjadi acuan bagi bank dalam menilai kemajuan dan meningkatkan kebijakan terkait LST dalam pembiayaan dan investasi. Pembaruan hasil penilaian dilakukan setiap dua tahun untuk memantau perkembangan kebijakan yang diterapkan oleh bank-

---

**Namun, meskipun ada inisiatif yang dilakukan, pembiayaan sektor ekonomi yang diklasifikasikan sebagai hijau masih terbilang rendah, hanya mencapai Rp 426,58 triliun atau 28 persen dari total baki debit Rp 2.153,82 triliun.**

bank di Indonesia, seiring dengan tuntutan global untuk keuangan berkelanjutan yang lebih spesifik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini akan menjawab pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana perkembangan kebijakan bank terkait integrasi LST dalam portofolio pembiayaan dan investasi untuk mendukung peta jalan keuangan berkelanjutan?
2. Bagaimana komitmen dan kebijakan bank dalam pengarusutamaan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung target iklim nasional?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya pemeringkatan kebijakan bank antara lain:

1. Mengetahui perkembangan kebijakan bank terkait integrasi LST dalam portofolio pembiayaan dan investasi berdasarkan metodologi FFGL.
2. Mengetahui komitmen dan kebijakan bank dalam pengarusutamaan pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung target iklim nasional.

## 1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai acuan bagi perbankan agar meningkatkan kemampuan dalam menyusun kebijakan dan implementasi keuangan berkelanjutan, sehingga perbankan bisa meningkatkan peran mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
2. Memberikan informasi kepada para investor dan publik secara umum untuk melihat kebijakan bank dan peringkat bank terkait aspek LST.
3. Mendorong industri keuangan yang beroperasi di Indonesia berkompetisi menjadi yang terbaik atau melakukan *'race to the top'* dalam meningkatkan sensitivitas kebijakan pemberian pinjaman dan atau investasi terkait aspek LST.

Halaman ini sengaja dikosongkan.



## Bagian 2

# METODOLOGI PENILAIAN KEBIJAKAN BANK

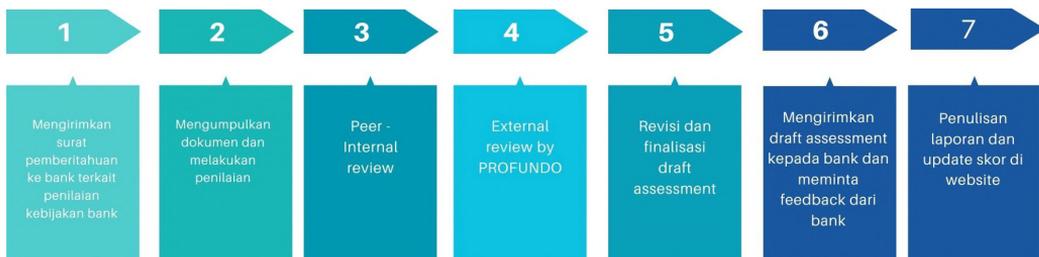
---

Pada tahun ini, Koalisi ResponsiBank menggunakan metodologi FFGI 2023. Beberapa negara di jaringan Fair Finance Asia sebagai bagian dari platform FFI yang menggunakan metode ini adalah Jepang, Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh. Penilaian kebijakan bank dilakukan kurang lebih selama 5 bulan (Juli – November 2024).

Tahun 2024 merupakan kali ke-6 Koalisi ResponsiBank Indonesia melakukan penilaian kebijakan bank di Indonesia. Penilaian ini dilakukan dengan menilai kebijakan bank terkait aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) berdasarkan informasi terbuka yang dapat diakses oleh publik. Pemingkatan bank dilakukan berdasarkan metodologi bank assesment yang dikembangkan oleh PROFUNDO dan jaringan Fair Finance International sejak tahun 2008 dan diperbarui secara berkala dengan mempertimbangkan tren global dan perkembangan terkait LST. Pada tahun ini, Koalisi ResponsiBank menggunakan metodologi FFGI 2023. Beberapa negara di jaringan Fair Finance Asia sebagai bagian dari platform FFI yang menggunakan metode ini adalah Jepang, Vietnam, Filipina, Kamboja, Thailand, Indonesia, Pakistan, dan Bangladesh.

Penilaian kebijakan bank dilakukan kurang lebih selama 5 bulan (Juli – November 2024). Secara umum, tahapan penilaian kebijakan bank dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Tahapan Penilaian Kebijakan Bank 2024



Sumber: FFGI, 2023

## 2.1 Pemilihan Bank

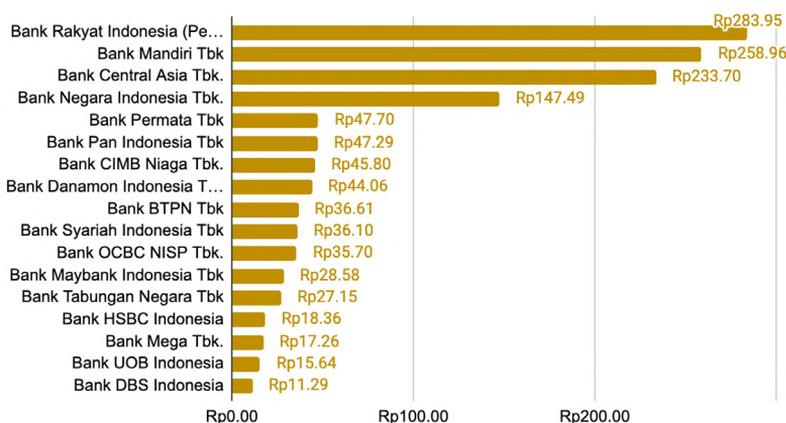
Tahun ini, terdapat 12 bank yang dinilai: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Maybank, Danamon, Bank Permata, Bank HSBC, Bank DBS, Bank OCBC, dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Beberapa perubahan dalam pemilihan bank dilakukan, termasuk penambahan Bank OCBC sebagai representasi bank asing yang dinilai, serta penyertaan BSI sebagai perwakilan bank syariah menggantikan Bank BJB yang dinilai pada periode sebelumnya. OCBC NISP dipilih dengan pertimbangan bank asing biasanya sudah memiliki komitmen dan kebijakan di sektor berkelanjutan yang lebih maju, meskipun praktik di lapangan memerlukan peninjauan lebih lanjut. Sementara itu, BSI dipilih karena merupakan satu dari 10 bank syariah terbesar di dunia. Selain itu, ekosistem keuangan di Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim juga berkembang menganut prinsip syariah.

Beberapa pertimbangan yang mendasari pemilihan bank diantaranya adalah besaran modal inti, total aset, dan kapitalisasi pasar. Modal inti mewakili cadangan keuangan yang dimiliki bank sebagai dasar untuk mendukung operasi dan menanggung kerugian yang mungkin

terjadi, yang diatur sesuai dengan regulasi untuk menjaga stabilitas finansial bank. Total aset menggambarkan skala operasional bank dan kemampuannya untuk memberikan pinjaman serta menjalankan bisnis perbankan lainnya. Sementara itu, kapitalisasi pasar menunjukkan bagaimana nilai bank dipersepsikan oleh investor di pasar saham, yang bisa dipengaruhi oleh kinerja keuangan, kondisi ekonomi, serta sentimen pasar terhadap sektor perbankan. Ketiga indikator tersebut secara bersama-sama memberikan gambaran lengkap tentang kekuatan keuangan, stabilitas, dan risiko bank. Selain itu, dengan modal inti, total aset dan kapitalisasi pasar yang besar, bank-bank tersebut memiliki pengaruh yang kuat untuk mendorong sektor bisnis yang bertanggungjawab dan berlomba menuju puncak pada aspek keberlanjutan.

Besaran modal inti bank tercermin dalam Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI), seperti diatur dalam POJK nomor 12 /POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Dalam hal pembiayaan berkelanjutan, ketika terdapat regulasi dan sektor baru, bank dengan modal inti besar memiliki kapasitas lebih untuk meningkatkan persentase portofolio pembiayaan di sektor berkelanjutan. Lebih lanjut, apabila ditinjau dari risiko permodalan, bank dengan potensi pembiayaan yang besar akan memperkecil potensi kolaps akibat kesalahan dalam menilai sektor investasi.

Grafik 1. Bank dengan modal Inti terbesar tahun 2023 (dalam triliun rupiah)



Sumber: diolah dari laporan keuangan bank 2023

Berdasarkan Grafik 1 Bank BRI, Bank Mandiri, BNI dan BCA adalah bank dengan modal inti terbesar, mencapai lebih dari 70 triliun rupiah, yang masuk dalam kategori KBMI 4. Beberapa bank yang dinilai juga masuk dalam KBMI 3 dengan modal inti mencapai Rp 14 triliun hingga Rp 70 triliun, yakni Bank Permata, Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Maybank Indonesia, dan BSI. Beberapa bank asing yang dinilai juga masuk dalam KBMI 3, yakni Bank HSBC, Bank OCBC. Sementara Bank DBS masuk dalam kategori KBMI 2.

Grafik 2. Bank dengan Kapitalisasi Pasar dan Total Aset Tahun 2023 (dalam triliun rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Perbankan, 2023

Grafik 2 menunjukkan pada 2023, Bank HSBC, Bank DBS secara *holding* memiliki tingkat kepercayaan investor paling tinggi dengan kapitalisasi pasar terbesar hingga lebih dari Rp1.300 triliun. Beberapa bank nasional baik swasta maupun BUMN juga memiliki kapitalisasi pasar tidak kalah tinggi, yakni BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI yang berkisar Rp199 trilion hingga lebih dari Rp1.200 triliun. Sementara berdasarkan total aset, bank BUMN yakni Bank Mandiri dan BRI memiliki total aset terbesar mencapai Rp1.900 hingga Rp2.300 triliun.

Bank internasional yang memiliki potensi pembiayaan yang besar di Indonesia, yakni Bank HSBC Indonesia, bank DBS Indonesia, dan bank OCBC NISP masuk dalam penilaian ke-6 dengan pertimbangan bank-bank tersebut dapat menjadi *benchmark* bank nasional dalam hal komitmen dan kebijakan lebih kuat dan ketat terkait LST. Bank-bank tersebut diketahui sudah memiliki kebijakan terkait penghentian pembiayaan sektor batu bara sebagai komitmen mendukung penanganan krisis iklim, target penurunan emisi terukur, dan memiliki kebijakan pembiayaan di sektor berisiko tinggi seperti pertambangan, perkebunan skala besar yang rawan terhadap perusakan lingkungan maupun konflik sosial.

## 2.2 Penentuan Tema Penilaian Kebijakan Bank

Setiap negara anggota Fair Finance Asia memiliki kebebasan untuk memilih tema yang dinilai. Dalam konteks Indonesia penilaian kebijakan bank pada tahun ini meliputi 15 tema yang dipilih berdasarkan isu-isu yang menjadi perhatian dari masyarakat dan relevansi dengan kerja-kerja anggota Koalisi ResponsiBank Indonesia. Secara garis besar, tema-tema yang dinilai terdiri atas tema beririsan, sektoral dan operasional yang masuk dalam aspek LST. Secara rinci, tema-tema penilaian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tema penilaian Asesmen Bank

Tema Beririsan (Cross-cutting)	Tema Sektoral	Tema Operasional
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan iklim</li> <li>• Korupsi</li> <li>• Kesetaraan gender</li> <li>• Hak asasi manusia</li> <li>• Hak pekerja</li> <li>• Alam</li> <li>• Perpajakan</li> <li>• Kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kehutanan</li> <li>• Pertambangan</li> <li>• Minyak bumi dan gas</li> <li>• Pembangkit listrik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan konsumen</li> <li>• Inklusi keuangan</li> <li>• Transparansi dan akuntabilitas</li> </ul>

Sumber: FFGI, 2023



## Tema Beririsan

### 1. Perubahan iklim

Lembaga keuangan dapat memainkan peranan penting dalam upaya penurunan emisi dengan mulai mengarahkan investasi ke arah ekonomi rendah karbon. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan komitmen untuk menerapkan standar pengurangan CO2 yang sejalan dengan mitigasi pemanasan global. Pada penilaian tahun 2024 terdapat sebanyak 28 elemen yang dinilai terkait kebijakan pengurangan emisi di internal operasional perusahaan, kebijakan bank terkait pengelolaan pembiayaan fosil, dan aturan untuk perusahaan yang didanai.

### 2. Korupsi

Korupsi secara signifikan berdampak negatif pada tatanan politik, sosial dan lingkungan. Di bidang politik, korupsi menjadi hambatan besar dalam mengembangkan aturan hukum karena pemerintah dapat kehilangan legitimasi ketika kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Korupsi juga menyebabkan berkurangnya dana publik untuk proyek infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit maupun program pengentasan kemiskinan. Praktik lobi juga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi karena memberi ruang pada pihak swasta untuk memengaruhi kebijakan. Lembaga keuangan

yang bertanggung jawab juga harus bebas dari praktik pencucian uang dan suap, serta pembiayaan terkait terorisme.

### 3. Kesetaraan gender

Kesetaraan gender mengacu pada hak, tanggung jawab, serta kesempatan yang sama antara perempuan dan laki-laki. Minimnya keterwakilan perempuan di level pemimpin dan pengambil keputusan di lembaga-lembaga publik maupun swasta dapat menimbulkan bias gender dalam pelayanan publik, kesetaraan, dan nondiskriminasi. Di sisi lain, sektor swasta dapat menjadi motor pendorong perubahan. Kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan berkontribusi penting untuk keuntungan ekonomi dan efektivitas bisnis. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan anti-diskriminasi gender, tidak mentoleransi pelecehan seksual, dan kesetaraan upah, baik dalam operasional internal lembaga keuangan maupun pada perusahaan yang dibiayai.

### 4. Hak asasi manusia

Meski secara umum tidak terlibat langsung dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), lembaga keuangan turut bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan oleh pembiayaan dan investasi yang mereka lakukan. Penghormatan HAM tidak hanya mengisyaratkan bahwa bisnis tidak boleh melakukan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, namun juga harus berupaya memitigasi dampak negatif terhadap HAM terkait operasional, produk, maupun layanan yang diberikan. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan indikator penghormatan HAM sesuai *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Lembaga keuangan juga dinilai dari kebijakan terkait proses *due diligence*, upaya remediasi, serta mekanisme pengaduan atas dampak HAM pada perusahaan yang dibiayai. Lembaga keuangan juga perlu memastikan bahwa tidak melakukan pelanggaran terhadap hak atas tanah dengan melakukan FPIC (*Free, Prior, and Informed Consent*), menghargai hak masyarakat adat, perempuan, dan anak. Kepatuhan pada prinsip HAM juga harus tercermin dalam proses pengadaan dan kebijakan operasional perusahaan, termasuk diaplikasikan pada pemasok (*supplier*) dan sub-kontraktor.

### 5. Hak pekerja

Lembaga keuangan diharapkan menghormati peraturan dan sistem hukum lokal, nasional, dan internasional mengenai ketenagakerjaan, tak hanya dalam kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) internal, tetapi juga pada kebijakan kredit/investasi untuk memastikan perusahaan yang dibiayai patuh pada aturan yang berlaku. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan penghormatan atas *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work* dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dalam kebijakan pengadaan barang/ jasa dan operasional perusahaan. Lembaga keuangan juga

perlu memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai menghormati kebebasan pekerja untuk berkumpul dan berserikat, tidak melibatkan pekerja anak dan pekerja paksa, serta anti diskriminasi. Lembaga keuangan juga perlu memastikan perusahaan menerapkan upah layak, batas maksimum jam kerja, kebijakan kesehatan dan keselamatan kerja, serta mekanisme pengawasan yang jelas untuk mengukur kepatuhan atas norma ketenagakerjaan.

## 6. Alam

Lembaga keuangan secara tidak langsung dapat berdampak serius pada keanekaragaman hayati, terutama saat berinvestasi pada sektor kehutanan, ekstraktif, minyak dan gas, perikanan, infrastruktur, serta industri yang menggunakan material genetik seperti pertanian, bioteknologi, medis, dan kosmetik. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan kebijakan penyaluran kredit/ investasi untuk memastikan bahwa perusahaan yang dibiayai berupaya mencegah dampak negatif terhadap area *High Conservation Value* (HCV), *UNESCO World Heritage*, dan *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) serta tidak terlibat dalam perdagangan tanaman dan satwa yang dilindungi.

## 7. Perpajakan

Pendapatan dari pajak sangat krusial untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Lembaga keuangan perlu beroperasi secara bertanggung jawab dengan tidak melakukan penghindaran dan penggelapan pajak serta tidak membiayai perusahaan yang melakukan hal tersebut. Pada tema ini, lembaga keuangan dinilai berdasarkan elemen *country by country reporting* atas pendapatan, profit, total aset, Full-Time Equivalent (FTE) yang berarti setara penuh waktu, subsidi yang diterima dari pemerintah, serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Lembaga keuangan juga harus memiliki komitmen untuk tidak menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak. Selain itu, lembaga keuangan perlu mendorong agar perusahaan yang dibiayai mempublikasikan struktur lengkap perusahaan, patuh pada ketentuan pajak termasuk untuk penyuplai dan sub-kontraktor.

## 8. Kesehatan

Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menunjukkan bagaimana sistem perawatan kesehatan yang responsif, setara dan universal sangat diperlukan. Pandemi berdampak pada peningkatan biaya perawatan kesehatan secara signifikan dan untuk banyak negara berkembang biaya ini sulit ditanggung. Lebih lanjut, aspek kesehatan berupa lingkungan hidup yang layak dan bersih, keselamatan dan keamanan di tempat kerja, pelarangan produksi dan penggunaan senyawa beracun, hingga integrasi aspek kesehatan dan keselamatan pada proses pengadaan perlu diperhatikan oleh perusahaan.

Pada konteks pembiayaan, bank perlu memastikan perusahaan yang dibiayai memerhatikan aspek-aspek tersebut dan patuh pada standar internasional yang berlaku.

## Tema Sektoral

### 1. Kehutanan

Hutan dan perkebunan memainkan peran penting di bumi dan memberikan manusia berbagai manfaat. Deforestasi dan degradasi hutan mencabut masyarakat lokal dari mata pencaharian mereka, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, erosi tanah dan penurunan permukaan dan air tanah. Selain itu, deforestasi juga menyebabkan kebakaran hutan yang berbahaya yang menimbulkan masalah pernapasan - seperti asma, bronkitis dan pneumonia - juga akibat lain seperti masalah mata dan kulit. Sebagian besar kebakaran hutan disebabkan oleh kerusakan hutan untuk tujuan ekspansi perkebunan skala besar untuk industri pulp dan kelapa sawit. Lembaga keuangan dapat menggunakan pengaruh mereka untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Lembaga keuangan dapat melakukannya dengan membentuk kebijakan yang ketat untuk investasi di sektor kehutanan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh sektor kehutanan, baik hutan, penebangan kayu, pulp, kertas dan produksi mebel serta perusahaan pengolahan dan perdagangan kayu lainnya. Dalam tema ini, bank dinilai berdasarkan kebijakan pemberian kredit/investasi lembaga keuangan terhadap entitas yang mereka berikan pinjaman/investasi.

### 2. Pertambangan

Dampak dari industri ekstraktif seperti pertambangan dapat terasa seketika ataupun jangka panjang setelah kegiatan ekstraktif itu telah selesai. Umumnya, upaya perbaikan saja tidak cukup untuk mengembalikan kelestarian alam di daerah industri ekstraktif. Masalah jangka panjang - seperti bocornya asam dari tambang - dapat mencemari badan air di sekitarnya selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Selain itu, pertambangan bijih mineral dan juga pemurnian bijih-bahkan dengan menggunakan teknologi modern sekalipun - menyebabkan polusi udara yang luas. Masalah umum dalam industri ekstraktif adalah perusahaan tambang tidak menghormati hak penduduk setempat atas tanah. Perusahaan kerap merampas lahan dan hutan tempat komunitas setempat menyandarkan mata pencaharian mereka. Selain itu, polusi tambang dapat menyebabkan akumulasi logam berat dalam tanah, air dan udara di sekitarnya. Ketika lembaga keuangan berinvestasi di perusahaan tambang, mereka harus menyadari apakah perusahaan mematuhi panduan-panduan internasional dan kesepakatan-kesepakatan di bidang sosial dan lingkungan

hidup. Ini berarti bahwa dalam kebijakan investasi lembaga keuangan, norma-norma yang jelas perlu disusun.

### 3. Minyak bumi dan gas

Beberapa proses dalam industri minyak bumi dan gas dapat membahayakan lingkungan. Pengeboran, fasilitas produksi minyak dan gas bumi, pembakaran, dan kilang dapat mencemari tanah, udara dan air. Harga minyak yang tinggi dan dorongan untuk mengisi cadangan minyak bumi menyebabkan perusahaan-perusahaan minyak menembus jauh lebih dalam ke wilayah-wilayah yang rentan secara ekologis. Keretakan pipa yang disebabkan oleh gempa bumi, sebab alam lainnya dan sabotase dapat menyebabkan pencemaran air tanah dan bahkan ledakan fatal dan kebakaran. Selain itu, minyak yang tumpah dari kapal tanker yang terlibat dalam kecelakaan telah mencemari banyak wilayah laut dan pesisir. Konsekuensi sosial dari industri minyak dan gas juga bisa sangat merugikan. Polusi dan penyakit menular membahayakan kesehatan, keamanan pangan dan budaya penduduk asli. Seringkali, perusahaan minyak dan gas mengambil tanah masyarakat lokal dan mengalihkan mereka dari sumber makanan dan penghidupan mereka. Kebijakan investasi lembaga keuangan di sektor minyak dan gas harus menekankan bahwa tantangan utama untuk sektor minyak bumi dan gas adalah untuk menguranginya dan menuju pengembangan energi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan lembaga keuangan harus menyertakan norma-norma sosial dan lingkungan untuk sektor minyak bumi dan gas.

### 4. Pembangkit listrik

Pembangkit listrik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, dan merupakan hal penting dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Pemasok energi perlu menghasilkan tenaga listrik dengan menawarkan keamanan pasokan, terjangkau bagi konsumen, dan yang memiliki dampak lingkungan yang minimal. Lembaga keuangan yang berinvestasi di sektor energi harus hati-hati mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengarahkan investasi mereka untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon, sejalan dengan peta jalan yang disarankan oleh *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC). Mereka dapat memilih untuk membiayai pembangkit energi terbarukan secara khusus, atau dengan menetapkan peta jalan yang jelas untuk mengurangi pembiayaan sumber energi berbahan bakar fosil yang kontroversial dan menggantinya dengan pembiayaan energi terbarukan.

## Tema Operasional

### 1. Perlindungan konsumen

Konsumen adalah aktor penting dalam pasar keuangan, sehingga masalah yang dialami oleh konsumen sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama. Sebagian besar dari jasa dan produk keuangan yang ditujukan kepada konsumen adalah: rekening berjalan dan tabungan, pinjaman pribadi, kartu debit dan kredit, pinjaman hipotek, asuransi, pensiun dan tunjangan hari tua serta produk investasi. Kurangnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang buruk. Di antaranya, krisis keuangan itu sendiri akibat kurangnya transparansi bank dalam kaitannya dengan pasar, dan juga pertumbuhan hutang dan hutang berlebihan dari nasabah lembaga keuangan. Untuk memastikan stabilitas keuangan dan praktik wajar lembaga keuangan, mereka harus mengintegrasikan perlindungan konsumen keuangan dengan kebijakan inklusi keuangan.

### 2. Inklusi keuangan

Inklusi keuangan telah menjadi isu penting terkait dengan pertanyaan tentang kontribusi keuangan untuk pembangunan berkelanjutan. Inklusi keuangan adalah instrumen pengentasan kemiskinan, serta sarana untuk mengatasi ketimpangan, yang secara signifikan meningkat di seluruh dunia. Telah disadari bahwa pertumbuhan yang timpang memiliki batasan dan tidak berkelanjutan, karena permintaan agregat akan terbatas. Jika ketidaksetaraan sangat tinggi, sejumlah konsekuensi sosial, atau bahkan kerusuhan sosial, akan terjadi dan mengancam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Inklusi keuangan artinya ada akses universal, dengan biaya yang wajar, untuk berbagai layanan keuangan. Meskipun demikian, definisi yang lebih luas dari inklusi keuangan juga menimbulkan beberapa risiko. Hal ini karena bank, meskipun mereka bukan satu-satunya aktor lembaga keuangan untuk inklusi keuangan, di satu sisi mungkin ditekan oleh pemerintah negara mereka untuk menyediakan kredit mikro untuk usaha kecil dan orang miskin. Lembaga keuangan dapat memainkan peran penting dalam menyediakan akses keuangan untuk semua kelompok pendapatan di masyarakat.

### 3. Transparansi dan akuntabilitas

Setiap individu memiliki hak untuk mengetahui apa konsekuensi kegiatan usaha terhadap hidupnya dan risiko yang dapat terjadi padanya akibat dari kegiatan tersebut. Orang yang hidupnya dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi tidak dapat membela kepentingan mereka, jika mereka tidak sepenuhnya mengetahui keuntungan sosial, ekonomi dan lingkungan, serta biaya dan risiko yang terkait dengan kegiatan itu. Mereka juga perlu mengetahui

kemungkinan alternatif kegiatan yang diusulkan. Dalam rangka untuk mendukung kepentingan sosial, budaya dan lingkungan mereka, organisasi sosial juga harus memiliki akses ke semua informasi yang relevan. Untuk alasan ini, hak publik atas informasi - dengan tujuan untuk berpartisipasi dalam cara yang berarti dalam proses pengambilan keputusan - dicatat dalam berbagai instrumen internasional. Bagi lembaga keuangan yang menganggap tanggung jawab sosial sebagai hal yang serius, kebijakan transparansi dan akuntabilitas yang solid sangat penting. Dalam tema ini, lembaga keuangan dinilai dari kebijakan internal operasional mereka.

### 2.3 Elemen Penilaian, Ruang Lingkup dan Tata Cara Penilaian Kebijakan Bank

Metodologi ini mengidentifikasi sejumlah elemen penilaian yang bersumber dari norma, standar, dan inisiatif nasional maupun internasional yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan CSR, serta praktik baik yang dianggap penting oleh organisasi-organisasi dalam jaringan Fair Finance International. Elemen-elemen penilaian juga mencerminkan harapan jaringan FFI terhadap lembaga keuangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan mereka. Standar dan inisiatif internasional pada metodologi ini mencakup persyaratan khusus bagi lembaga keuangan atau bisnis secara umum, termasuk perusahaan yang didanai. Beberapa pertimbangan dalam mendefinisikan elemen-elemen penilaian, adalah sebagai berikut:

#### • Elemen-elemen penilaian yang dirumuskan sebagai prinsip

Prinsip-prinsip ini dapat diterapkan oleh lembaga keuangan untuk investasi baru maupun yang sudah ada serta layanan keuangan. Misalnya, prinsip-prinsip ini dapat dimasukkan oleh lembaga keuangan dalam ketentuan untuk pinjaman baru dan diterapkan sebagai kriteria seleksi untuk investasi dan layanan keuangan baru. Untuk pinjaman dan investasi yang sudah ada, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan sebagai pedoman untuk kegiatan keterlibatan dan untuk kesepakatan mengenai perbaikan dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki investasi yang sudah ada. Berdasarkan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menghentikan hubungan investasi.

Metodologi Fair Finance Guide tidak mengevaluasi proses yang harus diikuti lembaga keuangan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini pada investasi dan layanan keuangannya, tetapi mengharapkan lembaga keuangan menjelaskan metode kerja mereka dalam kebijakan mereka. Lembaga keuangan harus menyatakan apa arti prinsip-prinsip ini untuk berbagai jenis investasi dan layanan keuangan. Jika lembaga keuangan hanya menetapkan kondisi tertentu untuk jenis investasi tertentu atau layanan keuangan tertentu, maka sulit untuk mengklaim bahwa lembaga keuangan menerapkan prinsip tersebut. Metodologi Fair Finance Guide mengasumsikan bahwa prinsip-prinsip perlu memiliki kaitan yang bermakna

dengan kegiatan atau produk perusahaan untuk semua jenis investasi di perusahaan dan semua layanan keuangan untuk perusahaan.

• **Elemen-elemen penilaian untuk perusahaan yang dibiayai maupun untuk lembaga keuangan itu sendiri**

Dalam penilaiannya terhadap kebijakan lembaga keuangan, Metodologi Fair Finance Guide pada prinsipnya tidak membahas cara lembaga keuangan mengambil keputusan tentang investasi dan layanan keuangannya. Sebaliknya, fokusnya adalah pada prinsip-prinsip dasar atau harapan lembaga keuangan terkait dengan perusahaan yang mereka biayai atau investasikan. Dalam tabel dengan elemen-elemen penilaian untuk setiap tema lintas sektor dan setiap tema sektor, prinsip-prinsip diperkenalkan sebagai “elemen-elemen berikut sangat penting untuk kebijakan mengenai perusahaan yang diinvestasikan oleh lembaga keuangan.”

Elemen-elemen penilaian yang dimasukkan dalam tema-tema ini sebagian besar berkaitan dengan operasi bisnis lembaga keuangan, termasuk cara pengambilan keputusan tentang investasi dan layanan keuangan. Beberapa elemen yang berkaitan dengan kegiatan operasional lembaga keuangan juga telah dimasukkan dalam tema-tema lintas sektor ataupun sektor. Elemen-elemen penilaian ini diperkenalkan secara terpisah sebagai elemen yang sangat penting untuk kebijakan mengenai operasi internal lembaga keuangan.

Cakupan penilaian terdiri atas kebijakan bank pada empat tipe pembiayaan/investasi sebagai berikut:

1. Kredit korporasi/ *corporate credit*, yaitu pembiayaan yang mencakup semua pembiayaan (pinjaman dan penjaminan) perusahaan (termasuk pinjaman korporasi umum, pembiayaan perdagangan, hipotek kepada perusahaan, dan penjaminan emisi), termasuk pinjaman kepada UKM.
2. Pembiayaan proyek/ *project finance*, yaitu jenis pembiayaan khusus, sebagian besar digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur dan industri besar. Tidak seperti kredit korporat biasa, pinjaman tersebut dijamin dengan arus kas proyek yang diproyeksikan, bukan oleh neraca perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut.
3. Aset berpemilik/*proprietary asset*, mengacu pada investasi yang dilakukan lembaga jasa keuangan dengan uang yang ada di neraca sendiri, khususnya investasi pada sekuritas seperti saham dan obligasi perusahaan.
4. Manajemen aset/*asset management*, mengacu pada uang yang dikelola lembaga jasa keuangan atas nama kliennya. Aset ini tidak terdaftar di neraca LJK. Klien dapat berupa investor institusi seperti pengelola dana pensiun atau perusahaan asuransi maupun investor individu.

Pada setiap tema, skor masing-masing lembaga keuangan didasarkan pada proporsi elemen yang termasuk dalam kebijakan. Skor diberikan untuk kategori pembiayaan atau investasi yang relevan dengan penerapan kebijakan tersebut. Pemberian skor juga mempertimbangkan isi kebijakan dan ruang lingkup kebijakan pembiayaan atau investasi. Artinya kebijakan tersebut dapat berlaku secara umum atau secara eksplisit disebutkan mengatur pada masing-masing kategori pembiayaan/investasi.

Isi kebijakan dianalisis dengan menilai kesesuaian dengan kriteria penilaian setiap elemen penilaian yang tercantum dalam pedoman penilaian. Untuk setiap elemen penilaian yang sepenuhnya/eksplisit tertulis dalam kebijakan, diberikan skor dasar 1. Jika tidak ditemukan kebijakan yang memadai, diberikan skor 0. Jika kebijakan lembaga keuangan memenuhi semua kriteria elemen penilaian, skor dasar dapat dikalikan dengan skor cakupan, yang dinyatakan sebagai persentase berdasarkan cakupan empat kategori pembiayaan/investasi.

Jika lembaga keuangan tidak mengklarifikasi ruang lingkup kebijakannya, diasumsikan bahwa 50% kegiatan lembaga keuangan tercakup. Untuk alasan ini, skor cakupan secara default adalah 50%. Persentase ini meningkat untuk setiap kategori investasi yang kebijakannya diterapkan secara eksplisit dan jelas, sebanding dengan jumlah kategori investasi yang relevan untuk lembaga keuangan tersebut. Jika semua kategori investasi yang relevan tercakup, skor cakupannya adalah 100%, menghasilkan skor elemen akhir 1.

Skor untuk semua elemen yang termasuk dalam tema dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah elemen pada tema tersebut, sehingga dihasilkan skor akhir untuk sebuah tema. Skor akhir pada level tema maupun perbankan dapat disajikan dalam bentuk desimal sebagai berikut:



Dokumen yang dinilai bersumber dari laporan tahunan bank tahun 2023, laporan keberlanjutan bank tahun 2023 dan dokumen kebijakan yang tersedia di laman web perusahaan yang diakses pada tahun Juli - September 2024.

## 2.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada 12 bank yang dinilai. Dari sejumlah bank tersebut, beberapa bank yang hanya fokus pada pembiayaan ritel akan ada kemungkinan menjadi tidak relevan pada beberapa cakupan penilaian, seperti pembiayaan proyek ataupun kredit korporasi. Begitupun sebaliknya, beberapa bank yang fokus pada pembiayaan besar

berupa pembiayaan proyek dan kredit korporasi akan kurang relevan pada penilaian terkait perlindungan konsumen dan inklusi keuangan.

Karena pertimbangan aspek metodologis, pemeringkatan ini tidak menilai praktik di lapangan. Untuk mengisi gap antara kebijakan bank dan praktik, ResponsiBank Indonesia melakukan kajian yang berbeda secara lebih mendalam dalam bentuk studi kasus seperti sektor-sektor yang menjadi prioritas strategis. Contohnya melihat bagaimana aliran pembiayaan dari bank kepada perusahaan-perusahaan di sektor ekstraktif, seperti pertambangan batubara, nikel, ataupun perkebunan skala besar seperti sawit yang memiliki risiko tinggi terhadap kerusakan alam dan konflik sosial.



### Bagian 3

## PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BANK DALAM IMPLEMENTASI KEUANGAN BERKELANJUTAN

Dari hasil pemeringkatan tersebut, tujuh bank tidak mengalami perubahan dalam posisi peringkat mereka dibandingkan tahun sebelumnya. HSBC, DBS, dan CIMB Niaga tetap menduduki posisi teratas.



### 3.1 Hasil Penilaian Bank tahun 2024

Bank-bank di Indonesia menunjukkan komitmen yang cukup baik terhadap inklusi keuangan. Berdasarkan hasil pemeringkatan bank tahun 2024, tema inklusi keuangan mencatat skor tertinggi, diikuti oleh tema korupsi dengan skor masing-masing 5,7 dan 4,4. Namun, meskipun prestasi ini menggembirakan, banyak tema lain yang masih mendapatkan skor yang relatif rendah, dengan rata-rata skor keseluruhan hanya mencapai 2,1. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam beberapa aspek, masih banyak ruang untuk perbaikan di berbagai bidang lainnya agar industri perbankan lebih responsif terhadap tantangan yang ada.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Penilaian Bank per Tema dan Sektor tahun 2024 (dalam poin)

Nama Bank	Perubahan Iklim	Korupsi	Kesetaraan Gender	Kesehatan	Hak Asasi Manusia	Hak Pekerja	Alam	Perpajakan	Kehutanan	Pertambangan	Minyak dan Gas	Pembangkit Listrik	Perlindungan Konsumen	Inklusi Keuangan	Transparansi dan Akuntabilitas	Nilai rata-rata per bank
HSBC	3,8	5,8	3,1	2,5	4,5	4,8	3,4	2,4	3,8	2,0	2,4	2,4	5,3	4,6	2,5	<b>3,5</b>
DBS	3,0	3,8	1,4	2,3	3,6	3,7	3,7	1,9	3,0	1,7	1,5	2,1	4,0	4,3	2,1	<b>2,8</b>
CIMB NIAGA	2,2	4,6	1,9	0,0	4,7	2,6	0,4	0,6	4,3	1,0	0,3	3,2	3,2	6,4	3,9	<b>2,6</b>
OCBC	2,0	4,4	1,5	0,0	2,4	1,1	2,1	4,1	2,0	0,9	1,7	2,8	4,2	6,4	1,5	<b>2,5</b>
BCA	0,3	5,4	1,0	0,0	2,5	2,4	0,5	1,8	2,5	0,0	0,0	0,7	7,4	4,3	2,6	<b>2,1</b>

MAYBANK	1,2	3,1	1,0	0,0	0,3	1,4	1,0	0,6	1,8	2,0	0,3	2,3	3,7	6,4	2,7	<b>1,9</b>
BRI	2,5	4,6	0,5	0,5	1,8	0,8	1,1	0,0	2,7	0,0	0,0	1,5	5,3	6,4	2,5	<b>2,0</b>
MANDIRI	1,3	3,8	3,0	0,5	0,7	0,4	2,1	0,0	1,4	0,0	0,0	0,7	6,8	6,4	2,1	<b>1,9</b>
BNI	0,9	4,6	1,3	0,0	0,7	2,4	0,0	0,6	1,4	0,2	0,0	0,7	7,6	6,4	1,7	<b>1,9</b>
BANK PERMATA	0,4	4,6	1,5	0,0	0,0	1,1	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,7	6,3	5,7	1,1	<b>1,6</b>
DANAMON	1,2	4,6	2,0	0,0	0,7	0,0	0,5	2,4	0,7	0,0	0,0	0,7	2,6	5,7	2,4	<b>1,6</b>
BSI	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	4,7	5,4	1,6	<b>1,1</b>
<b>Nilai rata-rata per tema</b>	<b>1,5</b>	<b>4,4</b>	<b>1,5</b>	<b>0,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>1,4</b>	<b>5,2</b>	<b>5,6</b>	<b>2,3</b>	<b>2,1</b>

Sumber: olahan penelitian

Pemeringkatan bank juga mengevaluasi kemajuan kebijakan masing-masing bank berdasarkan skor yang diperoleh pada tahun 2024 dan dibandingkan dengan tahun 2022. Dari hasil pemeringkatan tersebut, tujuh bank tidak mengalami perubahan dalam posisi peringkat mereka dibandingkan tahun sebelumnya. HSBC, DBS, dan CIMB Niaga tetap menduduki posisi teratas. Namun, terdapat tiga bank yang mengalami penurunan peringkat, yaitu BCA, BRI, dan Danamon. Di sisi lain, OCBC, BSI, dan BJB tidak menunjukkan perubahan dalam peringkat mereka karena baru dinilai dan dihapus dari pemeringkatan tahun 2024.

Tabel 3. Ringkasan Perbandingan Peringkat Bank tahun 2024 dan 2022

Bank	Ranking 2024	Ranking 2022	Perubahan Ranking	Nilai rata-rata tahun 2024	Nilai rata-rata tahun 2022	Penambahan/pengurangan skor
HSBC	1	1	=	3,6	3,6	0,0
DBS	2	2	=	2,8	2,6	0,2
CIMB NIAGA	3	3	=	2,4	1,9	0,5
OCBC (Baseline)	4	-	-	2,4	-	-
BCA	5	4	↓	2,0	1,9	0,1
MAYBANK	6	6	=	1,9	1,6	0,3

BRI	7	5		1,9	1,8	0,1
MANDIRI	8	8		1,8	1,4	0,4
BNI	9	9		1,8	1,4	0,4
BANK PERMATA	10	10		1,5	1,3	0,1
DANAMON	11	7		1,5	1,5	0,0
BSI (Baseline)	12	-		1,1	-	-
BJB	-	11		-	1,0	-

Sumber: olahan penelitian

Hampir semua bank mengalami peningkatan skor, meskipun peningkatannya relatif kecil, berkisar antara 0,1 hingga 0,5. Peningkatan skor tertinggi dicatat oleh CIMB Niaga, yang mengalami kenaikan sebesar 0,5. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kebijakan CIMB Niaga dalam tema kehutanan, inklusi keuangan, dan hak asasi manusia.

Dalam tema kehutanan, CIMB Niaga telah menetapkan pedoman sektor yang merinci persyaratan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) minimum yang wajib, kegiatan yang dilarang, serta aspek yang didorong untuk praktik berkelanjutan. Pedoman ini mencakup sektor pertanian, kehutanan, penggunaan lahan lainnya, serta perubahan penggunaan lahan, termasuk minyak sawit, batubara, minyak dan gas, kehutanan, karet alam, jasa konstruksi, infrastruktur, pertambangan, dan manufaktur.

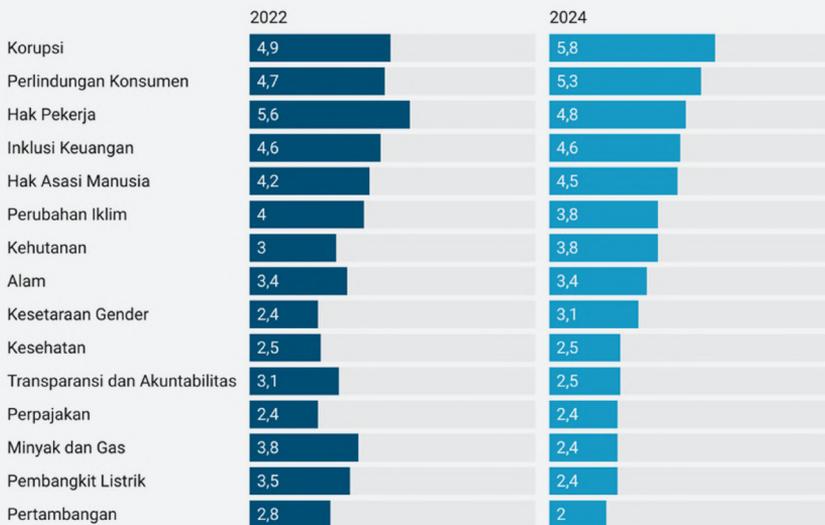
CIMB Niaga juga mengharuskan debitur yang memiliki area konsesi tertentu untuk berkomitmen pada prinsip No Deforestation, No Peat, dan No Exploitation (NDPE). Selain itu, debitur diwajibkan memiliki dokumen lingkungan, menerapkan prinsip Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta menghormati Hak Asasi Manusia dengan menerapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dan menyediakan mekanisme pengaduan.

### 3.2 Hasil Penilaian Berdasarkan Bank



Secara umum, perubahan nilai pada HSBC bersifat inkremental, tanpa adanya peningkatan drastis dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya. Namun, perolehan nilai HSBC tetap dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yang menunjukkan komitmen bank ini terhadap keberlanjutan dan manajemen risiko lingkungan. HSBC juga menerapkan praktik terbaik internasional, mengadopsi berbagai standar seperti Equator Principles, IFC Environmental, Health, and Safety Guidelines, dan UN Global Compact.

Grafik 3. Skor Kebijakan Bank HSBC pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

HSBC mendapatkan skor tertinggi pada tema korupsi sebesar 5,8, naik paling besar sebanyak 0,9 dibandingkan tahun 2022. HSBC juga mendapatkan nilai yang cukup baik pada tema perlindungan konsumen sebesar 5,3. Namun, kebijakan korupsi hanya berlaku untuk kegiatan operasional bank dan tidak mengikat klien.

Pada aspek lingkungan, salah satu faktor utama skor yang diperoleh oleh HSBC dipengaruhi oleh pengembangan kebijakan sektoral, yang berfungsi sebagai kerangka manajemen risiko untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko reputasi, kredit, dan hukum yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial dari klien. Kebijakan ini mencakup batasan, larangan, target, dan syarat yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi, serta ruang lingkup yang jelas mengenai jenis aset dan entitas yang terikat pada kebijakan tersebut. Meskipun demikian, kebijakan sektoral HSBC masih memiliki kelemahan. Fokusnya cenderung pada standar lingkungan dan belum sepenuhnya mencakup aspek sosial dan tata kelola. Meskipun beberapa kriteria diatur dalam Equator Principles, masing-masing sektor memiliki isu spesifik yang dianggap penting, sehingga perlu ada kebijakan sosial dan tata kelola yang lebih komprehensif.

Pada tema pertambangan, HSBC menerapkan *partial exclusion* yang artinya hanya melarang pembiayaan dengan menerapkan ambang batas tertentu. Sebagai contoh, perbedaan perlakuan antara klien baru dan klien eksisting; perbedaan perlakuan dengan menerapkan batas waktu tertentu. Perlu diketahui bahwa penurunan pada tema ini juga disebabkan adanya perubahan teknis metodologi yaitu penghapusan beberapa elemen yang sebelumnya menjadi indikator penilaian.

Lebih lanjut, HSBC telah melakukan pengungkapan terhadap *financed emissions* (emisi yang dibiayai) pada scope 3, meskipun pengungkapan ini terbatas pada sektor tertentu dan mencakup seluruh portofolio serta kelas aset yang dimiliki. Bank ini juga telah menyusun target terukur untuk pembiayaan sektor minyak dan gas, dengan sasaran pengurangan emisi sebesar 34% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, HSBC melarang pembiayaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan proyek pertambangan batu bara termal baru. Namun, terdapat pengecualian dalam perlakuan bagi klien baru dan eksisting, di mana klien eksisting mendapatkan kelonggaran melalui pemberlakuan ambang batas yang lebih rendah.

HSBC telah membiayai proyek energi terbarukan, tetapi belum memiliki target yang jelas untuk meningkatkan pembiayaan ke sektor ini, baik secara absolut maupun relatif terhadap portofolio bahan bakar fosil yang dimiliki. Dalam sektor kehutanan, HSBC memiliki kebijakan yang mencakup syarat sertifikasi seperti *Forest Stewardship Council* (FSC) dan *Programme for the Endorsement of Forest Certification* (PEFC). Kebijakan ini melarang keterlibatan dalam proyek yang mendukung penebangan kayu ilegal. Namun, karena HSBC hanya mensyaratkan pemenuhan salah satu standar (FSC atau PEFC), nilai yang diperoleh menjadi rendah karena FSC lebih ketat dibandingkan PEFC.

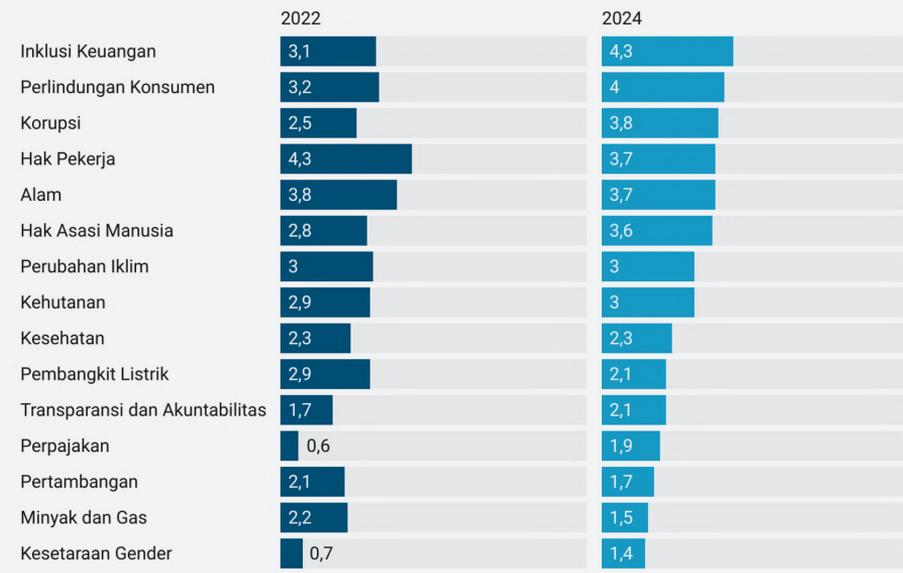
Pada aspek sosial, penilaian pada tema Hak Asasi Manusia (HAM), hak pekerja didorong oleh ratifikasi standar internasional yang relevan. Namun, kebijakan HSBC dalam tema HAM belum mencakup perlindungan untuk kelompok rentan, seperti anak-anak dan penyandang disabilitas. Dalam perlindungan konsumen dan inklusi keuangan, HSBC telah menerapkan peraturan terkait perlindungan data, transparansi produk, layanan pengaduan, prosedur penagihan utang, dan literasi keuangan, yang merupakan standar minimum dari regulator.

Pada aspek tata kelola, dalam hal transparansi, tidak banyak perubahan dari penilaian sebelumnya karena HSBC telah memenuhi standar minimum yang berlaku. Namun, HSBC belum mengungkapkan terkait nama-nama perusahaan yang menerima investasi dan kredit baru, serta seluruh transaksi proyek yang masih berjalan, sesuai dengan praktik terbaik seperti Prinsip Equator.



DBS menunjukkan kemajuan dalam berbagai aspek, masih terdapat area yang perlu diperbaiki untuk mencapai standar keberlanjutan yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, DBS mendapatkan skor paling tinggi pada tema inklusi keuangan sebesar 4,3 point, hal ini juga di dukung kenaikan skor sebesar 1,2 dibandingkan tahun 2022.

Grafik 4. Skor Kebijakan Bank HSBC pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Bank DBS memperoleh nilai 3,0 untuk tema perubahan iklim. DBS telah berkomitmen untuk tidak membiayai proyek batu bara termal dan PLTU, serta menghentikan pendanaan untuk pelanggan baru yang mendapatkan lebih dari 25% pendapatannya dari *thermal coal*. Di sisi lain, tema alam mengalami penurunan skor dari 5,7 pada tahun 2022 menjadi 3,7 pada tahun 2024. Hal ini disebabkan DBS tidak memperoleh skor pada elemen baru dalam penilaian tema alam, termasuk kurangnya pengukuran terhadap jejak biodiversitas dalam portofolio dan tidak adanya kebijakan mengenai pengecualian untuk pertambangan laut dalam (*Deep Sea Mining*).

Untuk tema kehutanan, skor DBS menurun dari 3,3 pada tahun 2022 menjadi 3,0 pada tahun 2024. Meskipun bank ini menunjukkan komitmen untuk tidak mendanai aktivitas yang berdampak negatif di area bernilai konservasi tinggi (HCV) dan tidak terlibat dalam perdagangan kayu ilegal, penurunan skor terjadi karena hilangnya elemen penilaian yang sebelumnya ada.

Pada aspek sosial, pada tema HAM, skor meningkat dari 3,2 pada tahun 2022 menjadi 3,6 pada tahun 2024. DBS telah mengadopsi Equator Principles dan IFC Performance Standards, serta menunjukkan komitmen terhadap United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights. Tema kesetaraan gender mengalami peningkatan skor dari 0,7 di tahun 2022 menjadi 1,4 di tahun 2024. Peningkatan ini berkat komitmen DBS dalam mencegah diskriminasi dan kekerasan berbasis gender di tempat kerja, serta menyediakan pelatihan khusus, kebijakan remunerasi setara, dan program pengembangan profesional untuk mendukung akses perempuan ke posisi senior.

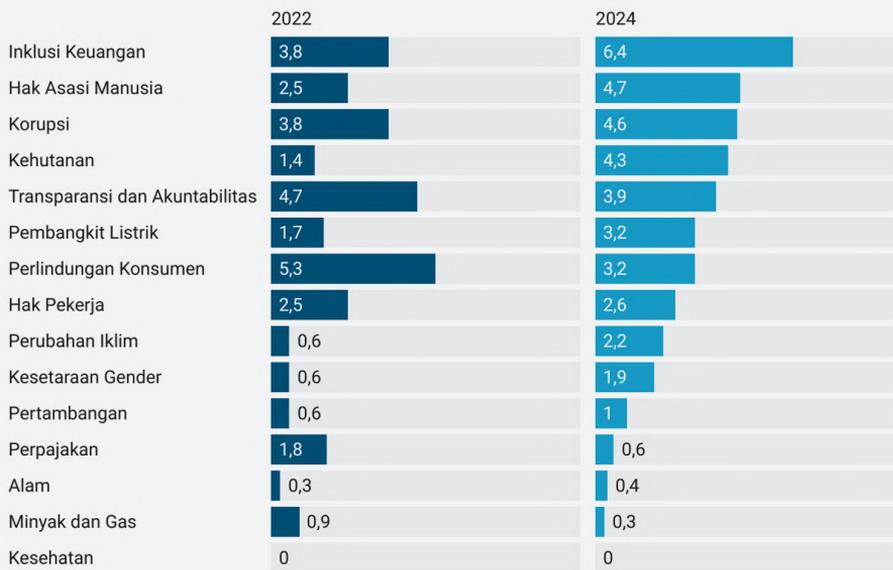
Namun, tema hak pekerja mengalami penurunan skor dari 4,3 pada tahun 2022 menjadi 3,7 pada tahun 2024. Meskipun DBS telah mengintegrasikan standar hak pekerja sesuai dengan ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, namun belum ada kebijakan yang mematuhi ILO Maternity Protection Convention, serta memastikan bahwa perusahaan yang didanai menyediakan kondisi kerja yang memadai.

Pada aspek tata kelola, DBS menunjukkan peningkatan signifikan dalam komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas, korupsi, dan perpajakan. Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor meningkat dari 1,7 pada tahun 2022 menjadi 2,1 pada tahun 2024. DBS telah menjelaskan kerangka keuangan dan investasinya terkait isu lingkungan dan sosial, serta memastikan bahwa investasi memenuhi ketentuan dalam kebijakan Approach to Responsible Banking. Laporan keberlanjutan yang dipublikasikan juga telah diverifikasi secara eksternal dan disesuaikan dengan standar GRI, mencakup informasi tentang semua transaksi pembiayaan proyek yang belum selesai, serta rincian portofolio berdasarkan kawasan, ukuran, dan industri.

Peningkatan skor pada tema korupsi dari 2,7 pada tahun 2022 menjadi 3,8 pada tahun 2024 menunjukkan komitmen DBS untuk mencegah suap, pencucian uang, dan pendanaan tindakan terorisme, yang juga berlaku untuk rantai pasok eksternal berkat adopsi Equator Principles dan IFC Performance Standards. Dalam tema perpajakan, skor meningkat dari 0,6 pada tahun 2022 menjadi 1,9 pada tahun 2024. Peningkatan skor salah satunya karena DBS telah melaporkan pendapatan, laba, dan pajak berdasarkan negara tempat operasinya, serta memiliki komitmen untuk melarang klien mendirikan struktur internasional guna menghindari pajak dan tidak terlibat dalam transaksi terkait.

CIMB Niaga menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek keberlanjutan, terutama dalam tema lingkungan dan sosial. Pada tahun 2024 CIMB Niaga mendapatkan skor paling tinggi pada tema inklusi keuangan sebesar 6,4 naik sebesar 2,6 dibandingkan tahun 2022.

Grafik 5. Skor Kebijakan Bank CIMB Niaga pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, CIMB Niaga mengalami peningkatan skor pada tema perubahan iklim dan kehutanan. Pada tema perubahan iklim, CIMB Niaga mengalami peningkatan skor yang signifikan, dari 0,4 pada tahun 2022 menjadi 2,2 pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh langkah-langkah strategis yang diambil oleh CIMB Niaga untuk menetapkan target iklim yang selaras dengan Perjanjian Paris, dengan tujuan utama untuk membatasi pemanasan global. Sasaran utama bank adalah menjaga kenaikan suhu global di bawah 2°C, idealnya mencapai 1,5°C, dibandingkan dengan tingkat suhu sebelum era industri.

Di tema kehutanan, skor CIMB Niaga meningkat dari 0,7 pada tahun 2022 menjadi 4,3 pada tahun 2024. Peningkatan ini dicapai berkat komitmen CIMB Niaga untuk

mengikuti UN Global Compact, serta mewajibkan klien di sektor-sektor tertentu untuk menerapkan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free Prior Informed Consent/FPIC) dalam pendekatan sosial mereka. Kebijakan FPIC diterapkan di semua sektor yang dibiayai oleh bank, termasuk kehutanan, karet, batubara, minyak dan gas, manufaktur, kelapa sawit, serta konstruksi.

Pada beberapa tema seperti pertambangan dan minyak dan gas, CIMB Niaga mendapatkan peningkatan skor karena telah menerapkan UN Global Compact Principles, serta kebijakan yang melarang pemberian pinjaman kepada peminjam yang menggunakan metode penambangan *Mountain Top Removal* dan mengecualikan investasi untuk tambang batu bara termal baru. Di sektor pembangkit listrik, CIMB Niaga juga mengalami peningkatan skor dari 1,7 pada tahun 2022 menjadi 3,2 pada tahun 2024. Peningkatan ini didukung oleh kebijakan CIMB Niaga untuk mencapai target pengurangan intensitas emisi sebesar 38% dalam portofolio pembangkit listrik dari baseline tahun 2022, dengan prioritas pada investasi dalam solusi rendah karbon dan energi terbarukan.

Di sisi sosial, CIMB Niaga telah meningkatkan skor di beberapa tema penting, termasuk hak asasi manusia dan kesetaraan gender, mencerminkan upaya bank dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan adil. Kebijakan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas juga menunjukkan komitmen CIMB Niaga terhadap keberagaman dan inklusi.

Pada tema kesetaraan gender, CIMB Niaga mencatat peningkatan skor dari 0,6 pada tahun 2022 menjadi 1,9 pada tahun 2024. Peningkatan ini diperoleh berkat kebijakan yang memastikan penyediaan layanan perbankan tanpa diskriminasi berdasarkan etnis, agama, ras, status sosial, jenis kelamin, atau faktor-faktor lain yang dapat melanggar hak asasi manusia. Selain itu, CIMB Niaga juga mempublikasikan data terkait dukungan bank dalam pemberdayaan perempuan di sektor UMKM. Untuk tema hak asasi manusia dan hak pekerja, CIMB mendapatkan skor berkat penerapan UN Global Compact Principles. Sementara pada tema perlindungan konsumen, CIMB Niaga mengalami penurunan skor dari 5,3 pada tahun 2022 menjadi 3,2 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kurangnya data dalam laporan keberlanjutan dan laporan tahunan 2023 terkait kebijakan aksesibilitas bagi pelanggan dengan disabilitas dan kebutuhan khusus di semua cabang fisik serta layanan elektronik.

Dalam aspek tata kelola, terjadi peningkatan dan penurunan skor pada beberapa tema. Tema korupsi, terjadi peningkatan skor dari 3,5 pada tahun 2022 menjadi

4,6 pada tahun 2024. Peningkatan ini dicapai berkat komitmen bank untuk tidak menyediakan dana bagi kegiatan partai politik mana pun, sembari memberikan kebebasan kepada karyawan untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dengan batasan tertentu guna menghindari potensi konflik kepentingan.

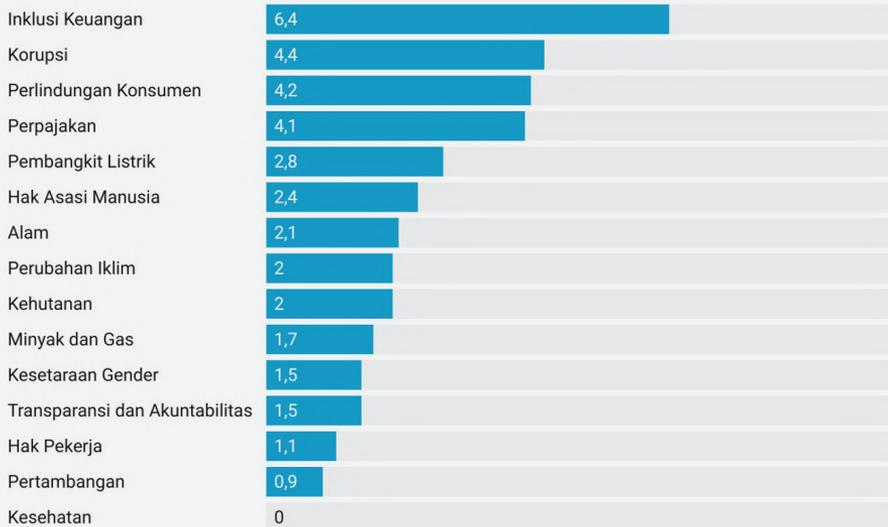
Namun pada tema perpajakan, CIMB Niaga mengalami penurunan skor dari 1,8 pada tahun 2022 menjadi 0,6 pada tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan perpajakan CIMB Niaga yang masih terbatas pada aspek penghindaran pajak (Tax Evasion), tanpa mencakup penghindaran pajak (Tax Avoidance), dan hanya berlaku untuk audiens tertentu. Pada tema transparansi dan akuntabilitas, CIMB Niaga mengalami penurunan skor dari 4,7 menjadi 3,9. Penurunan ini disebabkan oleh bank yang hanya mengungkapkan kontribusi sebagai penyelenggara dan peserta dalam acara keuangan berkelanjutan, tanpa mempublikasikan jumlah perusahaan yang diajak bekerja sama dalam isu sosial dan lingkungan, serta tidak menerbitkan hasil keterlibatan terkait topik-topik tersebut, termasuk tujuan dan tenggat waktu yang ditetapkan.



Bank OCBC NISP menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam aspek keberlanjutan, dengan pencapaian skor yang positif di berbagai tema lingkungan dan sosial. Meskipun tahun ini adalah pemeringkatan yang pertama kali dilakukan untuk OCBC NISP namun menduduki peringkat ke empat dari 12 bank yang dinilai.

OCBC NISP mencatat skor paling tinggi pada tema inklusi keuangan yakni 6,4. Hal ini berkat kebijakan yang memastikan akses produk perbankan bagi kelompok miskin, marginal, dan UMKM. Penyaluran kredit kepada UMKM telah melebihi 10% dari total kredit. Selain itu, OCBC menyediakan layanan mobile banking, berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan, dan memberikan informasi proses kredit serta layanan kredit perumahan rakyat tanpa biaya yang memberatkan.

Grafik 6. Skor Kebijakan Bank OCBC NISP pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Bank OCBC NISP mendapatkan skor pada semua aspek lingkungan. Tema perubahan iklim memperoleh skor 2, tema alam 2,1, tema kehutanan 2, tema pertambangan 0,9, tema minyak dan gas 1,7, serta tema pembangkit listrik 2,8. Secara umum, kebijakan terkait iklim OCBC NISP terpenuhi dalam enam sektor prioritas yang tercantum dalam dokumen pembiayaan yang bertanggung jawab milik OCBC Group, termasuk penerapan Equator Principles. Kebijakan lain yang mendapat skor positif adalah pelarangan penebangan ilegal dan upaya menjaga hutan yang memiliki stok karbon tinggi (*High Carbon Stock/ HCS*).

OCBC Group sudah memiliki dokumen-dokumen mengenai pembiayaan berkelanjutan yang dapat diintegrasikan ke dalam laporan keberlanjutan OCBC NISP di Indonesia. Meskipun OCBC Group pernah menerbitkan TCFD Report, hanya OCBC Hongkong yang melakukannya dalam asesmen ini. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar TCFD Report untuk regional Indonesia juga dapat dilaksanakan. Pada tema pembangkit listrik, OCBC Group telah mengimplementasikan skema net zero untuk enam sektor prioritas, termasuk di Indonesia. Kebijakan ini berdampak positif pada skor pembiayaan energi terbarukan. Selain itu, OCBC memiliki target jangka panjang untuk mencapai net

zero emissions, yang menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan.

Dalam aspek sosial, OCBC NISP mencatat skor 1,5 pada tema kesetaraan gender. Skor ini diperoleh karena telah mengadopsi kebijakan yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi pekerja laki-laki dan perempuan. Proporsi keterwakilan perempuan di tingkat manajemen menunjukkan kemajuan yang telah mencapai setidaknya 30%, namun perlu perhatian lebih pada posisi Board of Directors. Selain itu, penyaluran kredit kepada UMKM yang dimiliki oleh perempuan merupakan nilai tambah yang menunjukkan inklusivitas dalam pemberian kredit.

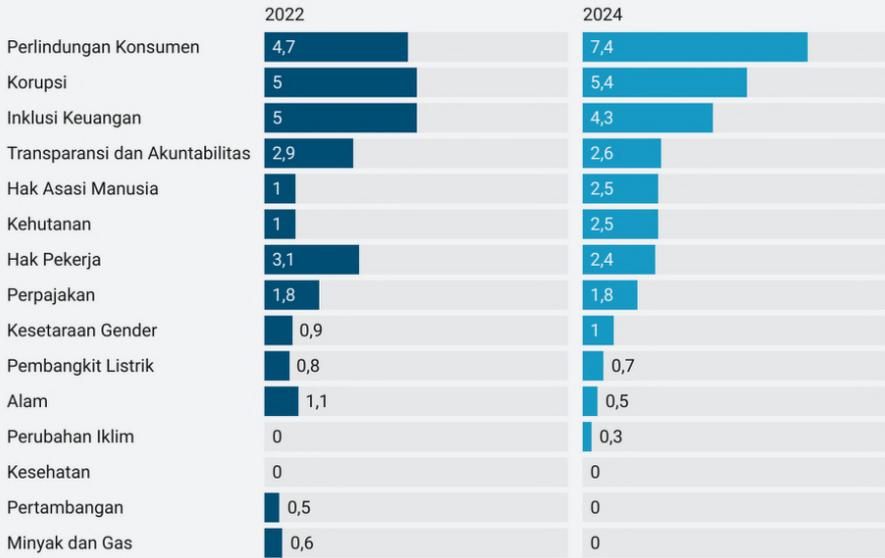
Pada tema HAM mendapatkan skor 2,4, ini diperoleh karena OCBC Group telah mengadopsi prinsip UN Global Compact. Kebijakan internal bank yang diterapkan di seluruh anak perusahaan juga mengacu pada UK Modern Slavery Act 2015 dan Australian Modern Slavery Act 2018, yang berhubungan dengan tema hak pekerja. Sementara pada tema perlindungan konsumen mendapatkan OCBC NISP mendapatkan skor 4,2, karena telah memiliki kebijakan yang mencakup hak konsumen, alur pengaduan dan penyelesaian, perlindungan data konsumen, serta informasi tentang perubahan tarif dan risiko investasi bagi konsumen.

Pada aspek tata kelola OCBC NISP memperoleh skor pada berbagai tema tata kelola. Pada tema korupsi memperoleh skor 4,4, perolehan ini karena telah memiliki kebijakan AML-CFT yang berlaku untuk semua pegawai dan juga menerbitkan informasi terkait beneficial ownership, yang berkontribusi pada skor positif di tema ini. Dalam hal perpajakan memperoleh skor 4,1, dalam kebijakannya OCBC NISP telah menunjukkan komitmen untuk melaporkan total aset, pendapatan, dan profit di setiap negara operasionalnya. Bank ini juga berkomitmen untuk tidak terlibat dalam transaksi yang bertujuan untuk menghindari pajak. Namun, pada tema transparansi dan akuntabilitas memperoleh skor 1,5, ini disebabkan oleh kurangnya pengungkapan terkait kontribusi dalam acara keuangan berkelanjutan, serta tidak mempublikasikan jumlah perusahaan yang diajak bekerja sama dalam isu sosial dan lingkungan.



Bank BCA menunjukkan pencapaian yang bervariasi dalam aspek keberlanjutan. BCA memperoleh skor tertinggi pada tema perlindungan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa BCA telah mengambil langkah-langkah positif untuk mendukung aksesibilitas dan perlindungan menyeluruh bagi konsumennya.

Grafik 7. Skor Kebijakan Bank BCA pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan Bank BCA memperoleh skor yang relatif rendah. Pada tema perubahan iklim, alam, kehutanan, dan tema pembangkit listrik memperoleh skor antara 0,4 - 2,5. Terkait tema perubahan iklim BCA mendapatkan skor karena telah memiliki kebijakan yang mengharuskan debitur (calon) untuk mematuhi syarat-syarat kelengkapan dokumen sesuai standar nasional seperti Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan V-Legal untuk ekspor produk industri kehutanan.

Pada tema alam, BCA telah mengimplementasikan kebijakan untuk menjaga hutan yang memiliki stok karbon tinggi dan berupaya untuk melindungi warisan UNESCO dari dampak pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Pada tema kehutanan, BCA mengatur pemberian kredit kepada perusahaan yang memenuhi standar *Forest Stewardship Council* (FSC). Dalam tema pertambangan dan minyak

dan gas, BCA mencatat skor berkat upaya menjaga warisan dunia UNESCO. Sementara itu, pada tema pembangkit listrik, BCA mendapatkan skor karena telah memiliki kebijakan yang mendukung pembiayaan energi terbarukan. Meskipun demikian, BCA tidak mendapatkan skor pada tema pertambangan serta minyak dan gas.

Pada aspek sosial, Bank BCA mencatat skor 0,9 pada tema kesetaraan gender, 1 pada tema hak asasi manusia (HAM), dan 3,1 pada tema hak pekerja. Pada tema kesetaraan gender, BCA telah mengadopsi kebijakan yang menjamin kesetaraan hak dan kesempatan bagi seluruh pekerja, baik laki-laki maupun perempuan. Bank ini menerapkan kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan berbasis gender di tempat kerja, termasuk kekerasan verbal, fisik, dan seksual.

Dalam hal HAM, BCA memiliki kebijakan yang mengacu pada *UN Guiding Principles on Business and Human Rights*. Bank ini juga mendapatkan skor positif karena menghormati hak masyarakat lokal dalam aspek pembiayaan. Pada tema hak pekerja, BCA mengadopsi *ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*, serta memperhatikan pemaksaan kerja dan melarang pekerja di bawah umur dalam semua aspek pemberian pembiayaan. Meskipun telah menerapkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan menghormati HAM, namun BCA tidak mendapatkan skor pada tema kesehatan karena tidak ditemukan elemen kebijakan pada tema tersebut.

Dalam hal perlindungan konsumen, BCA mendapatkan skor 4,7 karena memiliki berbagai kebijakan, termasuk informasi mengenai hak konsumen dan risiko produk atau jasa, saluran pengaduan dengan pembaruan progres penyelesaian, serta perlindungan data konsumen. Selain itu, BCA mengatur resolusi utang dan memberikan pelatihan kepada pegawai untuk memastikan kebijakan perlindungan konsumen dijalankan secara efektif.

Di tema inklusi keuangan, BCA mencatat skor 5 berkat kebijakan yang memastikan akses produk perbankan bagi kelompok miskin, marginal, dan UMKM. Penyaluran kredit kepada UMKM telah melebihi 10% dari total kredit. BCA juga menyediakan layanan mobile banking, berkomitmen meningkatkan literasi keuangan, dan tidak membebankan biaya yang memberatkan saat pembukaan akun, dengan syarat dan ketentuan yang disesuaikan dengan bahasa nasional/ lokal.

Pada aspek tata kelola, BCA memperoleh skor 5 pada tema anti-korupsi, 1,8 pada tema pajak dan 2,9 pada tema transparansi dan akuntabilitas. Dalam tema

korupsi, BCA memiliki kebijakan Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT) yang berlaku untuk seluruh pegawai. BCA juga mendapatkan skor yang baik berkat publikasi terkait beneficial ownership dan komitmen untuk melakukan *due diligence* terhadap debitur yang merupakan Politically Exposed Persons (PEP). Pada tema pajak, BCA telah melaporkan pendapatan dan profit dari cabang-cabang yang ada di Singapura dan Hongkong.

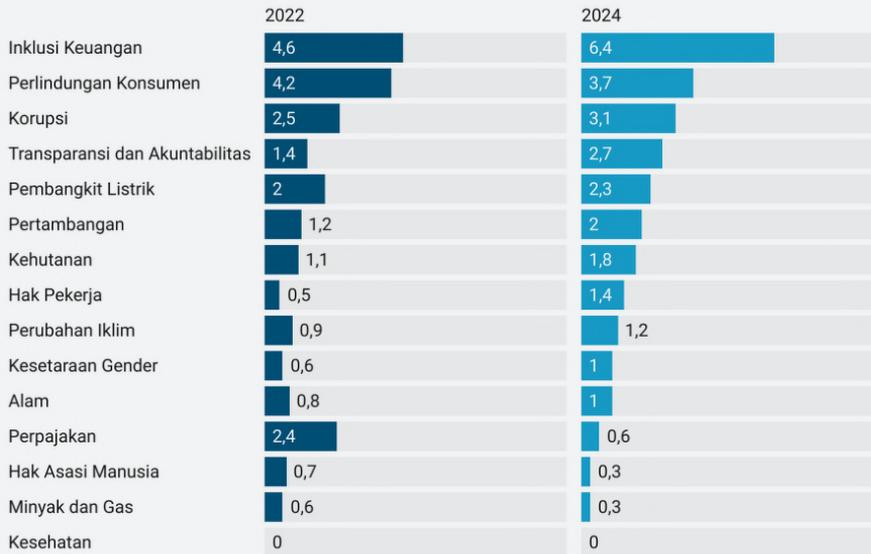
Pada tema transparansi dan akuntabilitas, BCA telah mengembangkan kebijakan finance and investment framework untuk sektor berisiko tinggi terkait aspek-aspek ESG. Bank ini mempublikasikan informasi tentang nama pemerintah dalam setiap investasinya, serta portofolio investasi berdasarkan wilayah, nilai, dan industri, serta laporan keberlanjutan yang mengacu pada standar GRI.



**Maybank**

Maybank Indonesia telah menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, meskipun komitmen pada beberapa tema masih cukup rendah. Maybank Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) melalui kebijakan dan inisiatif yang lebih baik. Maybank Indonesia berfokus pada pengembangan praktik bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan salah satunya ditunjukkan dengan perolehan skor tertinggi untuk tema inklusi keuangan sebesar 6,4.

Grafik 8. Skor Kebijakan Bank Maybank pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Maybank Indonesia mencatat perolehan nilai 1,2 pada tema perubahan iklim, 1 pada tema alam, dan 1,8 pada tema kehutanan, menunjukkan peningkatan skor di ketiga area tersebut. Pada tema perubahan iklim, skor meningkat dari 0,9 pada tahun 2022 menjadi 1,2 pada tahun 2024. Maybank Indonesia telah berkomitmen untuk tidak membiayai proyek batu bara termal dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), serta melindungi *High Conservation Value* (HCV) dan *High Carbon Stock* (HCS), termasuk lahan gambut.

Dalam tema alam, skor meningkat dari 0,8 pada tahun 2022 menjadi 1 pada tahun 2024. Peningkatan ini diperoleh berkat komitmen Maybank Indonesia untuk menetapkan daftar hitam terhadap aktivitas yang dapat merusak situs warisan dunia/UNESCO dan untuk tidak membiayai proyek penambangan di laut dalam. Namun, di elemen lainnya, bank ini tidak mendapatkan skor. Pada tema kehutanan, skor meningkat dari 1,1 pada tahun 2022 menjadi 1,8 pada tahun 2024. Maybank Indonesia memperoleh skor karena komitmennya untuk tidak memperdagangkan kayu secara ilegal dan menerapkan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC).

Pada aspek sosial, Maybank Indonesia mencatat skor 0,3 untuk tema hak asasi manusia (HAM), 1 untuk kesetaraan gender, dan 1,4 untuk hak pekerja. Namun,

bank ini memperoleh skor tinggi pada tema perlindungan konsumen 3,7 dan inklusi finansial 6,4. Sayangnya, Maybank Indonesia tidak mendapatkan skor pada tema kesehatan.

Di tema HAM, terjadi penurunan skor dari 0,7 pada tahun 2022 menjadi 0,3 pada tahun 2024. Maybank Indonesia hanya mendapatkan skor dasar untuk komitmennya terhadap FPIC. Namun, tidak ada komitmen yang ditemukan untuk mewajibkan perusahaan yang diinvestasikannya dan subkontraktor menghormati HAM, termasuk hak anak, hak disabilitas, dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka.

Pada tema kesetaraan gender, skor meningkat dari 0,6 pada tahun 2022 menjadi 1 pada tahun 2024. Peningkatan ini diperoleh dari komitmen bank untuk mencegah dan memitigasi diskriminasi gender terhadap konsumen. Namun, tidak ditemukan komitmen terkait pengembangan profesional bagi perempuan di level manajer senior, pengungkapan persentase partisipasi perempuan di posisi manajer dan direktur, serta tidak adanya kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan berbasis gender di tempat kerja. Di tema hak pekerja, skor meningkat dari 0,5 pada tahun 2022 menjadi 1,4 pada tahun 2024. Maybank Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap kebebasan berasosiasi, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, serta penghapusan diskriminasi. Meskipun ada peningkatan dalam kesetaraan gender dan hak pekerja, komitmen ini masih terbatas pada lingkup internal.

Pada aspek tata kelola, Maybank Indonesia menunjukkan peningkatan komitmen yang signifikan dalam tema transparansi dan akuntabilitas serta korupsi, meskipun mengalami penurunan pada tema perpajakan. Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor meningkat dari 1,4 pada tahun 2022 menjadi 2,7 pada tahun 2024. Maybank Indonesia telah mempublikasikan laporan keberlanjutan yang telah diverifikasi secara eksternal dan sesuai dengan standar GRI. Rincian portofolio keuangan berdasarkan wilayah, ukuran, dan industri juga telah diterbitkan. Namun, belum ada komitmen untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang aksesibel serta penjelasan rinci mengenai penyelesaian pengaduan.

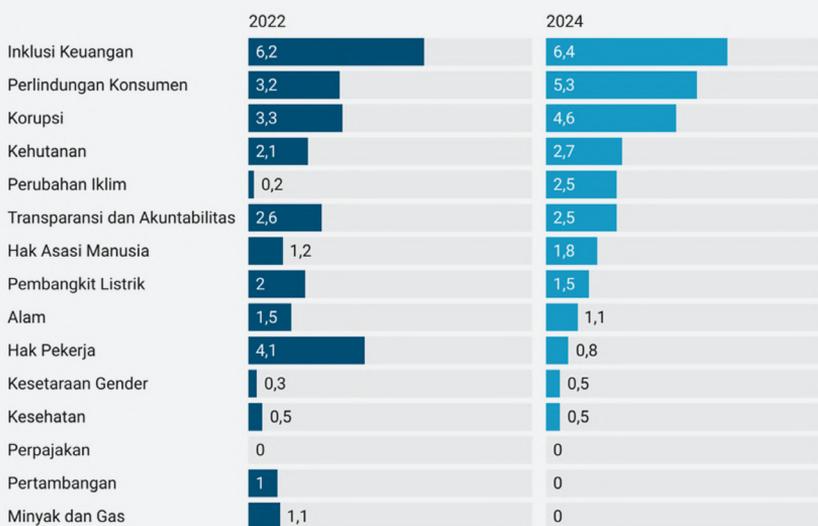
Pada tema korupsi, skor meningkat dari 2,5 pada tahun 2022 menjadi 3,1 pada tahun 2024. Maybank Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mencegah aktivitas terkait suap, pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kontribusi politik. Namun, komitmen ini hanya berlaku secara internal dan tidak ditemukan komitmen serupa pada aktivitas eksternal hingga ke rantai pasok.

Di tema perpajakan, terjadi penurunan skor dari 2,4 pada tahun 2022 menjadi 0,6 pada tahun 2024. Skor yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya komitmen dari Maybank Indonesia maupun Maybank Holding Group dalam mempublikasikan hasil pembayaran pajak berdasarkan negara cabangnya. Laporan keuangan Maybank Holding Group hanya mencakup Indonesia, Singapura, dan Malaysia, dan hanya melaporkan pendapatan operasi bersih serta laba sebelum pajak dan zakat secara geografis.



Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah berkomitmen untuk meningkatkan praktik keberlanjutan dalam operasional dan kebijakan pembiayaannya. Dalam era yang semakin menuntut tanggung jawab sosial dan lingkungan, BRI berupaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek bisnisnya. BRI mendapatkan skor tertinggi pada tema inklusi keuangan sebesar 6,4.

Grafik 9. Skor Kebijakan Bank BRI pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, BRI mengalami peningkatan skor pada tema perubahan iklim dan kehutanan. Nilai pada tema perubahan iklim meningkat dari 0,2 menjadi 2,5. Kenaikan ini dipicu oleh pengungkapan emisi yang dibiayai (financed emissions, scope 3), yang mencakup aktivitas pembiayaan dan investasi bank, kecuali portofolio pengelolaan aset. BRI menargetkan penurunan emisi scope 3 di sektor pembangkitan listrik, real estate, serta pulp dan kertas, sejalan dengan Science Based Targets initiative (SBTi).

Pada tema kehutanan, skor BRI meningkat dari 2,1 menjadi 2,7. Peningkatan ini diperoleh berkat kebijakan daftar negatif/exclusion list terhadap aktivitas bisnis penebangan liar. BRI juga memiliki kebijakan sektoral khusus untuk pulp dan kertas yang mewajibkan debitur di sektor tersebut untuk memastikan bahwa bahan baku kayu yang digunakan berasal dari sumber legal yang diakui oleh pemerintah, serta mewajibkan pelanggan di sektor ini memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Namun, BRI belum menyusun kebijakan sektoral untuk aktivitas atau proyek yang dibiayai, yang seharusnya mencakup kriteria, syarat, dan ketentuan dalam keputusan transaksi serta target keberlanjutan. Pendekatan BRI dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) masih terbatas pada daftar eksklusi atau negatif, konsisten dengan penilaian di tahun-tahun sebelumnya. BRI juga telah mulai membiayai proyek energi terbarukan, tetapi belum menetapkan target spesifik untuk sektor tersebut. Di sisi lain, tidak adanya batasan untuk pembiayaan di sektor batu bara atau ekstraktif lainnya menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut masih memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan finansial, yang dapat meningkatkan risiko stranded assets bagi bank dalam jangka panjang.

Pada aspek sosial, BRI telah memiliki komitmen yang kuat pada tema inklusi keuangan dan perlindungan konsumen, namun pada beberapa tema seperti kesetaraan gender, hak pekerja dan HAM masih cukup rendah. BRI unggul pada tema inklusi sosial dengan skor 6,4, berkat pemenuhan mandat dari OJK, seperti minimum 20% dari total pembiayaan yang disalurkan untuk UMKM, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU dan penyediaan layanan keuangan tanpa cabang sesuai dengan POJK No. 19/2014.

Pada tema perlindungan konsumen, skor BRI meningkat signifikan dari 3,2 menjadi 5,3, didorong oleh beberapa elemen, antara lain kebijakan dan prosedur penagihan utang secara bertanggung jawab, kebijakan penyelesaian utang bagi

konsumen yang terlilit utang, penyampaian informasi produk dan layanan secara transparan dan adil, pemantauan dan pelaporan layanan pengaduan konsumen.

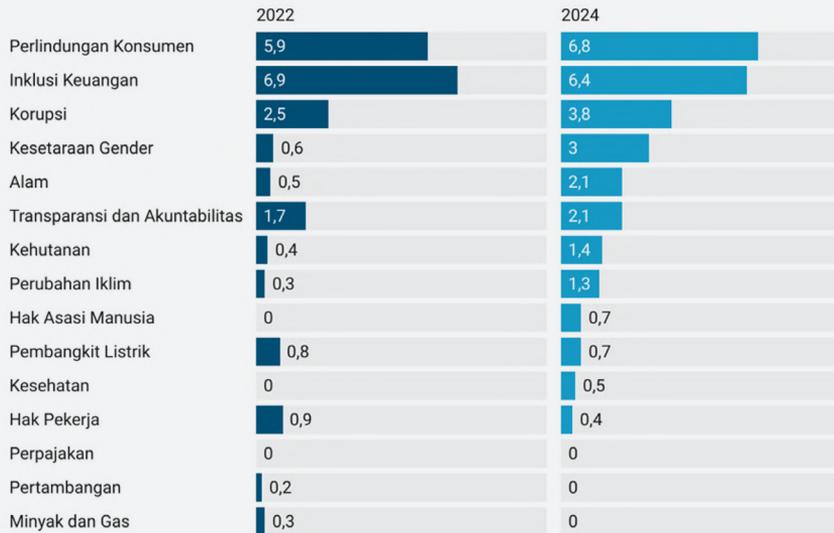
Sementara, pada tema kesetaraan gender, BRI memperoleh skor yang relatif rendah, yaitu 0,5. Hal ini disebabkan oleh kebijakan sosial (termasuk gender) yang masih sangat terbatas, tanpa adanya aturan spesifik yang dirancang secara khusus. Pada tema hak asasi manusia, skor BRI meningkat dari 1,2 menjadi 1,8. BRI berkomitmen untuk melindungi hak asasi manusia dalam operasional perusahaan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip UNGP Bisnis dan HAM. Hal ini mencakup penghormatan terhadap sepuluh bidang hak asasi manusia dalam kegiatan operasional dan bisnis, termasuk dalam tenaga kerja, mitra bisnis, dan rantai pasokan. BRI juga memiliki kebijakan anti-diskriminasi dalam semua aspek manajemen sumber daya manusia, termasuk rekrutmen, pengembangan karir, dan remunerasi. Namun, BRI belum memperluas kebijakannya untuk mencakup masyarakat adat dan kelompok rentan lainnya serta meningkatkan komitmen terhadap standar internasional.

Pada aspek tata kelola, BRI saat ini hanya mencakup kegiatan operasional bank dan belum meliputi semua aspek pembiayaan dan investasi, terutama terkait korupsi dan perpajakan. Skor BRI pada tema korupsi mencapai 4,6, sementara pada tema perpajakan tidak memperoleh skor. Meskipun risiko tata kelola adalah faktor material dengan eksposur tinggi, terutama di sektor agrikultur seperti kelapa sawit dan pulp serta kertas, kebijakan ini belum menjadi prioritas utama bank, yang masih fokus pada aspek lingkungan (L dalam LST). Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor BRI menurun menjadi 2,5.



Bank Mandiri menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa aspek keberlanjutan, dengan peningkatan skor di berbagai tema dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan komitmen Mandiri untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam setiap aspek operasional dan kebijakan pembiayaannya. Pada tahun 2024, Mandiri mendapatkan skor tertinggi untuk tema perlindungan konsumen sebesar 6,8.

Grafik 10. Skor Kebijakan Bank Mandiri pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Mandiri mencatat perolehan nilai pada tema perubahan iklim, alam, kehutanan, dan pembangkit listrik. Peningkatan signifikan dalam beberapa tema ini menunjukkan kemajuan yang berarti dibandingkan tahun 2022 untuk mengurangi emisi dan melindungi ekosistem. Namun, pada tema pertambangan serta minyak dan gas Mandiri tidak mendapat perolehan skor.

Pada tema perubahan iklim, skor meningkat secara dramatis dari 0,2 di tahun 2022 menjadi 1,3 di tahun 2024. Hal ini mencerminkan komitmen ambisius Bank Mandiri dalam mengurangi emisi gas rumah kaca. Bank Mandiri telah menghitung dan mengungkapkan emisi scope 1, 2, dan 3 kepada publik, serta menetapkan target penurunan emisi yang sejalan dengan sasaran global 1,5 derajat Celsius. Bank ini juga melakukan pengukuran emisi dengan target absolut untuk setiap aktivitas yang didanai dan diinvestasikan.

Pada tema alam, skor meningkat dari 1,6 di tahun 2022 menjadi 2,1 di tahun 2024. Bank Mandiri berkomitmen agar setiap perusahaan yang didanainya tidak terlibat dalam bisnis di wilayah *High Conservation Value* (HCV), mematuhi pedoman *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), serta menjaga warisan dunia yang diakui oleh UNESCO dan mematuhi Ramsar Convention on Wetlands.

Di tema kehutanan, Mandiri mencatat peningkatan skor dari 0,4 di tahun 2022

menjadi 1,4 di tahun 2024. Bank ini berkomitmen untuk memastikan bahwa perusahaan yang didanainya tidak terlibat dalam perdagangan ilegal dan mencegah dampak negatif terhadap area Stok Karbon Tinggi (HCS) yang dikelola dalam operasi bisnis mereka.

Pada aspek sosial, Mandiri memperoleh skor pada tema hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, hak buruh, dan kesehatan. Untuk tema perlindungan konsumen dan inklusi finansial, Bank Mandiri memperoleh skor cukup tinggi masing-masing 6,8 dan 6,4. Di tema HAM, Mandiri mengalami peningkatan skor dari 0,0 di tahun 2022 menjadi 0,7 di tahun 2024. Perolehan skor ini karena Mandiri telah menerapkan kebijakan zero-tolerance terhadap semua bentuk diskriminasi, baik berdasarkan ras maupun gender, terhadap stafnya. Peningkatan yang signifikan juga terjadi pada tema kesetaraan gender, dengan skor naik dari 0,6 di tahun 2022 menjadi 3,0 di tahun 2024.

Bank Mandiri juga telah menyediakan pelatihan khusus untuk mengatasi diskriminasi berbasis gender di lingkungan kerja dan memastikan remunerasi yang setara. Saat ini, 46% posisi di tingkat Dewan Direksi (BoD), eksekutif, dan manajemen senior diisi oleh perempuan. Meskipun demikian, Bank Mandiri belum memiliki kebijakan yang diterapkan untuk perusahaan-perusahaan di mana bank berinvestasi.

Di tema hak buruh, Mandiri mengalami penurunan skor dari 0,9 di tahun 2022 menjadi 0,4 di tahun 2024. Kebijakan yang ada saat ini hanya mencakup aspek keamanan dan kesehatan untuk perusahaan yang didanai, sementara belum ada kebijakan tambahan yang relevan untuk sektor ini.

Dalam aspek tata kelola, Mandiri mendapatkan skor untuk tema transparansi dan akuntabilitas, korupsi, sementara pada tema perpajakan tidak mendapatkan skor. Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor meningkat dari 1,7 di tahun 2022 menjadi 2,3 di tahun 2024. Hal ini salah satunya karena Mandiri telah mengembangkan kerangka keuangan dan investasi terkait isu lingkungan dan sosial, memastikan bahwa semua investasi memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam kebijakan. Selain itu, Mandiri mempublikasikan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan kerangka GRI dan diverifikasi secara eksternal. Mandiri juga mengungkapkan nama-nama manajer aset eksternal dan menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, lengkap dengan penjelasan yang jelas mengenai proses penanganan pengaduan.

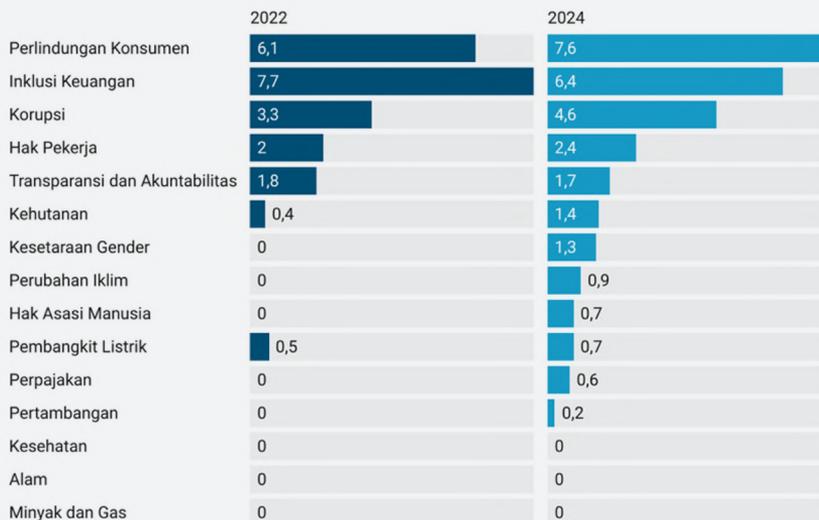
Skor pada tema korupsi juga mengalami peningkatan dari 2,3 di tahun 2022

menjadi 3,8 di tahun 2024. Bank Mandiri memiliki komitmen dan kebijakan yang jelas terkait penghindaran pencucian uang, korupsi, penyuapan, dan pendanaan terorisme. Namun, pada tema perpajakan, Mandiri tidak mencatatkan peningkatan skor, tetap di angka 0,0 baik di tahun 2022 maupun 2024. Dengan demikian, meskipun telah ada kemajuan yang patut diapresiasi, Mandiri masih menghadapi tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan penerapan praktik terbaik di seluruh aspek operasional.



BNI berkomitmen untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasional dan kebijakan pembiayaannya. Pada penilaian tahun 2024, BNI telah menunjukkan kemajuan yang positif, terutama dalam perlindungan konsumen yang ditunjukkan dengan perolehan skor 7,6.

Grafik 11. Skor Kebijakan Bank BNI pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, berdasarkan data dan informasi yang diungkapkan oleh BNI pada tahun 2023, memperoleh nilai 0,9 pada tema perubahan iklim dan 1,4 pada tema kehutanan. Beberapa tema di mana BNI tidak memperoleh nilai adalah tema alam serta minyak dan gas, sementara pada tema lainnya terkait lingkungan, BNI menunjukkan peningkatan skor.

Pada tema perubahan iklim, skor BNI meningkat menjadi 0,9. Meskipun masih tergolong rendah, komitmen BNI untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) patut diapresiasi, yang ditunjukkan melalui peta jalan menuju target *Net Zero Emission* (NZE) pada tahun 2028 untuk kegiatan operasional dan 2060 untuk kegiatan pembiayaan. BNI telah mengidentifikasi tiga cakupan emisi GRK yang dihasilkan dari portofolio kreditnya, termasuk sektor-sektor dengan pembiayaan tinggi emisi.

Pada tema kehutanan, BNI mencatat peningkatan skor dari 0,4 menjadi 1,4. Peningkatan ini diperoleh berkat kebijakan BNI dalam memastikan bahwa perusahaan di industri kehutanan memiliki rantai pasok yang bebas dari kayu ilegal serta mewajibkan sertifikasi seperti *Forest Stewardship Council* (FSC), ISO 14001, dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). BNI juga telah berinisiatif untuk memetakan risiko lingkungan debitur sesuai dengan Taksonomi Hijau Indonesia (THI).

Dalam aspek sosial, BNI mengalami peningkatan skor dalam beberapa tema sosial, termasuk hak asasi manusia (HAM), kesetaraan gender, dan hak buruh, dengan skor masing-masing 0,7; 1,3; dan 2,4. Di sisi lain, tema perlindungan konsumen dan inklusi keuangan mendapat skor tinggi, masing-masing sebesar 7,6 dan 6,4, meskipun pada tema inklusi keuangan terdapat penurunan skor. Namun, BNI belum memperoleh skor pada tema kesehatan, yang perlu ditangani.

Pada tema hak asasi manusia, skor BNI meningkat menjadi 0,7 setelah sebelumnya tidak memperoleh skor. Peningkatan ini berkat komitmen dan kebijakan internal BNI dalam menerapkan prinsip kesetaraan dan menentang diskriminasi dalam proses perekrutan hingga karyawan keluar dari bank. BNI juga berkomitmen untuk memberikan perlakuan adil kepada penyandang disabilitas dan memastikan rantai pasok yang adil. Namun, komitmen ini masih terbatas pada lingkup internal bank. Dalam perlindungan hak pekerja, kebijakan ketenagakerjaan BNI mencakup unsur HAM yang sesuai dengan Deklarasi ILO, UN Global Compact, dan UU Ketenagakerjaan. BNI menyediakan sistem dan saluran bagi karyawan untuk menyampaikan keluhan yang dapat mempengaruhi

keamanan dan kenyamanan kerja. BNI juga mengatur agar perusahaan yang didanai tidak terlibat dalam penggunaan pekerja paksa dan pekerja anak.

Pada tema kesetaraan gender, skor BNI meningkat menjadi 1,3, setelah sebelumnya tidak memperoleh skor. Peningkatan ini diperoleh dari kebijakan yang memastikan partisipasi dan akses yang setara bagi perempuan untuk menduduki posisi di dewan direksi dan manajemen senior, dengan target minimal 30 persen. Sebagai contoh, pada tahun 2023, persentase perempuan di level manajer ke atas mencapai 30,9%. BNI juga menerapkan kebijakan *Accelerated Career Track* untuk mendorong kemajuan karier perempuan dan meningkatkan representasi kepemimpinan.

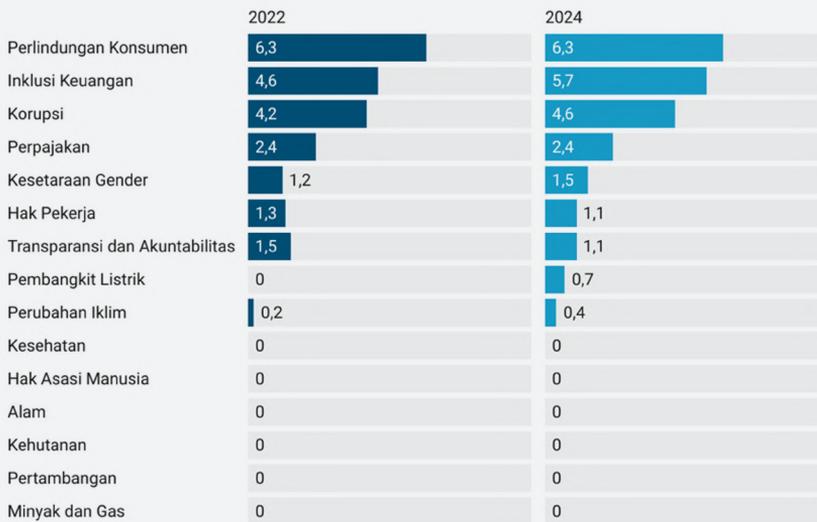
Skor pada tema perlindungan konsumen mencapai 7,6, meningkat 1,6 poin. Kenaikan ini disebabkan oleh pengungkapan informasi yang lebih detail, termasuk data tentang jenis dan jumlah keluhan konsumen. BNI juga memastikan bahwa karyawan menerapkan prinsip adil dan non-diskriminasi kepada setiap nasabah melalui kebijakan dan peningkatan kapasitas karyawan secara berkala.

Pada aspek tata kelola, BNI mengalami peningkatan skor pada tema perpajakan dan korupsi. Namun, pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor BNI sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tema perpajakan, skor BNI meningkat menjadi 0,6 setelah sebelumnya tidak memperoleh skor. Peningkatan ini berkat pengungkapan informasi kinerja keuangan berdasarkan segmen geografis untuk tahun 2022-2023, termasuk informasi tentang pendapatan dan beban pajak.

Dalam hal korupsi, peningkatan skor disebabkan oleh pengungkapan informasi terkait kebijakan BNI untuk tidak memberikan kontribusi politik. BNI menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam urusan politik dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan semua karyawan BNI tidak terlibat dalam partai politik mana pun. Meskipun pada tema transparansi dan akuntabilitas skor BNI sedikit menurun dari 1,8 pada tahun 2022 menjadi 1,7 pada tahun ini, pengungkapan terkait sistem *whistleblowing* belum cukup untuk meningkatkan penilaian mengenai saluran dan mekanisme penanganan keluhan bagi masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pembiayaan bank.

Bank Permata bank telah menunjukkan upaya untuk meningkatkan kinerja di sejumlah tema, seperti perubahan iklim dan kesetaraan gender, serta komitmen terhadap perlindungan konsumen dan inklusi finansial. Pada tahun 2024, Bank Permata mendapatkan skor tertinggi untuk tema perlindungan konsumen sebesar 6,3.

Grafik 12. Skor Kebijakan Bank Permata pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Bank Permata meraih skor pada tema perubahan iklim dan pembangkit listrik, dan tidak mendapatkan skor pada tema alam, kehutanan, pertambangan, serta minyak dan gas. Pada tema perubahan iklim, Bank Permata mengalami peningkatan skor dari 0,2 di tahun 2022 menjadi 0,4 di tahun 2024. Meskipun demikian, skor ini masih sangat dasar, yang mencerminkan pengungkapan emisi gas rumah kaca (GRK) dan belum mengaitkan pengungkapan ini secara spesifik dengan portofolio keuangan dan investasinya.

Di tema pembangkit listrik, Bank Permata tidak mendapat skor pada tahun 2022, namun berhasil memperoleh skor 0,7 di tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh pembiayaan untuk energi terbarukan yang mencapai Rp3.8 triliun pada tahun 2023. Namun, pada elemen lain terkait tema ini, Bank Permata masih belum mendapatkan skor.

Dalam aspek sosial, Bank Permata meraih skor pada tema kesetaraan gender, hak pekerja, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan tetapi tidak mendapatkan skor pada tema Hak Asasi Manusia (HAM). Pada tema kesetaraan gender, skor meningkat dari 1,2 di tahun 2022 menjadi 1,5 di tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan komitmen bank terhadap kebijakan zero tolerance terhadap diskriminasi berbasis gender. Saat ini, perempuan mendominasi posisi eksekutif dan manajerial, dengan persentase masing-masing sebesar 43,8% dan 49%. Namun, di level direktur, persentase perempuan hanya mencapai 25%. Sayangnya, komitmen ini masih terbatas pada internal bank dan belum mencakup perusahaan yang dibiayai atau rantai pasoknya.

Pada tema hak pekerja, skor Bank Permata turun dari 1,3 di tahun 2022 menjadi 1,1 di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh dua elemen penilaian baru, yaitu adopsi ILO Maternity Protection Convention dan penyediaan kondisi kerja yang layak bagi perusahaan yang dibiayai. Bank Permata tidak mendapatkan skor untuk kedua elemen baru ini, meskipun skor tahun 2022 tetap sama.

Pada tema perlindungan konsumen, Bank Permata mendapatkan skor yang sama dengan skor asesmen di tahun 2022 yakni sebesar 6,3 karena tidak ada perubahan kebijakan. Di tema inklusi finansial, Bank Permata mencatat peningkatan skor dari 4,6 di tahun 2022 menjadi 5,7 di tahun 2024. Peningkatan ini berkat komitmen bank dalam mempermudah konsumen membuka rekening bank dasar tanpa syarat nominal tertentu. Selain itu, Bank Permata juga memiliki program peningkatan akses layanan keuangan khusus untuk pengusaha perempuan, yang turut mendorong perolehan skor di tema ini.

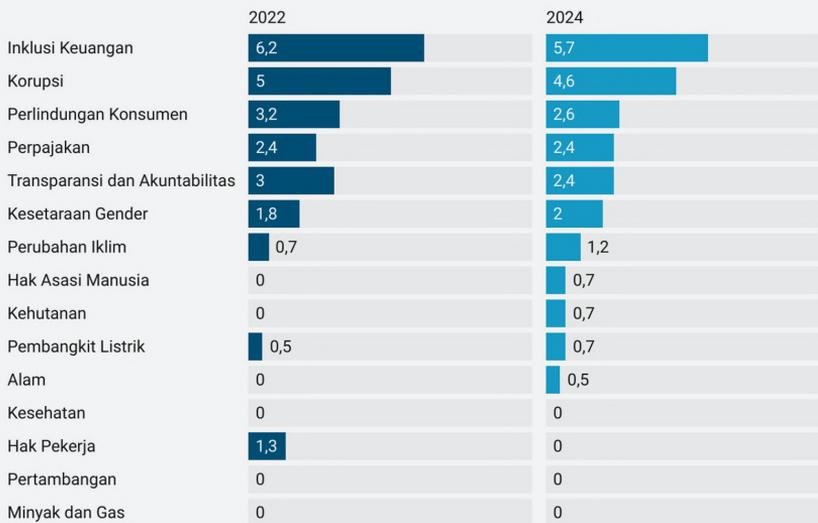
Dalam aspek tata kelola, Bank Permata memperoleh skor pada tema korupsi, tema perpajakan, serta tema transparansi dan akuntabilitas. Pada tema korupsi, Bank Permata mengalami peningkatan skor dari 4,2 di tahun 2022 menjadi 4,6 di tahun 2024. Bank ini telah menyatakan komitmennya untuk melarang tindakan terkait suap, pencucian uang, pendanaan aktivitas terorisme, serta kontribusi politik lainnya. Namun, kebijakan ini masih terbatas pada internal bank dan belum diperluas ke perusahaan yang dibiayai atau rantai pasoknya.

Di tema transparansi dan akuntabilitas, skor Bank Permata turun dari 1,5 di tahun 2022 menjadi 1,1 di tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena kurangnya komitmen bank dalam mempublikasikan portofolio pembiayaan secara detail berdasarkan klasifikasi NACE dan ISIC, serta tidak adanya publikasi mengenai rekam jejak voting terkait perusahaan yang dibiayai.



Bank Danamon untuk tahun 2024 mengalami penurunan skor pada sejumlah tema. Hal ini dapat memberikan gambaran mengenai pencapaian dan perbaikan yang perlu diperhatikan oleh Bank Danamon dalam upayanya menuju praktik keberlanjutan yang lebih baik.

Grafik 13. Skor Kebijakan Bank Danamon pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, Danamon mencatat perolehan nilai pada tema perubahan iklim, alam, dan tema kehutanan. Meskipun ada peningkatan skor di ketiga tema ini, perubahan yang terjadi belum terlalu signifikan. Pada tema perubahan iklim, skor meningkat dari 0,4 di tahun 2022 menjadi 1,2 di tahun 2024. Bank Danamon telah mengungkapkan emisi gas rumah kaca (GRK) pada cakupan 1, 2, dan 3, yang terkait dengan portofolio keuangan dan investasinya. Selain itu, bank ini menerapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan yang didanainya untuk memiliki sistem keterlacakan rantai pasokan guna memastikan nol deforestasi, termasuk kepatuhan terhadap standar RSPO dan ISPO serta larangan pertanian di lahan gambut.

Pada tema alam, skor meningkat dari 0,0 di tahun 2022 menjadi 0,5 di tahun 2024. Bank Danamon memiliki kebijakan yang mendorong perusahaan untuk tidak beroperasi di wilayah *High Conservation Value* (HCV). Namun, saat ini,

hanya terdapat satu kebijakan yang diadopsi di tema ini.

Di tema kehutanan, terjadi peningkatan skor dari 0,0 di tahun 2022 menjadi 0,7 di tahun 2024. Peningkatan ini diperoleh berkat kebijakan Bank Danamon yang melarang perusahaan dan rantai pasoknya terlibat dalam perdagangan kayu ilegal. Sementara pada tema pertambangan serta minyak dan gas, belum ditemukan kebijakan terkait sehingga tidak memperoleh skor.

Dalam aspek sosial, Danamon mendapatkan skor pada tema Hak Asasi Manusia (HAM), kesetaraan gender, dan tidak memperoleh skor pada tema hak pekerja dan kesehatan. Untuk tema perlindungan konsumen dan inklusi finansial, bank ini memperoleh skor 2,6 dan 5,7 skor untuk kedua tema ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tema HAM, terjadi peningkatan skor dari 0,0 di tahun 2022 menjadi 0,7 di tahun 2024. Danamon menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap diskriminasi berdasarkan gender, ras, dan disabilitas secara internal. Di tema kesetaraan gender, skor meningkat dari 1,8 di tahun 2022 menjadi 2,0 di tahun 2024. Danamon memiliki kebijakan zero tolerance terhadap diskriminasi gender dalam semua bentuk, memberikan pelatihan di tempat kerja untuk menangani kekerasan berbasis gender, serta memastikan adanya remunerasi yang setara. Namun, pada tema hak pekerja, terjadi penurunan skor dari 1,3 di tahun 2022 menjadi 0,0 di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh tidak adanya publikasi kebijakan yang secara spesifik mengatur hak-hak pekerja.

Dalam aspek tata kelola, Danamon memperoleh skor pada tema transparansi dan akuntabilitas, korupsi, dan perpajakan. Pada tema transparansi dan akuntabilitas, skor mengalami penurunan dari 3,0 di tahun 2022 menjadi 2,6 di tahun 2024. Meskipun Bank Danamon telah memiliki kerangka keuangan dan investasi terkait isu lingkungan dan sosial, serta mempublikasikan laporan keberlanjutan yang diverifikasi secara eksternal sesuai standar GRI, penurunan skor ini mencerminkan kurangnya detail dalam pengungkapan portofolio pembiayaan dan mekanisme pengaduan.

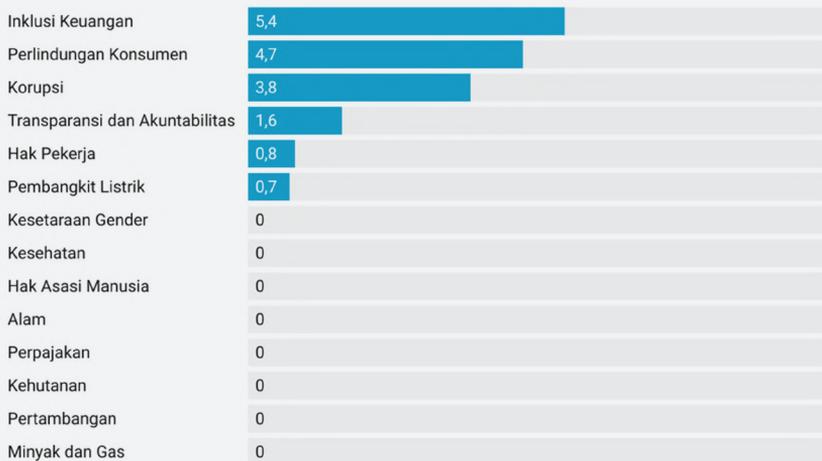
Skor pada tema korupsi tetap stabil di angka 4,6 baik pada tahun 2022 maupun 2024. Kebijakan yang diterapkan mencakup mekanisme pencegahan pencucian uang, pelaporan proses pembuatan kebijakan, dan verifikasi terhadap *ultimate beneficial owners*. Di tema perpajakan, Bank Danamon juga mempertahankan skor 2,4 dari tahun 2022 hingga 2024. Kebijakan yang ada tetap sama, termasuk laporan pendapatan, laba, dan pembayaran pajak yang sesuai dengan regulasi

di negara tempat bank beroperasi. Bank ini tidak memiliki anak perusahaan atau asosiasi di wilayah hukum yang tidak dikenakan pajak, untuk menghindari masalah terkait penghindaran pajak.



Tahun ini menandai tahun pertama penilaian Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan metodologi FFGI. Nilai yang diperoleh akan menjadi baseline untuk penilaian di tahun-tahun berikutnya. BSI mendapatkan perolehan skor tertinggi pada tema inklusi keuangan sebesar 5,4.

Grafik 14. Skor Kebijakan Bank BSI pada Aspek LST tahun 2024



Sumber: olahan penelitian

Pada aspek lingkungan, BSI mencatat nilai 0,7 pada tema pembangkit listrik (power generation). Namun, nilai ini hanya mencakup kebijakan internal bank, karena kebijakan tersebut belum diterapkan pada aktivitas pembiayaan dan investasi. Pada tema pembangkit listrik, peningkatan nilai terjadi berkat

pembiayaan proyek energi terbarukan. Meskipun demikian, BSI belum memiliki kebijakan yang melarang pembiayaan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, nuklir, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berskala besar. BSI juga menetapkan batasan pembiayaan bagi perusahaan yang terafiliasi dengan atau memperoleh mayoritas pendapatan dari kegiatan PLTU batu bara, dengan ambang batas tertentu.

Saat ini, BSI belum memiliki dokumen kebijakan sektoral yang memuat batasan, larangan, kriteria, dan prosedur untuk memenuhi prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST). Kebijakan LST yang ada berupa exclusion/negative list yang menjelaskan aktivitas yang dilarang untuk dibiayai. Exclusion list ini bersifat prinsip-prinsip dasar, mencakup larangan terhadap aktivitas yang melanggar prinsip atau kaidah syariah serta aktivitas tanpa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan program PROPER, ISPO/RSPO.

Dalam aspek sosial, BSI memperoleh nilai 4,7 pada perlindungan konsumen, 5,4 pada inklusi keuangan dan 0,8 pada hak pekerja. Tidak adanya nilai pada tema lainnya disebabkan oleh kurangnya informasi yang relevan, baik dalam Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan, situs web bank, maupun publikasi lainnya di tahun 2023.

BSI meraih nilai tertinggi pada tema inklusi keuangan, yang didorong oleh mandat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meningkatkan inklusi keuangan. Mandat tersebut mencakup Persentase Pembiayaan untuk UMKM di mana Bank diwajibkan menyalurkan sekurang-kurangnya 20% dari pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/35/DPAU. Serta memberlakukan Layanan Laku Pandai yakni Layanan keuangan tanpa cabang sesuai dengan POJK No. 19/2014. BSI juga memperoleh skor tinggi kedua pada tema perlindungan konsumen, didorong oleh kebijakan terkait transparansi produk dan jasa serta perlakuan adil dan anti-diskriminasi terhadap nasabah. Selain itu, prosedur pengaduan dan perlindungan data nasabah turut berkontribusi pada perolehan skor ini.

Dalam aspek tata kelola, BSI mencatat nilai 3,8 pada tema korupsi dan 1,6 pada tema transparansi dan akuntabilitas. Pada tema korupsi, BSI memperoleh nilai atas kebijakan yang mencerminkan kebijakan internal bank, tetapi belum diterapkan pada aktivitas pembiayaan dan investasi. BSI telah memiliki kebijakan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), sumbangan politik, dan verifikasi *ultimate beneficial owner*. Namun, kebijakan-

kebijakan ini belum berlaku bagi klien yang dibiayai oleh BSI atau di mana BSI berinvestasi. Mandat OJK terkait hal ini meliputi POJK Nomor 8 Tahun 2023 mengenai Penerapan Program APU-PPT dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, serta Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan.

Perolehan skor pada tema transparansi dan akuntabilitas juga didorong oleh mandat OJK yang mengatur standar pengungkapan melalui POJK No. 37/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, serta POJK No. 51/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Meskipun demikian, BSI dapat meningkatkan nilai pada tema ini dengan mengadopsi praktik terbaik, bukan hanya memenuhi ketentuan regulasi. Hal ini termasuk pengungkapan mengenai nama-nama perusahaan tempat BSI berinvestasi dan yang telah diberikan kredit, sesuai dengan Prinsip Equator 4. Dengan penilaian ini, BSI dapat meningkatkan kinerja keberlanjutan dan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

A hand is shown holding a realistic globe of the Earth. The globe is tilted, showing the Americas and parts of Europe and Africa. Surrounding the globe are numerous small, stylized green trees with rounded canopies and thin trunks, appearing to float in the air. The background is a dark, deep blue color.

## Bagian 4

# KOMITMEN DAN KEBIJAKAN BANK PADA ASPEK LINGKUNGAN UNTUK MENDUKUNG TARGET IKLIM NASIONAL

---

Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan tahun 2030. Sementara rata-rata alokasi anggaran dalam APBN dalam kurun 2020-2022 sekitar Rp37,9 triliun (sumber: Climate Budget Tagging pada Business Intelligence DJA-Tematik Krisna), sehingga masih terdapat selisih (gap) pendanaan.

## 4.1 Overview Kebijakan Bank pada Aspek Lingkungan



Perjanjian Paris tahun 2015 masih menjadi acuan seluruh negara untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Pemerintah Indonesia menurunkan hasil konferensi ini dalam dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) dan peta jalan mencapai *Net Zero Emission* (NZE). Pada Konferensi G20 di Bali, Indonesia meningkatkan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 31,89% dengan upaya sendiri pada tahun 2030. Peningkatan target tersebut didasarkan pada kebijakan percepatan penggunaan kendaraan listrik, kebijakan B40, kebijakan *forest and other land uses* (FOLU) net-sink 2030, serta peningkatan sektor pertanian dan industri (KLHK, 2022).

Komitmen pemerintah untuk mencapai target iklim nasional juga tertuang pada Rencana Pemerintah Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta panduan untuk lembaga keuangan pada naskah taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diterbitkan oleh OJK. Secara berkala, OJK memperbarui TKBI berdasarkan sektor prioritas NDC dan sejalan dengan RPJPN Indonesia. Komitmen ini menunjukkan arah transisi hijau di Indonesia akan terjadi pada berbagai sektor.

Menteri Keuangan menyatakan bahwa untuk mencapai target NDC 2030 saja, negara akan membutuhkan setidaknya 4,52 kuadriliun rupiah (\$310 miliar). Menurut World Bank (2022) alokasi anggaran penanganan perubahan iklim dalam APBN masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan untuk mencapai target *Nationally Determined Contribution* (NDC). Indonesia membutuhkan pendanaan rata-rata dalam setahun sebesar Rp266,3 triliun sampai dengan tahun 2030. Sementara rata-rata alokasi anggaran dalam APBN dalam kurun 2020-2022 sekitar Rp37,9 triliun (sumber: Climate Budget Tagging pada Business Intelligence DJA-Tematik Krisna), sehingga masih terdapat selisih (gap) pendanaan. Pada asesmen ini, Bank di Indonesia telah meningkatkan kebijakan untuk mendukung aspek lingkungan dalam mencapai target NDC.

Grafik 15. Skor Rata-rata Kebijakan Bank pada Aspek Lingkungan



Sumber: Olahan Peneliti

Grafik di atas menunjukkan peningkatan kebijakan beberapa Bank di Indonesia pada aspek lingkungan. Tema Kehutanan memperoleh peningkatan skor dari 1,1 pada tahun 2022 menjadi 2 pada tahun 2024. Peningkatan skor ini dapat menjadi potensi pembiayaan berbasis lingkungan pada sektor kehutanan. Dokumen FOLU Net Sink 2030 memperkirakan kebutuhan dana sebesar USD16,5 miliar. Adapun perkiraan alokasi tanggung jawab pendanaan, sebesar 45 persen dari total pembiayaan yang dibutuhkan akan disediakan oleh pemerintah, dan 55 persen diharapkan ditanggung oleh pihak swasta (KLHK, 2021).

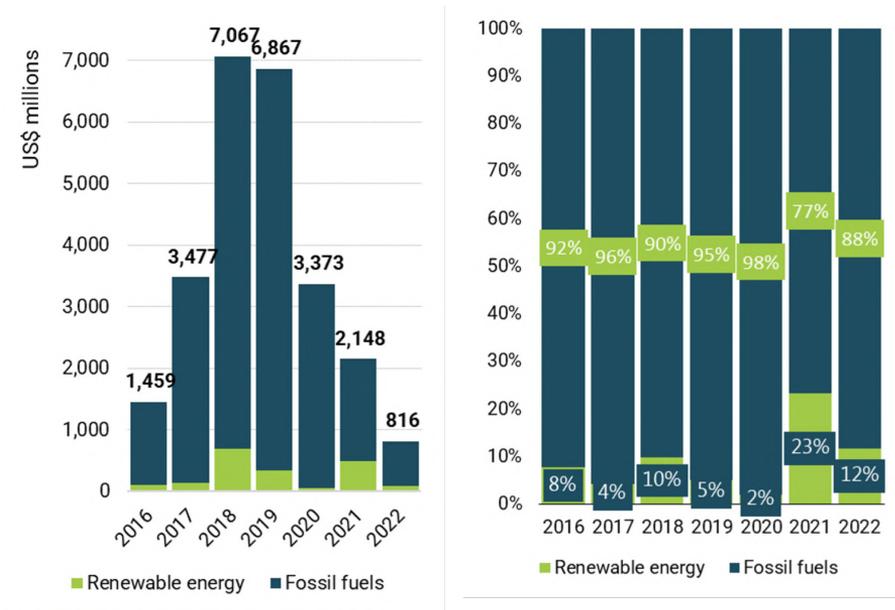
Target FOLU net sink 2030 tidak hanya ditopang oleh kebijakan pada tema kehutanan, tetapi juga tema alam. Asesmen kebijakan bank tahun 2024 menunjukkan peningkatan pada tema ini hanya 0,2 dari tahun 2022 menjadi 1,2 pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan komitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati belum tinggi pada ranah perbankan. Padahal, target FOLU net sink 2030 juga berbicara tentang menjaga dan memulihkan keanekaragaman hayati.

Pada tema kebijakan perubahan iklim juga masih dalam kategori kurang, meskipun telah ada peningkatan skor dari 0,9 tahun 2022 menjadi 1,5 tahun 2024. Tema ini tidak hanya berkaitan dengan tema alam kehutanan dan alam, tetapi juga terkait sektor energi. Tema pembangkit listrik masih mendapat skor rendah dan tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tema lain terkait energi, yaitu tema pertambangan memperoleh skor sangat rendah dan turun dibandingkan tahun 2022. Selain itu, tema minyak dan gas juga mengalami penurunan rata-rata skor dari 0,9 pada tahun 2022 menjadi 0,4 pada tahun 2024.

Rendahnya komitmen pada tema terkait sektor energi berkorelasi dengan pemberian kredit pada pembangkit listrik batu bara. *Just Energy Transition Partnership (JETP)* dalam dokumen Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) 2022 menunjukan bahwa antara tahun 2018 hingga 2022, pengeluaran modal sektor energi rata-rata sekitar USD 10 miliar atau Rp 154 triliun (kurs Rp 15.400) setiap tahun (Badan Energi Internasional, 2023). Sebagian besar pengeluaran modal ini diarahkan ke pembangunan pembangkit listrik batu bara dan gas serta jaringan listrik. Energi terbarukan hanya menyumbang sekitar satu per lima dari pengeluaran modal. Jika dilihat berdasarkan keterlibatan bank, proporsi

pembiayaan perbankan nasional pada sektor energi fosil masih sangat tinggi dibandingkan energi terbarukan (PRAKARSA, 2022).

Grafik 16. Total pinjaman dan penerbitan saham dan obligasi terhadap perusahaan fosil dan energi terbarukan (2016-2022)



Sumber: The PRAKARSA, 2022

Proporsi pembiayaan perbankan dalam sektor energi terbarukan menunjukkan peningkatan dalam dua tahun terakhir, ketika kebijakan mulai terarah pada pembangunan berkelanjutan. Ada kenaikan yang cukup drastis antara proporsi pembiayaan energi terbarukan pada tahun 2020 dan 2021 dan walaupun turun pada tahun 2022, masih cukup besar dibandingkan tahun 2016-2019 (Grafik 16). Namun demikian, proporsi ini masih rendah dibandingkan kebutuhan pembiayaan. Padahal, proyeksi kebutuhan investasi untuk transisi energi terus meningkat mengingat pertumbuhan penduduk yang berdampak pada kebutuhan pasokan listrik dan kendaraan. JETP memperkirakan pada tahun 2030, investasi yang dibutuhkan akan mencapai lebih dari USD 15 miliar atau Rp 231 triliun (kurs Rp 15.400). Kemudian lebih dari USD 25 miliar atau Rp 385 triliun selama dekade 2031-2040, dan hampir USD 30 miliar atau 462 triliun selama 2041-2050. Apabila skenario pembiayaan dari JETP digunakan secara menyeluruh, masih terdapat kekurangan hingga USD 110 miliar atau Rp 1.694 triliun untuk investasi secara kumulatif pada sektor energi di tahun 2030. Gap pembiayaan ini hanya dapat dipenuhi oleh perbankan.

Dalam upaya mendukung pembangunan yang berkelanjutan, bank-bank di Indonesia, seperti BNI dan Mandiri, telah mulai menyalurkan Sustainability Linked Loan (SLL). SSL adalah skema penyaluran kredit yang memberikan insentif kepada debitur atas capaian

Inisiatif Keberlanjutan (ESG) perusahaan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendukung proyek dan kegiatan yang ramah lingkungan, serta mendorong transisi menuju ekonomi rendah karbon. Namun, meskipun langkah ini menunjukkan komitmen mereka terhadap keberlanjutan, masih terdapat tantangan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit tersebut benar-benar dapat berkontribusi pada pembangunan rendah karbon.

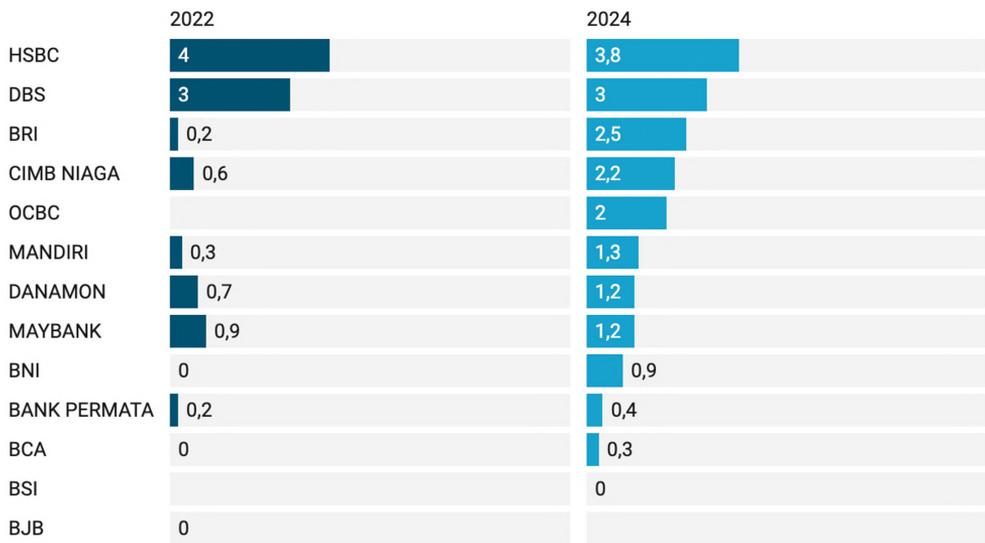
## 4.2 Penilaian pada Tema Perubahan Iklim



Tema perubahan iklim mencakup kebijakan bank dalam mendukung target mitigasi perubahan iklim. Pada asesmen kebijakan ini, seluruh bank mendapatkan skor, kecuali BSI. BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia belum terlihat memiliki komitmen dalam pembiayaan mitigasi perubahan iklim. Padahal, studi Greenpeace menemukan bahwa industri keuangan islam sedang tumbuh pesat dan hanya mengalokasikan 5% dari total aset industri keuangan islam dapat memberikan investasi senilai USD4,5 triliun. Potensi BSI sebagai bank dengan aset terbesar dalam industri keuangan islam seharusnya dapat mengarahkan kebijakan pembiayaan sejalan dengan target iklim nasional.

Bank BUMN seperti BNI, Mandiri, BRI, dan permata memperoleh peningkatan skor karena telah mengungkapkan emisi hingga scope 3. Capaian ini sudah sejalan dengan panduan OJK yang baru dirilis awal tahun 2024, yaitu Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) yang mengarahkan perbankan untuk mengungkap emisi scope 3 dan mitigasi risiko iklim dan bencana alam. Bank lain yang telah mengungkapkan emisi scope 3 nya pada aspek pembiayaan yang memiliki proporsi investasi dominan pada sektor tinggi emisi, yaitu bank CIMB, Danamon, DBS, dan HSBC. Dalam konteks ini, HSBC sudah memiliki kebijakan untuk tidak memberikan pembiayaan baru pada perusahaan yang penghasilannya lebih dari 10% berasal dari termal batu bara.

Grafik 17. Skor Bank pada Tema Perubahan Iklim



Sumber: Olahan Peneliti

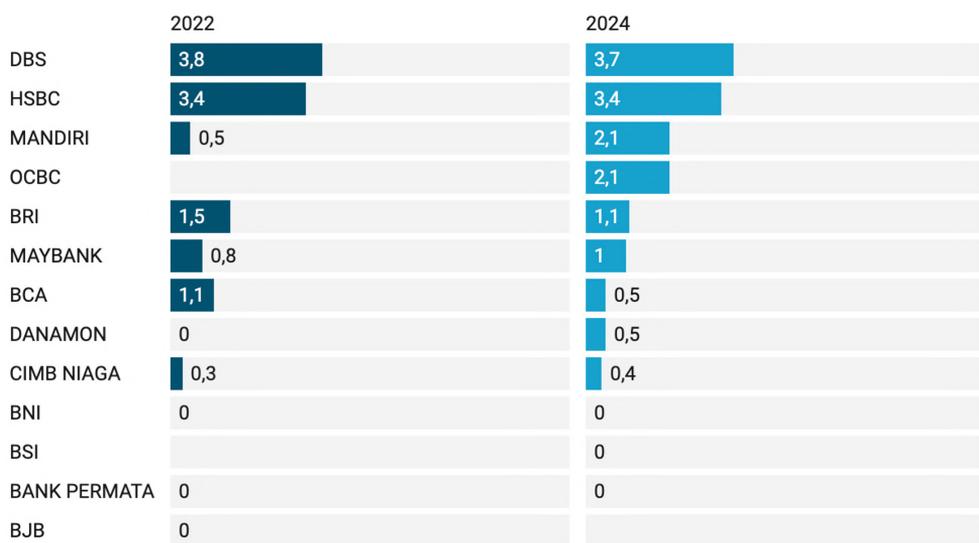
Skor bank HSBC sedikit turun karena adanya perubahan indikator dalam skoring. Terdapat indikator pada operasional internal perbankan terkait untuk hanya menggunakan energi terbarukan. Bank DBS tidak ada peningkatan skor, tetapi ada kebaruan kebijakan untuk tidak membiayai batu bara termal dan pembangkit batu bara. Peningkatan skor paling signifikan terjadi pada bank BRI yang naik dari 0,2 pada tahun 2022 menjadi 2,5 pada tahun 2024. Peningkatan Skor pada bank BRI mencakup pada area penilaian dampak lingkungan yang mencakup data emisi gas rumah kaca, menetapkan tujuan yang terukur dan selaras dengan pembatasan kenaikan suhu global maksimum hingga 1,5°C. BRI juga telah mempublikasikan laporan TCFD pada tahun 2023 serta memiliki kebijakan anti deforestasi dalam rantai pasok perusahaan sektor kehutanan yang mengacu pada SVLK, HCV, dan HCS.

### 4.3 Penilaian pada Tema Alam



Dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan, lembaga keuangan di Indonesia, seperti bank, semakin menekankan pentingnya penilaian dampak lingkungan dalam portofolio mereka. Penilaian ini mencakup berbagai elemen yang bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan memastikan operasi bisnis tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Pada tema alam, terdapat 15 elemen kebijakan yang dilihat di masing-masing bank yang dinilai. Secara keseluruhan, skor rata-rata hanya mengalami kenaikan yang kecil yakni dari 1,0 di tahun 2022 menjadi 1,2 di tahun 2024.

Grafik 18. Skor Bank pada Tema Alam



Sumber: Olahan Peneliti

Hasilnya, pada tema alam di tahun 2024 skor paling tinggi ditempati oleh DBS dengan perolehan 3,7 dan sedikit menurun di banding tahun sebelumnya. Perolehan skor pada beberapa tema diperoleh secara otomatis karena DBS telah menerapkan Equator principles dan juga Standar Kinerja IFC pada aktivitas pembiayaan proyeknya. Selain itu, DBS juga telah menyatakan bahwa sejalan dengan kebijakan risiko kredit Bank, DBS tidak akan dengan sengaja membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penebangan hutan yang memiliki Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV) serta penebangan ilegal.

Bank Mandiri, Maybank, Danamon dan CIMB Niaga juga mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan. Dalam laporan tahunan 2023, Bank Mandiri telah menyatakan bahwa dalam mengelola risiko LST di sektor pertanian, khususnya perkebunan Sawit & CPO, Bank Mandiri memerlukan kepatuhan ISPO dan/atau RSPO atau setidaknya bukti pendaftaran ISPO dan/atau RSPO dari lembaga sertifikasi yang relevan. Bank Mandiri juga memperhatikan kebijakan lingkungan dan ketenagakerjaan debitur (termasuk Kesehatan dan Keselamatan Kerja/OHS), prosedur pencegahan dan penanganan kebakaran lahan sesuai standar yang berlaku, serta kebijakan Tanpa Penebangan Hutan, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (NDPE) termasuk kebijakan terkait pembersihan lahan, pelestarian area Nilai Konservasi Tinggi (HCV), dan Pabrik Pengolahan Limbah (IPL). Pembiayaan tidak akan diberikan kepada perusahaan baru yang akan membuka lahan baru. Selain itu, Mandiri juga telah memiliki kebijakan yang mengintegrasikan aspek ESG secara bertahap dalam kebijakan kredit Bank dengan mewajibkan pemenuhan kriteria minimum seperti penyaringan positif dan negatif terhadap aktivitas bisnis calon debitur.

Maybank mendapatkan skor antara lain karena telah mengungkapkan portofolionya yang diklasifikasikan berdasarkan wilayah, ukuran, dan industri. Maybank juga menuliskan bahwa mereka membuat laporan keberlanjutan sesuai standar dan peraturan OJK, Standar Global Reporting Initiatives (GRI), GRI-G4, Penilaian Perbankan Berkelanjutan (SUSBA), Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS)-S2 dan *ASEAN Corporate Governance Scorecard*.

Danamon pada tema alam *mendapatkan skor karena telah menyatakan dalam laporan tahun 2023 bahwa Danamon bersikap proaktif dalam mendukung inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan*. Hal ini terlihat melalui kepatuhan ketat kami terhadap Pedoman Kredit Berkelanjutan dan Pedoman Analisis Risiko Lingkungan dan Sosial (ESRA), yang membimbing aktivitas pembiayaan kami untuk mendukung proyek-proyek yang sadar lingkungan dan mempromosikan upaya konservasi, termasuk keanekaragaman hayati. Standar dan inisiatif yang dipatuhi terkait perlindungan keanekaragaman hayati adalah CITES, UNEP-WCMC, Daftar Taman Nasional dan Area Terlindungi PBB, dan IUCN Kategori I-V.

CIMB Niaga mendapatkan skor karena berkomitmen untuk mendorong peminjam di sektor perkebunan kelapa sawit untuk mengadopsi prinsip dan komitmen keberlanjutan

sesuai dengan berbagai standar, dan memberikan informasi tentang Debitur dan jumlah pembiayaan terkait Komitmen HCV. Sementara, BNI, BSI dan Permata masih belum mendapatkan skor di tahun 2024 ini karena tidak ditemukan kebijakan yang dinilai pada elemen-elemen di tema ini.

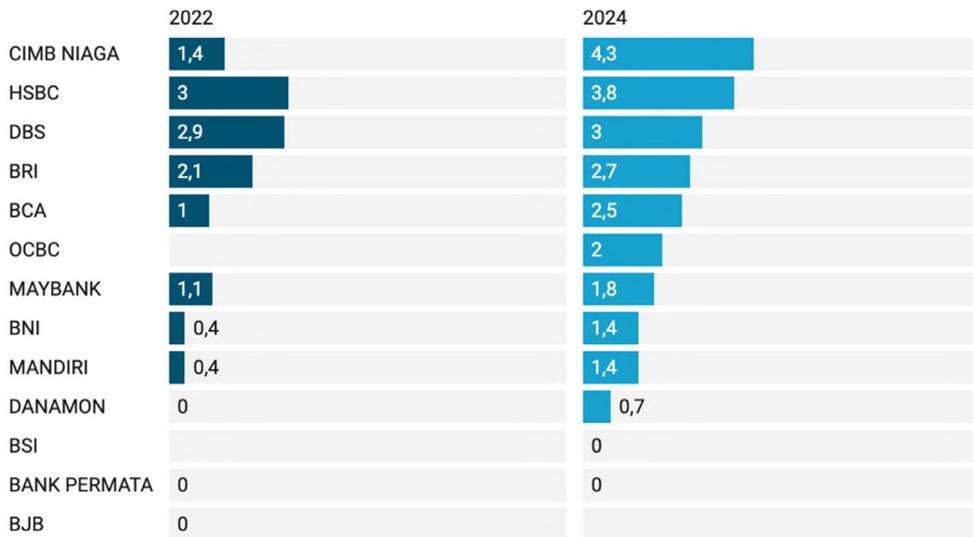
#### 4.4 Penilaian pada Tema Kehutanan



Penilaian yang dilakukan terhadap kebijakan bank dalam konteks kehutanan sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan mereka tidak hanya berkelanjutan tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Terdapat 11 elemen yang dinilai pada tema ini, di mana elemen-elemen seperti kebijakan pengelolaan stok karbon tinggi, pencegahan penebangan kayu ilegal, pengurangan pencemaran, penghormatan terhadap hak masyarakat lokal, sertifikasi pengelolaan hutan, hingga transparansi rantai pasok merupakan kebijakan-kebijakan yang dinilai.

Bank memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam melindungi dan mengelola sumber daya hutan secara berkelanjutan. Dengan mencegah dampak negatif terhadap area Stok Karbon Tinggi (SKT) dan memastikan bahwa kayu tidak diperoleh melalui praktik ilegal, perusahaan dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Langkah-langkah ini tidak hanya penting untuk keberlanjutan hutan, tetapi juga untuk keberlanjutan bisnis itu sendiri di era yang semakin peduli terhadap isu-isu lingkungan.

Grafik 19. Skor Bank pada Tema Kehutanan



Sumber: Olahan Peneliti

Grafik 19 menunjukkan bahwa pada tema kehutanan, CIMB Niaga mendapatkan skor paling tinggi sebesar 4,3 dan naik secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya 1,4. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena CIMB Niaga memiliki Panduan Sektor yang menguraikan persyaratan kinerja LST minimum yang wajib, aktivitas yang dilarang, dan aspek-aspek yang didorong untuk praktik keberlanjutan. Panduan sektor mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, Penggunaan Lahan Lainnya dan Perubahan Penggunaan Lahan (AFOLULUC), yang termasuk kelapa sawit, batu bara, minyak dan gas, kehutanan, karet alam, layanan konstruksi dan infrastruktur, penambangan dan penggalian, serta manufaktur. Dalam portofolio pembiayaannya, CIMB Niaga telah mengungkapkan klien yang memperoleh sertifikasi keberlanjutan dan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Selain itu, CIMB Niaga mengharuskan klien di sektor tertentu untuk menerapkan Persetujuan Bebas, Sebelumnya, dan Terinformasi (FPIC) dalam pendekatan sosial mereka. FPIC harus diterapkan di semua sektor yang dibiayai oleh Bank (Kehutanan & karet, batu bara, minyak dan gas, manufaktur, kelapa sawit, dan konstruksi).

Hampir seluruh bank mengalami peningkatan skor yang cukup baik. Secara keseluruhan pada tema ini rata-rata skor mengalami peningkatan dari 1,1 di tahun 2022 menjadi 2,0 di tahun 2024. Meski demikian, Permata masih belum mendapatkan skor pada tema ini.

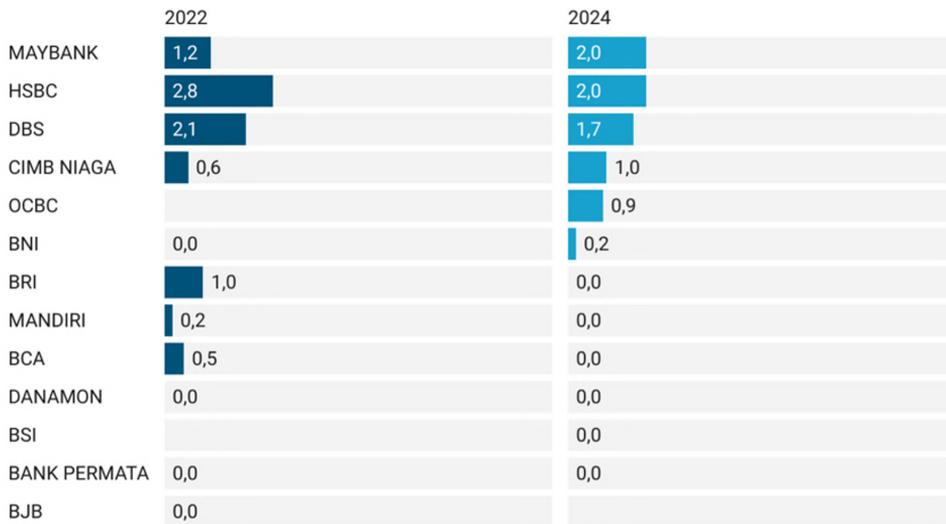
## 4.5 Penilaian pada Tema Pertambangan



Pertambangan merupakan salah satu sektor yang berisiko. Kegiatan pertambangan yang tidak terkendali menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat dan kehidupan sekitar tambang, di antaranya; kerusakan lingkungan, tingginya tingkat pencemaran (tanah, air dan udara), juga mengakibatkan gangguan bagi masyarakat luas berupa kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum terutama akibat aktivitas peledakan dinamis untuk membuka lokasi tambang (Listiyani, 2017).

Penilaian dalam tema pertambangan mencakup 21 elemen yang kritis untuk memastikan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Bank-bank perlu turut bertanggung jawab dengan memastikan bahwa perusahaan di sektor ini dapat memitigasi risiko kecelakaan dan memiliki rencana darurat yang solid. Mereka juga harus mengelola limbah ekstraktif dengan cara yang bertanggung jawab dan melakukan pemulihan ekosistem pasca-penambangan. Bank juga harus memiliki kebijakan untuk mematuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan tidak terlibat dalam praktik yang merugikan. Bank berperan penting dengan mengecualikan investasi pada kegiatan yang merusak lingkungan atau berdampak negatif pada masyarakat. Melalui laporan keberlanjutan yang transparan dan kepatuhan terhadap kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola, bank dapat berkontribusi pada pertambangan yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Grafik 20. Skor Bank pada Tema Pertambangan



Sumber: Olahan Peneliti

Dari hasil penilaian (Grafik 20), kenaikan paling tinggi dialami oleh Maybank dan menempatkannya pada posisi teratas. Di dalam kebijakannya, Maybank Indonesia telah memasukkan kegiatan tertentu dalam daftar hitam, termasuk serat asbes yang tidak terikat. Maybank menyatakan kebijakannya untuk menghindari pembiayaan kepada peminjam baru yang terlibat dalam kegiatan batubara termal dan terkait batubara termal; yang memperoleh jumlah material dari pendapatan tahunan mereka dari batubara termal; dan tidak memiliki hubungan yang ada dengan Grup Maybank. Untuk klien yang sudah ada, Maybank tidak akan memberikan pembiayaan baru untuk pertambangan batubara termal dan kegiatan terkaitnya dan pada akhirnya melepaskan diri dari usaha terkait batubara.

HSBC menempati posisi kedua untuk tema pertambangan dengan perolehan skor 3. Perolehan skor dasar dan skor cakupan pada beberapa elemen karena HSBC telah menerapkan Standar Kinerja IFC sebagai bagian dari keanggotaan Prinsip Equator. Selain itu, HSBC juga secara tegas telah berkomitmen untuk tidak memberikan layanan keuangan untuk tambang yang menggunakan Metode Penghapusan Puncak Gunung (MTR), tidak akan memberikan pembiayaan baru atau layanan konsultasi baru untuk aset batubara termal baru, pembangkit listrik berbahan bakar batubara termal baru, dan pabrik konversi batubara menjadi gas/cair. Kebijakan ini berlaku untuk *holding* dan anak perusahaan yang terkait, baik untuk pembiayaan dan layanan konsultasi serta manajemen aset.

Secara keseluruhan, skor rata-rata pada tema ini meningkat dari 0,8 di tahun 2022 menjadi 1,1 di tahun 2024. Sementara untuk beberapa bank seperti BRI, Mandiri dan BCA mengalami penurunan skor karena pada penilaian di tahun 2024 tidak ditemukan kebijakan yang

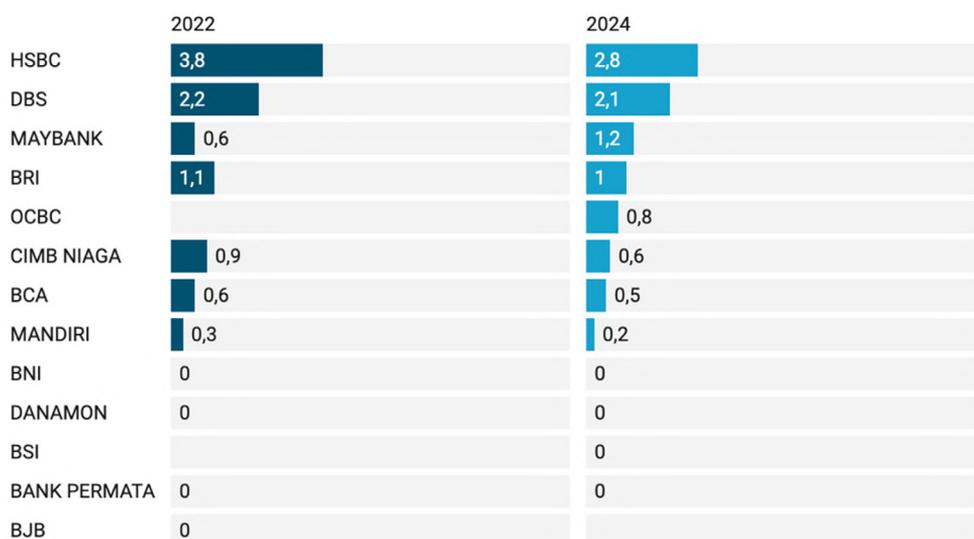
relevan dengan elemen penilaian. Kemudian untuk Danamon dan Permata masih belum mendapatkan skor pada tema ini sama seperti tahun sebelumnya.

#### 4.6 Penilaian pada Tema Minyak dan Gas



Penilaian bank pada tahun 2024 untuk tema minyak dan gas mengidentifikasi 16 elemen penting. Elemen-elemen tersebut dapat mencerminkan komitmen perusahaan dalam mengelola risiko serta dampak lingkungan dari kegiatan ekstraksi dan eksplorasi. Penilaian tema ini menekankan perlunya bank untuk turut memperhatikan bagaimana perusahaan dapat memitigasi risiko kecelakaan dari aktivitas bisnis dan memiliki rencana darurat yang komprehensif dari aktivitas mereka. Bank juga mendorong debitur atau perusahaan yang dibiayai untuk mengurangi limbah dan mengelola dampak lingkungan secara bertanggung jawab, termasuk meminimalkan efek negatif terhadap lingkungan dan sosial.

Grafik 21. Skor Bank pada Tema Minyak dan Gas



Sumber: Olahan Peneliti

Tema minyak dan gas secara keseluruhan mengalami penurunan skor rata-rata dari 0,9 di tahun 2022 menjadi 0,8 di tahun 2024. Sama seperti tahun sebelumnya HSBC menempati posisi teratas meskipun terdapat penurunan skor. Pada tahun 2024 dalam beberapa elemen HSBC tidak mendapatkan skor. Kehilangan skor ini karena, dalam kebijakannya HSBC menyatakan komitmen untuk tidak minyak dan gas namun hanya berlaku untuk proyek baru dan tidak mencakup eksplorasi lama. Sedangkan untuk beberapa tema yang mendapatkan skor karena HSBC telah menerapkan Standar Kinerja IFC sebagai bagian dari keanggotaan Prinsip Equator.

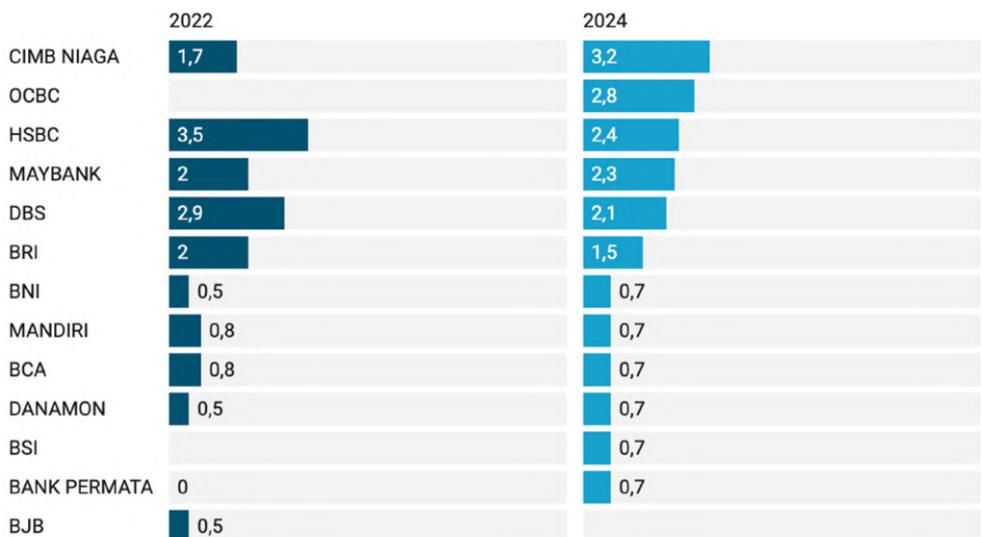
Kemudian, untuk BNI, Danamon, dan Permata masih belum mendapatkan skor seperti tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa masih belum ditemukan kebijakan yang mendukung elemen-elemen penilaian pada tema minyak dan gas pada bank-bank tersebut.

## 4.7 Penilaian pada Tema Pembangkit Listrik



Proyek pembangunan pembangkit listrik di berbagai daerah menghadapi sejumlah permasalahan. Tantangan ini tidak hanya berasal dari aspek lingkungan, tetapi juga dari aspek sosial. Faktor-faktor seperti perubahan iklim, ketersediaan air, hilangnya lahan pertanian, dan kerusakan ekosistem dapat berdampak signifikan pada sumber penghidupan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, keterlibatan lembaga jasa keuangan juga sangat penting. Terdapat 15 elemen yang dinilai dalam tema ini untuk memastikan bahwa semua aspek tersebut dipertimbangkan secara menyeluruh.

Grafik 22. Skor Bank pada Tema Pembangkit Listrik



Sumber: Olahan Peneliti

Grafik 22 memperlihatkan bahwa CIMB Niaga menduduki peringkat tertinggi di tahun 2024 dengan skor 3,2. CIMB Niaga mengalami peningkatan skor tertinggi di antara bank-bank lainnya yakni sebesar 1,5 point. Pada tema ini, CIMB Niaga telah memiliki daftar pengecualian dan telah berkomitmen untuk tidak membiayai perluasan tambang batubara termal dan pembangkit listrik berbahan bakar batubara (CFPP), termasuk membuka tambang yang menggunakan teknik Penghapusan Puncak Gunung (MTR). Bank juga mengecualikan pembiayaan dan investasi di pembangkit listrik berbahan bakar batubara, tetapi karena pembangkit listrik berbahan bakar minyak dan gas tidak dikecualikan, ini tidak cukup untuk mendapatkan poin.

Selain itu, CIMB Niaga telah mendukung pembiayaan proyek Efisiensi Energi dan Energi Terbarukan dengan memberikan pinjaman untuk sektor energi terbarukan. CIMB Niaga juga memberikan informasi tentang Target Pengurangan Emisi 2030 mereka yang mencakup pembangkit listrik sebagai salah satu sektor target yang ingin mereka capai dalam Target Pengurangan Emisi 2030 mereka. CIMB Niaga menyatakan target pengurangan intensitas emisi sebesar 38% dalam portofolionya, dengan fokus pada alternatif rendah karbon dan terbarukan untuk mempercepat rencana dekarbonisasi kliennya.

Secara umum, meskipun seluruh bank mendapatkan skor namun rata-rata skor untuk tema pembangkit listrik hanya mengalami perubahan yang rendah dari 1,4 di tahun 2022 menjadi 1,5 di tahun 2024. Peningkatan yang rendah ini disebabkan karena pada beberapa elemen seluruh bank tidak mendapatkan skor antara lain seperti tidak tercantumnya target yang terukur untuk pengurangan pembiayaan dan investasi pada perusahaan-perusahaan yang aktif di bidang pembangkit listrik tenaga batu bara, kepatuhan terhadap 12 prinsip Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), dan komitmen untuk memasukkan klausul kepatuhan kriteria LST dalam kontrak dengan subkontraktor dan pemasok. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa semua aspek keberlanjutan diterapkan secara konsisten dalam setiap tahap proyek.



## Bagian 5

# KEMAJUAN KEBIJAKAN DAN KOMITMEN BANK PADA ASPEK SOSIAL DAN TATA KELOLA

---

Secara umum, skor setiap tema mengalami perubahan dari tahun 2022 ke 2024, dengan peningkatan pada beberapa tema, seperti inklusi keuangan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender, serta penurunan pada tema hak pekerja. Sementara itu, skor pada aspek kesehatan tetap stagnan. Meskipun masih jauh dari nilai maksimum penilaian, peningkatan skor pada tema-tema tersebut perlu diapresiasi dan perlu diikuti langkah yang lebih konkret oleh bank untuk mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam kebijakan pembiayaan dan investasi.

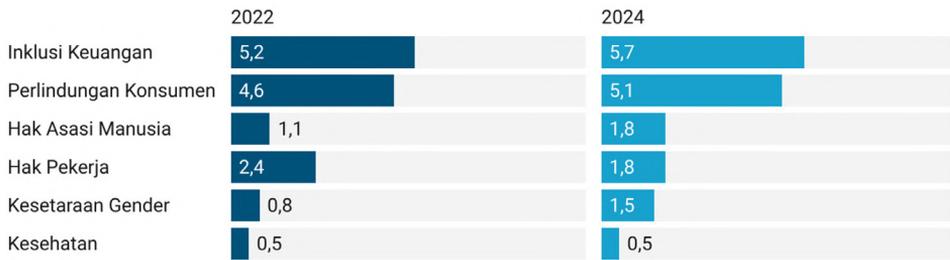
## 5.1 Kemajuan Bank dalam Integrasi Aspek Sosial pada Kebijakan Pembiayaan dan Investasi

Integrasi aspek sosial dalam kebijakan pembiayaan dan investasi bank semakin penting dalam kerangka standar internasional. Lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan *International Finance Corporation* (IFC) mewajibkan bank untuk mempertimbangkan dampak sosial dalam setiap proyek yang didanai, termasuk perlindungan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat lokal, dan keadilan sosial. Selain itu, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang diinisiasi oleh PBB menekankan pentingnya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial, yang semakin mendorong bank untuk memasukkan dimensi sosial dalam keputusan investasi mereka. Kepatuhan terhadap standar ini tidak hanya mengurangi risiko sosial dan reputasi, tetapi juga meningkatkan stabilitas jangka panjang bagi lembaga keuangan.

Di Indonesia, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pedoman bagi bank dan lembaga keuangan dalam membiayai kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, dengan memperhatikan dimensi sosial, seperti pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan perlindungan hak asasi manusia. Bank yang mematuhi TKBI dapat mendukung proyek yang memberikan dampak positif bagi masyarakat, sekaligus mengurangi risiko sosial dan hukum terkait proyek yang tidak mempertimbangkan faktor sosial. Dengan mengintegrasikan aspek sosial, bank di Indonesia berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan sesuai dengan komitmen negara terhadap SDGs, sembari memitigasi risiko yang dapat merugikan reputasi dan stabilitas finansial.

Pada penilaian kebijakan bank tahun ini, terdapat enam tema yang masuk pada aspek sosial yaitu inklusi keuangan, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, hak pekerja, kesetaraan gender, dan kesehatan. Skor pada aspek sosial berkisar pada kategori sangat kurang hingga cukup. Secara umum, skor setiap tema mengalami perubahan dari tahun 2022 ke 2024, dengan peningkatan pada beberapa tema, seperti inklusi keuangan, perlindungan konsumen, dan kesetaraan gender, serta penurunan pada tema hak pekerja. Sementara itu, skor pada aspek kesehatan tetap stagnan. Meskipun masih jauh dari nilai maksimum penilaian, peningkatan skor pada tema-tema tersebut perlu diapresiasi dan perlu diikuti langkah yang lebih konkret oleh bank untuk mengintegrasikan isu-isu ini ke dalam kebijakan pembiayaan dan investasi.

Grafik 23. Skor rata-rata Kebijakan Bank pada aspek Sosial



Sumber: olahan penelitian

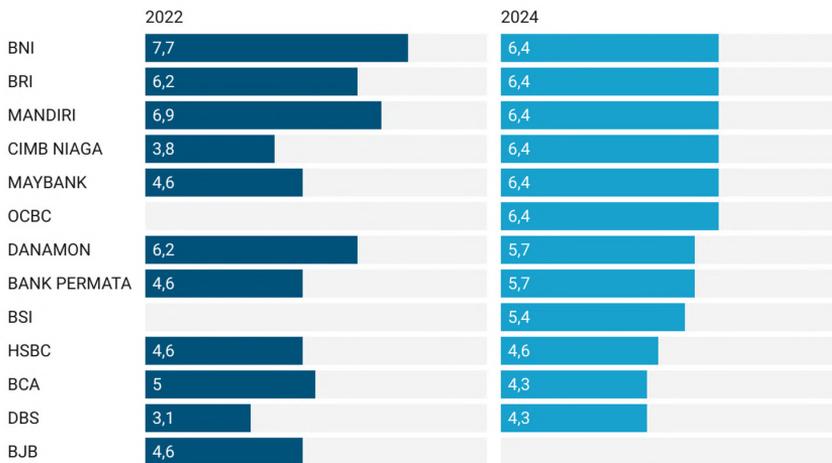
Grafik 23 menunjukkan bahwa tema inklusi keuangan memperoleh skor tertinggi yang mencapai skor 5,2 pada 2022 dan meningkat menjadi 5,7 pada 2024. Hal ini menandakan bahwa bank mengungkapkan informasi lebih baik dalam hal peningkatan untuk mendorong akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Perlindungan Konsumen (4,6 ke 5,1) dan Hak Asasi Manusia (1,1 ke 1,8) menunjukkan kemajuan yang positif, meskipun hak asasi manusia masih berada pada tingkat rendah. Pada tema kesetaraan gender, skor meningkat paling signifikan dari 0,8 pada tahun 2022 menjadi 1,5 pada tahun 2024, mencerminkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap kesetaraan gender di sektor perbankan. Meski demikian, skor ini tetap rendah dibandingkan aspek lainnya, menunjukkan masih banyak ruang untuk perbaikan. Pada tema kesehatan, skor menunjukkan stagnansi, yakni sebesar 0,5 selama dua tahun, menunjukkan minimnya fokus bank terhadap isu kesehatan dalam kebijakan mereka. Sementara itu, tema Hak Pekerja menunjukkan penurunan dari 2,4 pada 2022 ke 1,8 pada 2024.

### 5.1.1 Penilaian pada Tema Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan adalah akses terhadap layanan keuangan yang beragam dan berkualitas, seperti tabungan, pinjaman, asuransi, dan pembayaran, yang memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah meningkatkan pendapatan, membangun aset, dan mengurangi kerentanan ekonomi. Inklusi keuangan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, mengatasi ketimpangan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan efisiensi biaya, keberagaman layanan, dan pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat rentan. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK tahun 2022 menunjukkan indeks inklusi keuangan tahun 2022 mencapai 85,10 persen, meningkat dibanding periode sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19 persen. Sementara itu, indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dibanding tahun 2019 yang mencapai 38,03 persen. Angka tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi pada konsumen, yang menunjukkan bahwa

masyarakat rentan dalam menggunakan layanan jasa keuangan karena tidak memahami manfaat dan risiko produk keuangan yang digunakan.

Grafik 24. Skor Bank pada Tema Inklusi Keuangan



Sumber: olahan penelitian

Dilihat dari hasil penilaian kebijakan bank pada tema inklusi keuangan, secara keseluruhan terjadi peningkatan rata-rata skor yang mencerminkan adanya perbaikan dalam sektor perbankan terkait penyediaan layanan keuangan yang lebih inklusif seperti terlihat pada Grafik 24. Namun demikian, banyak bank yang tidak mendapatkan skor pada elemen penilaian terkait peningkatan literasi nasabah seperti kebijakan untuk mengungkapkan hak nasabah dan UMKM yang tidak melek huruf. Hanya sedikit bank yang memperoleh skor karena memiliki kebijakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok marginal dan UMKM. Ini menunjukkan perlunya peningkatan peran bank dalam memberikan literasi kepada nasabah, khususnya kelompok masyarakat dengan tingkat kemampuan baca rendah atau kelompok marginal lain.

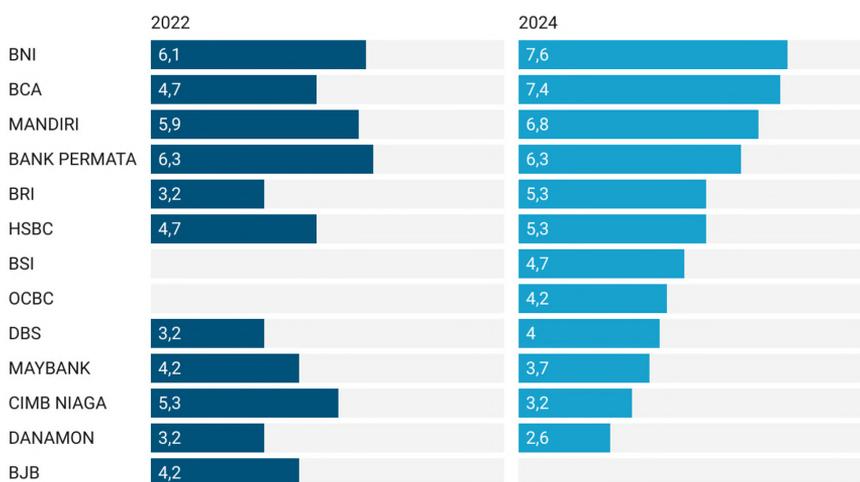
Pada Grafik 24 terlihat bahwa pada tahun 2024, sejumlah bank, seperti BNI, BRI, Mandiri, CIMB Niaga, Maybank, dan OCBC, berhasil meraih skor tertinggi 6,4 yang menunjukkan kinerja baik dalam memperluas akses dan pelayanan keuangan kepada masyarakat. Bank CIMB Niaga mencatatkan kenaikan paling signifikan, dari 3,8 pada 2022 menjadi 6,4 pada 2024. CIMB Niaga berhasil meningkatkan skor pada tema inklusi keuangan karena memiliki kebijakan yang mendukung peningkatan literasi keuangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kelompok marginal, dan UMKM. CIMB Niaga turut menyediakan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menawarkan produk serta layanan yang mendukung peningkatan akses terhadap layanan perbankan dan keuangan bagi perempuan, termasuk pengusaha perempuan.

Di sisi lain, beberapa bank mengalami penurunan skor, seperti BCA, yang turun dari 5,0 menjadi 4,3, dan Danamon, yang turun dari 6,2 menjadi 5,7. Hal ini menunjukkan tantangan dalam memperluas aksesibilitas atau kualitas layanan inklusi keuangan mereka. Penurunan ini terjadi karena adanya beberapa informasi yang sebelumnya diungkap pada laporan tidak lagi diungkapkan di tahun ini, seperti tidak adanya informasi terkait kebijakan pemberian keringanan bagi UMKM dalam mengajukan pinjaman tanpa agunan. Selain itu, bank seperti BSI dan OCBC yang baru dinilai pada tahun ini memperoleh skor 5,4 dan 6,4 yang dapat dikategorikan cukup dan baik.

### 5.1.2 Penilaian pada Tema Perlindungan Konsumen

Kurangnya perlindungan konsumen di sektor keuangan dapat berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk risiko krisis keuangan akibat kurangnya transparansi bank terkait pasar serta pertumbuhan utang dan keterlambatan pembayaran utang konsumen. Karena dampaknya terhadap kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan, konsumen harus sadar dan memahami risiko serta kondisi khusus dari setiap produk keuangan. Consumers International mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai tanggung jawab penyedia layanan keuangan untuk memberikan informasi yang jelas, cukup, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan tepat waktu, yang sesuai untuk memungkinkan konsumen membandingkan dan mempertimbangkan serta membuat keputusan yang berbasis informasi.

Grafik 25. Skor Bank pada Tema Perlindungan Konsumen



Sumber: olahan penelitian

Secara umum, skor penilaian untuk hampir semua bank mengalami peningkatan dari tahun 2022 ke 2024, seperti terlihat pada Grafik 25. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan dan peningkatan kualitas perlindungan konsumen yang diterapkan oleh bank-bank tersebut.

BNI, BCA, dan MANDIRI memiliki skor yang relatif tinggi dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 2022 ke 2024. BNI memperoleh skor tertinggi pada tema ini dari 6,1 menjadi 7,6 pada 2024. Peningkatan ini karena adanya kemajuan pengungkapan informasi terkait pemantauan pengaduan konsumen, merancang struktur remunerasi untuk mendorong perilaku bisnis yang bertanggung jawab, serta melatih karyawan dan agen resmi mengenai kebijakan dan praktik perlindungan konsumen. Sama halnya dengan BCA yang meningkat dari 4,7 menjadi 7,4 pada 2024. Peningkatan relatif signifikan ini karena BCA memiliki kebijakan untuk melindungi konsumen dari utang berlebih, menjaga kerahasiaan data pribadi, menerbitkan prosedur penagihan utang, memberitahu perubahan biaya secara tepat waktu kepada konsumen, dan menyediakan aksesibilitas bagi nasabah penyandang disabilitas di semua layanan.

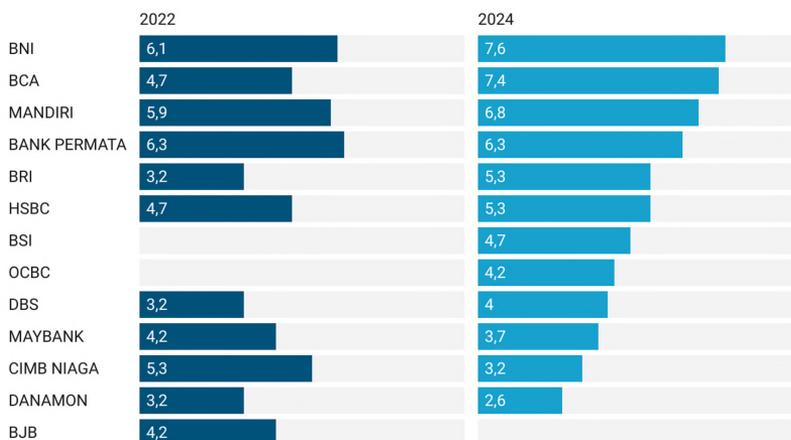
Grafik 25 juga menunjukkan bahwa HSBC, dan DBS, mengalami peningkatan skor yang relatif moderat, mengindikasikan adanya upaya perbaikan namun masih memerlukan pengembangan lebih lanjut dalam aspek perlindungan konsumen. MAYBANK, CIMB NIAGA, DANAMON, dan BJB memiliki skor yang lebih rendah dibandingkan bank-bank lainnya, meskipun juga mengalami peningkatan dari 2022 ke 2024. Ini menunjukkan bahwa bank-bank tersebut perlu lebih fokus pada peningkatan praktik perlindungan konsumen.

### 5.1.3 Penilaian pada Tema Hak Pekerja dan Hak Asasi Manusia

Untuk operasi internal, BNI, BRI, BCA, CIMB Niaga, Maybank, Permata, HSBC, dan BSI menyatakan menghormati Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. BNI, BCA, CIMB Niaga, DBS, HSBC, OCBC mengatur perusahaan yang dibiayai melakukan kerja paksa, dan menggunakan pekerja anak.

Hanya HSBC dan DBS yang mengatur agar perusahaan yang dibiayai memiliki kebijakan kesehatan dan keselamatan yang komprehensif, memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang setara bagi pekerja migran dan pekerja informal, menetapkan prosedur untuk menangani dan memproses keluhan karyawan, menyelesaikan pelanggaran dan konflik dengan berkonsultasi dengan serikat pekerja terkait, serta mengintegrasikan hak-hak buruh ke dalam kebijakan pengadaan mereka.

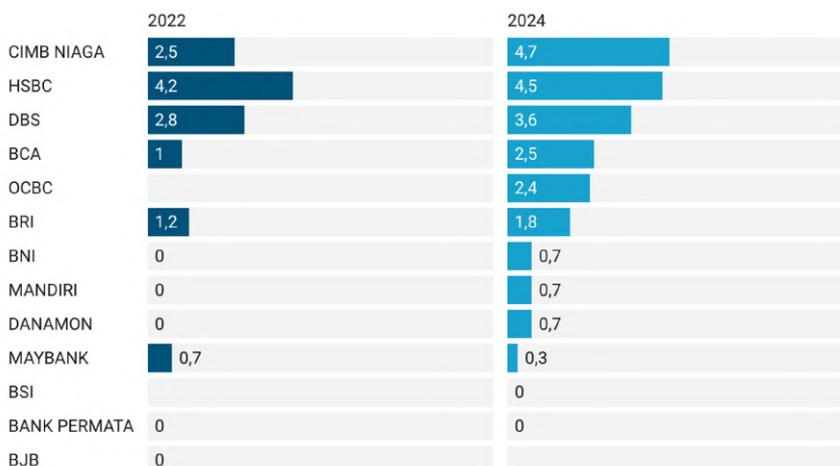
Grafik 26. Skor Bank pada Tema Hak Pekerja



Sumber: olahan penelitian

Untuk operasi internal, BRI, BCA, CIMB Niaga, DBS, HSBC menyatakan menghormati semua bentuk HAM sebagaimana dijelaskan dalam UNGPs Bisnis dan HAM. BNI, BRI, Mandiri, BCA, CIMB Niaga, Danamon, HSBC memiliki kebijakan anti diskriminasi dalam segala bentuk. CIMB Niaga, DBS, HSBC, dan OCBC mewajibkan perusahaan yang dibiayai untuk Perusahaan menghormati semua HAM dalam UNGPs BHR, melakukan proses uji tuntas HAM, serta memiliki proses yang memungkinkan terjadinya remediasi terhadap dampak buruk terhadap HAM. BCA, Maybank, HSBC, DBS, dan OCBC yang berkomitmen mengatur perusahaan yang dibiayai mencegah terjadinya konflik lahan, memastikan konsultasi bermakna dan memperoleh FPIC. CIMB Niaga, DBS, HSBC, OCBC memiliki kebijakan/ statement khusus terkait aspek HAM.

Grafik 27. Skor Bank pada Tema Hak Asasi Manusia



Sumber: olahan penelitian

#### 5.1.4 Penilaian pada Tema Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), termasuk SDG 5 yang fokus pada menghapus diskriminasi gender, kekerasan, dan pernikahan dini, serta memastikan hak yang setara atas sumber daya ekonomi dan pemberdayaan perempuan. SDG lainnya, seperti SDG 10 tentang Pengurangan Ketimpangan, SDG 1 tentang Tanpa Kemiskinan, SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, dan SDG 8 tentang Pekerjaan Layak, juga menyoroti pentingnya inklusi gender dan kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan sumber daya ekonomi. Namun, dalam sektor swasta, pengarusutamaan gender masih kurang diadopsi, meskipun beberapa inisiatif seperti Equileap telah berupaya mengukur kesetaraan gender dalam dunia usaha sejak 2016.

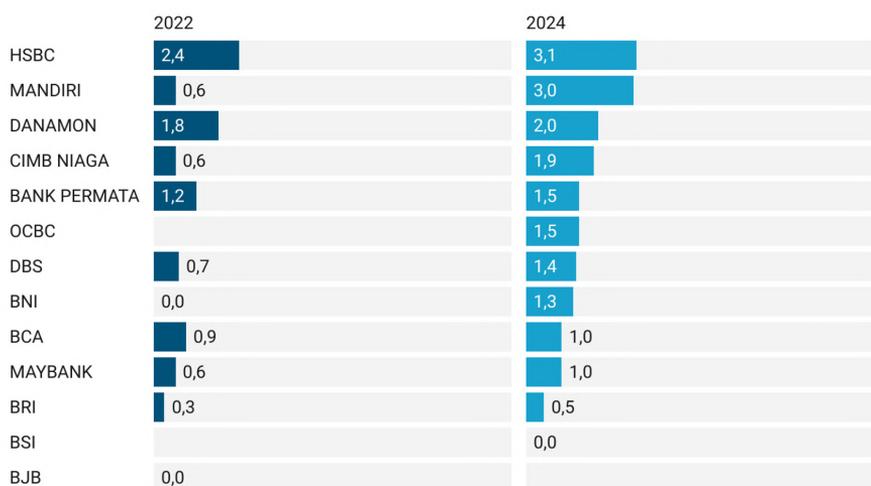
Studi menunjukkan bahwa keberagaman gender di tingkat kepemimpinan perusahaan berhubungan dengan kinerja yang lebih baik pada indikator keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan kesetaraan gender dalam kebijakan dan operasi, perusahaan dan lembaga keuangan dapat mendorong perubahan positif lintas sektor. Hal ini menjadi penting, mengingat risiko berbasis gender yang terkait dengan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta potensinya dalam memajukan keberlanjutan dan inklusi di berbagai bidang.

Berbagai peraturan internasional, seperti Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Kovenan Internasional tentang Hak Asasi Manusia, menegaskan pentingnya kesetaraan gender sebagai hak fundamental, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Konvensi ILO dan Pedoman OECD menyoroti bahwa kesetaraan gender, seperti akses setara terhadap pekerjaan, upah, dan promosi, serta perlindungan dari diskriminasi, merupakan elemen penting dalam mencapai tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia serta Standar Kinerja IFC (*International Finance Corporation*) mendukung pengarusutamaan gender dalam lembaga keuangan, termasuk memastikan kesempatan kerja yang setara, perlakuan adil, dan tindakan untuk mencegah pelecehan, intimidasi, atau eksploitasi, terutama terhadap perempuan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini, lembaga keuangan dapat mendukung hak asasi manusia, meningkatkan keberlanjutan, dan memenuhi standar internasional yang relevan.

Pengarusutamaan gender dalam pembiayaan dan investasi oleh perbankan di Indonesia masih berada pada tahap awal implementasi. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan memiliki regulasi domestik yang mendukung kesetaraan gender, penerapannya dalam sektor perbankan belum sistematis. Tantangan utama mencakup kurangnya kesadaran, kapasitas, dan mekanisme operasional untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam kebijakan, proses kredit, dan investasi.

Selain itu, keterlibatan perempuan dalam posisi strategis di sektor perbankan Indonesia masih rendah. Laporan dari *World Economic Forum* pada 2023 menunjukkan bahwa perempuan hanya mengisi sekitar 22% posisi kepemimpinan di sektor keuangan Indonesia. Rendahnya representasi perempuan di tingkat pengambil keputusan turut memperlambat integrasi perspektif gender dalam kebijakan perbankan.

Grafik 28. Skor Bank pada Tema Kesetaraan Gender



Sumber: olahan penelitian

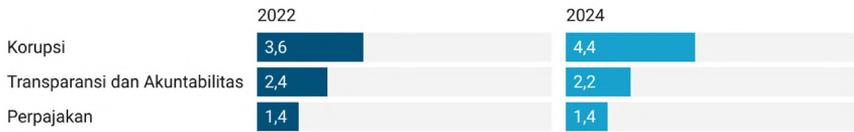
Penilaian bank menunjukkan bahwa pada tema kesetaraan gender, kinerja bank masih termasuk kategori kurang. Grafik 28 menunjukkan bahwa HSBC memperoleh skor tertinggi sebesar 3,1 meningkat dari periode penilaian sebelumnya sebesar 2,4. Pada tema ini, BCA, CIMB Niaga, Danamon, Permata, HSBC, dan OCBC secara eksplisit memiliki komitmen kebijakan nol toleransi yang sensitif terhadap gender terhadap segala bentuk diskriminasi. CIMB Niaga, Maybank dan HSBC memiliki sistem untuk mencegah dan memitigasi diskriminasi gender terhadap nasabahnya. BNI, Mandiri, CIMB Niaga, OCBC menjamin setidaknya 30% partisipasi dan akses yang setara antara perempuan dan laki-laki di tingkat Direksi, posisi Eksekutif, dan manajemen senior. BNI, BRI, Bank Mandiri, DBS, dan HSBC Lembaga keuangan menyediakan pengembangan profesional bagi karyawan untuk mempromosikan akses yang setara bagi perempuan ke posisi tingkat senior. DBS dan HSBC mengatur perusahaan yang dibiayai secara aktif mengelola remunerasi yang setara.

## 5.2 Kemajuan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Bank pada Aspek Tata Kelola

Pada aspek tata kelola, rata-rata kebijakan bank hanya meningkat sebesar 0,2-point dibandingkan tahun 2022. Tema korupsi merupakan yang cukup baik mengalami peningkatan

sebesar 0,8 point, sementara transparansi dan akuntabilitas hanya meningkat 0,2-point dan perpajakan tidak mengalami perubahan point. Kebijakan perpajakan pada bank-bank di Indonesia masih cukup rendah dengan perolehan skor rata-rata hanya sebesar 1,4.

Grafik 29. Skor Rata-rata Bank pada Aspek Tata Kelola



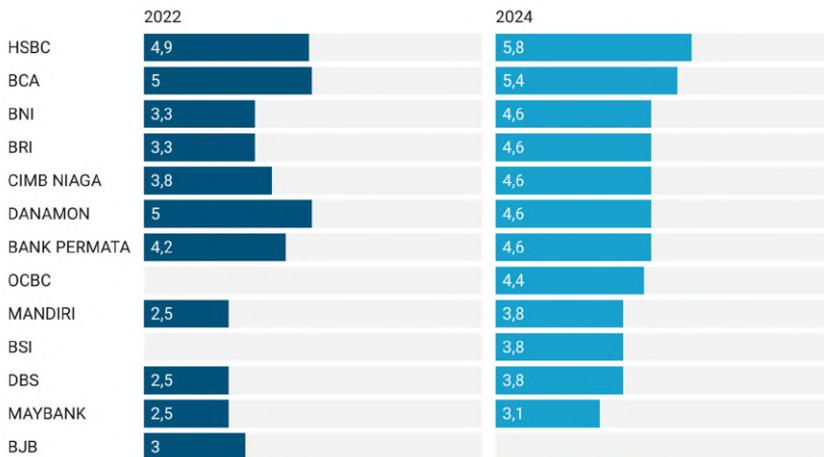
Sumber: olahan penelitian

### 5.2.1 Penilaian pada Tema Korupsi

Pada tema korupsi, seluruh bank yang dinilai memperoleh skor karena adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan untuk perusahaan dan bank memiliki kebijakan anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Grafik 30 menunjukkan bahwa nilai pada tema ini masuk pada kategori kurang dan cukup. HSBC memperoleh skor tertinggi sebesar 5,8 meningkat dari penilaian sebelumnya sebesar 4,9.

Semua bank yang memperoleh skor pada elemen ini melarang karyawannya untuk menawarkan, menjanjikan, memberi, dan mewajibkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, suap dan keuntungan-keuntungan lain guna memperoleh dan mempertahankan jabatan atau penunjukan serta keuntungan-keuntungan lain yang tidak semestinya. Seluruh bank yang dinilai memiliki kebijakan anti pencucian uang dan kebijakan untuk mencegah pendanaan teroris serta pendanaan proliferasi.

Grafik 30. Skor Bank pada Tema Korupsi



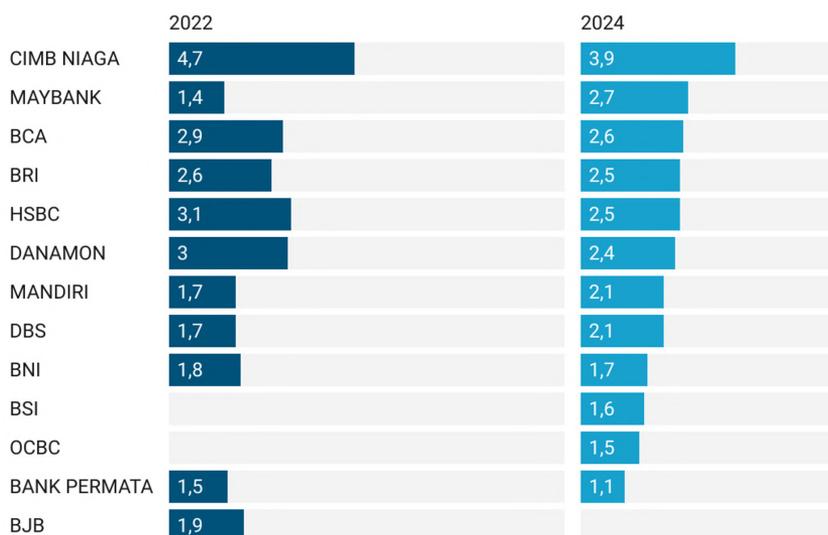
Sumber: olahan penelitian

Namun demikian, hanya DBS dan HSBC yang mewajibkan perusahaan yang dibiayai tidak terlibat dalam suap, perjanjian, penawaran yang menguntungkan pihak tertentu.

### 5.2.2 Penilaian pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas

Seluruh bank memperoleh sebagian skor pada elemen yang menjelaskan kerangka pembiayaan dan investasi terkait isu-isu lingkungan dan sosial, serta memberikan wawasan tentang bagaimana bank memastikan investasi memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam kebijakannya. Seluruh bank memperoleh skor pada elemen terkait penerbitan laporan keberlanjutan yang mungkin memuat (sejumlah) pengungkapan dari Standar GRI, sesuai dengan Standar GRI (opsi Inti atau Komprehensif), dan diverifikasi secara eksternal. Hanya CIMB Niaga yang berkomitmen untuk menghormati dan bekerja sama dengan itikad baik dengan mekanisme non-yudisial dan yudisial berbasis negara ketika kasus yang terkait dengan bank diajukan ke mekanisme tersebut. Mekanisme pengaduan yang diungkap oleh bank seluruhnya hanya terkait mekanisme komplain produk dan *whistleblowing* system.

Grafik 31. Skor Bank pada Tema Transparansi dan Akuntabilitas



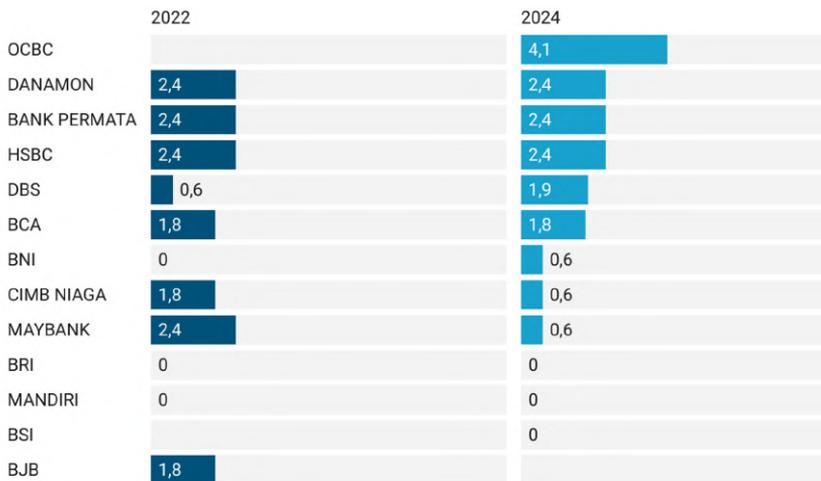
Sumber: olahan penelitian

### 5.2.2 Penilaian pada Tema Perpajakan

Tema perpajakan merupakan tema yang cukup krusial di mana pajak sangat berperan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Pada tema ini, bank dinilai berdasarkan elemen *country by country reporting* atas pendapatan, profit, total aset, Full-Time Equivalent (FTE) yang berarti setara

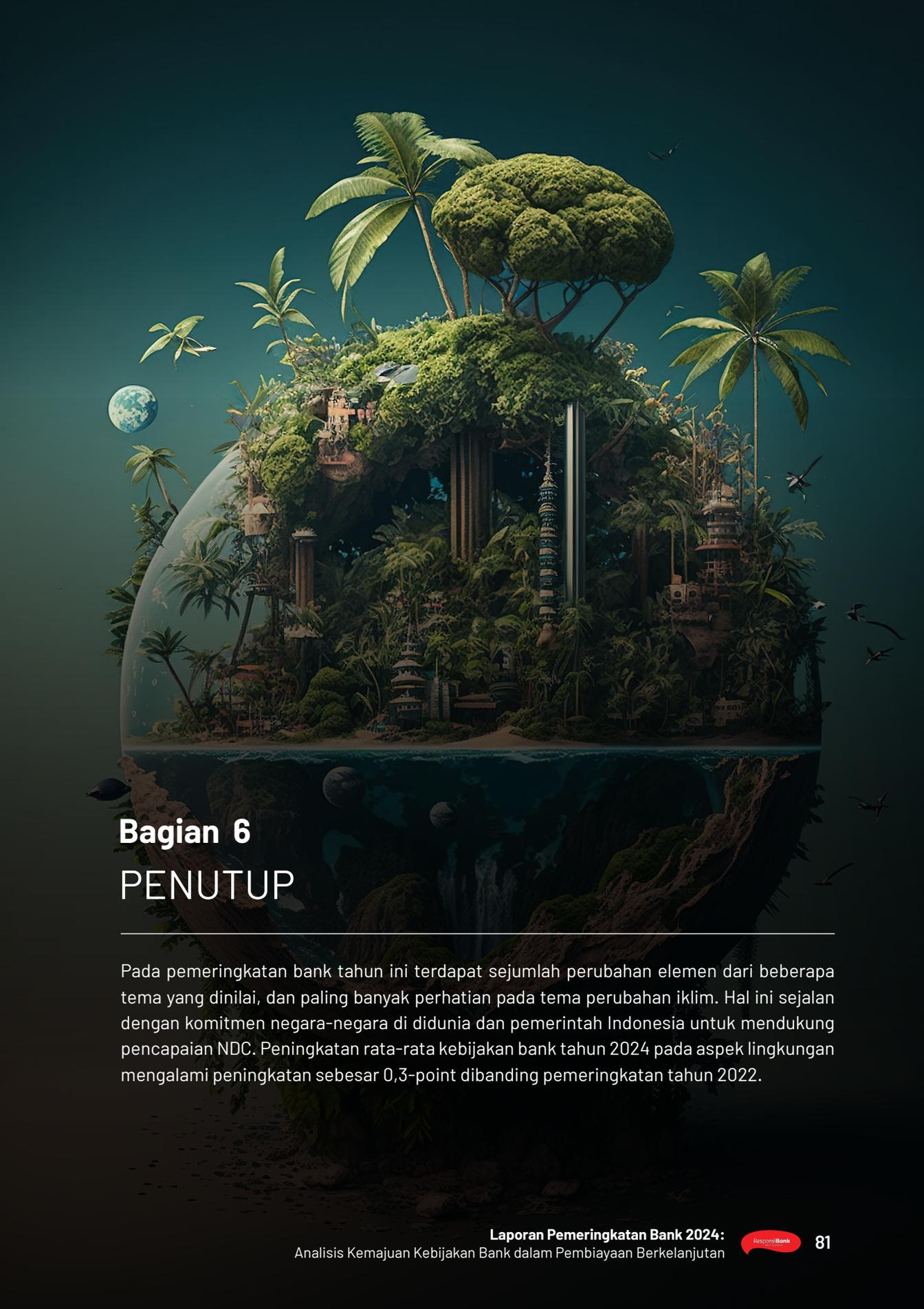
penuh waktu, subsidi yang diterima dari pemerintah, serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Bank juga mendapatkan skor jika memiliki komitmen untuk tidak menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak. Selain itu, bank juga mendapatkan skor jika perusahaan yang dibiayai mempublikasikan struktur lengkap perusahaan, patuh pada ketentuan pajak hingga rantai pasoknya.

Grafik 32. Skor Bank pada Tema Perpajakan



Sumber: olahan penelitian

Pada tema ini, OCBC sebagai bank yang baru dinilai pada periode ini memperoleh skor tertinggi sebesar 4,1 meskipun masih tergolong cukup. Bank-bank lain mendapatkan skor rendah, sementara BRI, Bank Mandiri dan BSI tidak mendapatkan skor pada tema ini.



## Bagian 6

# PENUTUP

Pada pemeringkatan bank tahun ini terdapat sejumlah perubahan elemen dari beberapa tema yang dinilai, dan paling banyak perhatian pada tema perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen negara-negara di dunia dan pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian NDC. Peningkatan rata-rata kebijakan bank tahun 2024 pada aspek lingkungan mengalami peningkatan sebesar 0,3-point dibanding pemeringkatan tahun 2022.

## 6.1 Kesimpulan

Perhatian global terhadap perubahan iklim telah mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk menetapkan target ambisius dalam pengurangan emisi karbon dan peningkatan energi terbarukan. Sektor perbankan di Indonesia memainkan peran krusial dalam mendukung pencapaian target-target ini melalui pembiayaan berkelanjutan. Bank-bank di Indonesia mulai mengintegrasikan kriteria *Environmental, Social, and Governance* (ESG) serta menerapkan standar keberlanjutan dalam kebijakan kredit dan investasi. Inisiatif ini mencakup pembiayaan hijau dan pengurangan pendanaan untuk sektor-sektor berisiko tinggi terhadap lingkungan dan sosial. Dengan demikian, sektor perbankan tidak hanya menunjukkan tanggung jawab sosialnya, tetapi juga berupaya mengurangi risiko yang terkait dengan perubahan iklim yang dapat mengancam stabilitas ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia menunjukkan komitmen yang baik terhadap inklusi keuangan, dengan skor tertinggi 5,7 dalam pemeringkatan tahun 2024. Namun, rata-rata skor keseluruhan hanya mencapai 2,1, mengindikasikan masih banyak aspek yang perlu perbaikan. Meskipun tujuh bank tidak mengalami perubahan peringkat dan beberapa bank seperti CIMB Niaga mencatat peningkatan skor, terdapat penurunan peringkat pada bank-bank besar seperti BCA, BRI, dan Danamon.

Tema inklusi keuangan mengalami peningkatan signifikan, dengan bank-bank seperti CIMB Niaga menunjukkan kemajuan luar biasa dalam kebijakannya untuk meningkatkan akses layanan keuangan bagi masyarakat berpendapatan rendah. CIMB Niaga juga menjadi sorotan karena kebijakan lingkungan yang ketat, termasuk pedoman untuk sektor kehutanan yang mengharuskan debitur mematuhi prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini mencerminkan upaya bank dalam meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada dalam mencapai inklusi dan keberlanjutan yang lebih luas di sektor perbankan.

Pada pemeringkatan bank tahun ini terdapat sejumlah perubahan elemen dari beberapa tema yang dinilai, dan paling banyak perhatian pada tema perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen negara-negara di dunia dan pemerintah Indonesia untuk mendukung pencapaian NDC. Peningkatan rata-rata kebijakan bank tahun 2024 pada aspek lingkungan mengalami peningkatan sebesar 0,3-point dibanding pemeringkatan tahun 2022. Tema kehutanan dan

perubahan iklim merupakan tema yang meningkat cukup baik, sedangkan untuk tema pertambangan, alam dan pembangkit listrik hanya mengalami kenaikan yang cukup kecil di bawah 0,3, dan untuk tema minyak dan gas bumi justru mengalami penurunan sebesar 0,1 point.

Di Indonesia, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi pedoman untuk mendukung pembiayaan yang berkelanjutan dan inklusif. Bank-bank yang mematuhi TKBI berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan kesetaraan gender, serta mengurangi risiko sosial dan hukum. Meski demikian, pada aspek sosial, sama seperti aspek lingkungan rata-rata kebijakan bank hanya mengalami peningkatan sebesar 0,3 point. Tema-tema kesetaraan gender, hak asasi manusia, perlindungan konsumen dan inklusi keuangan mengalami kenaikan antara 0,5 - 0,7 point. Sedangkan untuk tema hak pekerja menurun sebesar 0,6-point dan tema kesehatan tidak mengalami perubahan skor. Meskipun tema seperti kesetaraan gender mengalami peningkatan karena beberapa bank telah memiliki regulasi pendukung, namun hal ini masih menjadi tantangan di mana representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan masih cukup rendah.

Lebih lanjut pada aspek tata kelola, rata-rata kebijakan bank hanya meningkat sebesar 0,2-point dibandingkan tahun 2022. Tema korupsi merupakan yang cukup baik mengalami peningkatan sebesar 0,8 point, sementara transparansi dan akuntabilitas hanya meningkat 0,2-point dan perpajakan tidak mengalami perubahan point. Kebijakan perpajakan pada bank-bank di Indonesia masih cukup rendah dengan perolehan skor rata-rata hanya sebesar 1,4.

Padahal tema perpajakan merupakan tema yang cukup krusial di mana pajak sangat berperan untuk membiayai pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan program perlindungan sosial. Pada tema ini, bank dinilai berdasarkan elemen *country by country reporting* atas pendapatan, profit, total aset, Full-Time Equivalent (FTE) yang berarti setara penuh waktu, subsidi yang diterima dari pemerintah, serta pembayaran pajak kepada pemerintah. Bank juga mendapatkan skor jika memiliki komitmen untuk tidak menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan yang beroperasi di kawasan surga pajak. Selain itu, bank juga mendapatkan skor jika perusahaan yang dibiayai mempublikasikan struktur lengkap perusahaan, patuh pada ketentuan pajak hingga rantai pasoknya.

## 6.2 Rekomendasi

Penelitian ini memberikan sejumlah rekomendasi untuk pelaku sektor keuangan khususnya perbankan dan pemangku kebijakan:

### 1. Bank-bank di Indonesia:

- Merumuskan kebijakan internal yang mencerminkan komitmen terhadap praktik berkelanjutan dan bertanggung jawab yang mengacu pada kriteria keberlanjutan yang direkomendasikan oleh Fair Finance Guide International (FFGI) serta berbagai standar internasional lainnya.
- Berkomitmen dalam aksi iklim dengan menetapkan kebijakan pembiayaan yang mendukung transisi energi terbarukan, ekonomi sirkular, dan kegiatan ekonomi rendah karbon lain, serta divestasi pada bisnis terkait fosil. Bank juga perlu menetapkan target dan metrik yang terukur, serta strategi dalam upaya penurunan emisi operasional maupun emisi pembiayaan dengan berbasis pada sains.
- Mengembangkan kebijakan yang lebih ketat pada sektor usaha berisiko tinggi, seperti pertambangan dan perkebunan skala besar, termasuk penetapan kriteria skrining kredit yang lebih spesifik dan mencakup aspek lingkungan dan sosial, menetapkan langkah-langkah safeguarding yang lebih ketat, hingga proses monitoring dan evaluasi yang transparan dan akuntabel.
- Mengintegrasikan kriteria sosial, seperti kesetaraan gender dan hak asasi manusia dalam kebijakan pembiayaan dan investasi, serta menyediakan sistem peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi staf terkait integrasi LST dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
- Membangun mekanisme operasional yang sistematis untuk memastikan perspektif gender dan aspek sosial lainnya terintegrasi dalam proses kredit dan investasi. Ini meliputi prosedur yang jelas untuk mengevaluasi dan memantau dampak sosial dari setiap proyek yang dibiayai. Selain itu, membangun mekanisme untuk peningkatan kepemimpinan perempuan pada posisi eksekutif dan manajemen senior dengan menjamin setidaknya 30% partisipasi dan akses yang setara dengan peningkatan kapasitas yang memadai.
- Meningkatkan transparansi dalam pelaporan terkait kebijakan dan praktik perlindungan konsumen, hak asasi manusia, serta kesetaraan gender. Laporan

ini harus dapat diakses oleh publik dan mencakup informasi yang relevan mengenai kinerja dan dampak lingkungan serta sosial dari kebijakan tersebut.

- Menetapkan atau membentuk mekanisme penanganan keluhan untuk masyarakat terdampak pembiayaan yang transparan dan inklusif.

## 2. Otoritas Jasa Keuangan:

- Memperkuat dan memperluas Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) dengan:
  - Menerbitkan panduan praktik terbaik mengenai integrasi aspek sosial dalam kebijakan pembiayaan dan investasi.
  - Memastikan adanya partisipasi bermakna masyarakat lokal, adat, organisasi masyarakat sipil, industri dan organisasi internasional untuk pengembangan kebijakan, pengembangan program pelatihan dan edukasi untuk perbankan mengenai prinsip-prinsip LST, dan membangun sistem pengukuran dan evaluasi untuk menilai kinerja bank termasuk indikator yang jelas untuk mengukur dampak sosial dari kegiatan perbankan yang berkelanjutan.
  - Menetapkan implementasi TKBI secara *mandatory* untuk mengakselerasi mobilisasi pembiayaan yang mendukung penanganan krisis iklim.
  - Menyertakan klasifikasi sektor usaha 'merah' yang tidak mendukung ekonomi hijau dan transisi, untuk memberikan informasi yang lebih rinci terkait tingkat risiko lingkungan dan sosial, serta meningkatkan prinsip kehati-hatian investor dan bank.
  - Memastikan pendekatan berbasis sains dalam penyusunan taksonomi.
  - Menetapkan kriteria *Technical Screening Criteria* yang lebih detail, tidak hanya berbasis pada kepemilikan sertifikasi keberlanjutan. Penentuan kriteria TSC harus selaras dengan pencapaian tujuan lingkungan TKBI dan berbasis sains.
  - Menetapkan standar pelaporan yang transparan dan akuntabel hingga ke rantai pasok perusahaan yang dibiayai.
- Memberikan insentif bagi bank yang berkomitmen untuk melakukan pembiayaan berkelanjutan dan inklusi keuangan dan disinsentif bagi yang tidak berkomitmen. Insentif ini bisa berupa pengurangan biaya perizinan atau akses lebih mudah ke sumber pendanaan dari lembaga keuangan internasional, dan disinsentif berupa penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran lingkungan, termasuk

mekanisme sanksi yang nyata untuk aktivitas deforestasi dan degradasi ekosistem sensitif.

- Mendorong terbitnya aturan turunan yang spesifik bagi lembaga jasa keuangan untuk menerapkan TKBI secara efektif, dengan audit independen untuk memastikan akuntabilitas.
- Membuat panduan yang memastikan lembaga keuangan menerapkan mekanisme audit independen untuk memastikan bahwa produk dan proyek yang dibiayai mematuhi kriteria LST secara ketat.

## Daftar Pustaka

- Arief, Tegar. (2018). SMI Catatkan Green Bond Pertama di Indonesia. *Bisnis(dot)com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20180710/9/814803/smi-catatkan-green-bond-pertama-di-indonesia>
- Bappenas. (2021). Updated NDC Indonesia Untuk Masa Depan yang Tangguh Iklim. [http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/#:~:text=Untuk%20mencapai%20target%20NDC%202030,kuadriliun%20rupiah%20\(%24310%20miliar\)](http://greengrowth.bappenas.go.id/updated-ndc-indonesia-untuk-masa-depan-yang-tangguh-iklim/#:~:text=Untuk%20mencapai%20target%20NDC%202030,kuadriliun%20rupiah%20(%24310%20miliar)).
- BCA. (2024). Laporan Keberlanjutan 2023. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Keberlanjutan/2024/20240215-2023-sustainability-report-bca-en.pdf>
- BCA. (2024). Laporan Tahunan 2023. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Laporan-Tahunan/2024/20240215-buku-bca-ar-2023-eng-website.pdf>
- BCA. (2024). Kebijakan Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit. <http://https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/disclosure-kebijakan-sawit-bca-eng.pdf>
- BCA. (2021). Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism. <https://www.bca.co.id/en/tentang-bca/tata-kelola/Informasi-Lain/APU-PPT>
- BCA. (2021). Information Transparency. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/Information-Transparency.pdf>
- BCA. (2021). Kebijakan Hak Asasi Manusia. <http://https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/Sustainability-Index/Kebijakan/20210521-Human-Rights-Policy-ENG.pdf>
- BCA. (2023). Environmental, Social, and Governance (ESG) Policy on Financing for Timber and Forest Products Industry Sector. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/2023/02/20230227-kebijakan-sektor-industri-kayu-dan-hasil-hutan-eng.pdf>
- BCA. (2023). Kebijakan Lingkungan Sosial dan Tata Kelola (LST) Pembiayaan Sektor Tambang Batu Bara. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/2023/02/20230227-kebijakan-sektor-tambang-batubara-indo.pdf>
- BCA. (2021). Responsible Financing Policy. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/20210604-responsible-financing-policy-eng.pdf>

- BCA. (2023). Consumer Data and Privacy Protection Policy. <https://www.bca.co.id/-/media/Feature/Report/File/S8/Kebijakan-GCG/20230731-consumer-data-and-privacy-protection-policy.pdf>
- BRI. (2024). Laporan Keberlanjutan 2023. <https://www.ir-bri.com/misc/SR/SR-2023-EN.pdf>
- BRI. (2024). Laporan Tahunan 2023. <https://www.ir-bri.com/misc/AR/AR-2023-EN.pdf>
- BRI. (2023). From Risk to Opportunity: TCFD Report on Climate Resilience. [https://www.ir-bri.com/misc/BRI\\_TCFD\\_Report\\_2023.pdf](https://www.ir-bri.com/misc/BRI_TCFD_Report_2023.pdf)
- BRI. (2021). Whistleblowing System. [https://www.ir-bri.com/whistle\\_blowing\\_system.html](https://www.ir-bri.com/whistle_blowing_system.html)
- BRI. (2019). Sustainability Bond Framework. <https://www.ir-bri.com/misc/SR/BRI-Sustainability-Framework-Final-March-vF.pdf>
- BSI. (2024). Laporan Keberlanjutan 2023. [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/202404/f07d5ce980\\_efb84c6532.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202404/f07d5ce980_efb84c6532.pdf)
- BSI. (2024). Laporan Tahunan 2023. [https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From\\_EREP/202404/d099b12cab\\_f7c09d2d1e.pdf](https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202404/d099b12cab_f7c09d2d1e.pdf)
- BNI. (2024). Laporan Keberlanjutan 2023. [https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2023-ENG-final\\_highres.pdf](https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2023-ENG-final_highres.pdf)
- BNI. (2024). Laporan Tahunan 2023. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/AR-BNI-2023-EN.pdf>
- BNI. (2021). Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola. [https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/Laporan/Laporan\\_Tahunan\\_Pelaksanaan\\_Tata\\_Kelola\\_2021-EN.pdf](https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/TataKelola/Docs/Laporan/Laporan_Tahunan_Pelaksanaan_Tata_Kelola_2021-EN.pdf)
- BNI. (2021). Anti Money Laundering and Counter the Financing of Terrorism. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/Docs/bni%20aml%20and%20cft%20policy%20statement.pdf>
- BNI. (2022). Tingkatkan Pembiayaan Hijau, BNI Akan Menerbitkan Green Bond. <https://www.bni.co.id/id-id/beranda/kabar-bni/berita/articleid/21044>
- Cimb Niaga. (2024). Laporan Tahunan 2023. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/AR/AR-2023-ID.pdf>
- Cimb Niaga. (2024). Laporan Keberlanjutan 2023. <https://investor.cimbniaga.co.id/misc/SR/SR2023-EN.pdf>
- Cimb Niaga. (2024). Human Rights Policy. <https://www.cimb.com/content/dam/cimb/group/documents/sustainability/cimb-human-rights-policy.pdf>

- Cimb Niaga. (2024). Coal Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Coal-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Coal-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). Mining and Quarrying Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Mining-Quarrying-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Mining-Quarrying-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). Forestry and Natural Rubber Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Forestry-Natural-Rubber-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Forestry-Natural-Rubber-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). Oil and Gas Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Forestry-Natural-Rubber-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Forestry-Natural-Rubber-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). COstruction Services and Infrastructure Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Jasa-Konstruksi-dan-Infrastruktur-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Jasa-Konstruksi-dan-Infrastruktur-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). Oil Palm Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Oil-Palm-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Oil-Palm-EN.pdf)
- Cimb Niaga. (2024). Manufacturing Sector Guidance. [https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector\\_guidance/Oil-Palm-EN.pdf](https://investor.cimbniaga.co.id/misc/Sustainability/sector_guidance/Oil-Palm-EN.pdf)
- Danamon. (2021). Laporan Tahunan Danamon 2021. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-TAHUNAN/2021/ID-Ver/Laporan-Tahunan-Danamon-2021--ID-Rev.pdf>
- Danamon. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.danamon.co.id/-/media/ALL-CONTENT-ABOUT-DANAMON/LAPORAN-KEUANGAN/LAPORAN-KEBERLANJUTAN/Laporan-Keberlanjutan-2021-PT-Bank-Danamon-Indonesia.pdf>
- DBS. (2024). Laporan Tahunan Bank DBS Indonesia 2023. [https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/id/DBS1\\_AR\\_2023\\_FIN.pdf](https://www.dbs.com/iwov-resources/pdf/id/DBS1_AR_2023_FIN.pdf)
- DBS. (2024). Laporan Keberlanjutan Holding DBS 2023. [https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/reporting/pdf/web/DBS\\_SR2023.pdf](https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/reporting/pdf/web/DBS_SR2023.pdf)
- DBS. (2023). Modern Slavery Statement. <https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/reporting/pdf/dbs-modern-slavery-statement-financial-year-2023.pdf>
- DBS. (2022). Our Approach to Responsible Financing. [https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/pdf/DBS%20Bank\\_Our%20Approach%20to%20Responsible%20Financing\\_Mar2022.pdf](https://www.dbs.com/iwov-resources/images/sustainability/pdf/DBS%20Bank_Our%20Approach%20to%20Responsible%20Financing_Mar2022.pdf)
- DBS. (2021). Accelerating our net zero commitment: A responsible, pragmatic and impactful approach. <https://www.dbs.id/id/corporate/sustainability/our-path-to-net-zero>

- HSBC Indonesia. (2021). Annual report 2021. <https://www.about.hsbc.co.id/-/media/indonesia/en/hsbc-in-indonesia/financial-and-regulatory-reports/220613-pt-bank-hsbc-indonesia-annual-report-2021-en.pdf>
- Mandiri. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. [https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR\\_Bank+Mandiri+2021\\_lowres.pdf/3ad22f7b-ca16-651b-e246-77de8b4bfbb6?t=1645024868634](https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR_Bank+Mandiri+2021_lowres.pdf/3ad22f7b-ca16-651b-e246-77de8b4bfbb6?t=1645024868634)
- Mandiri. (2021). Laporan Tahunan 2021. [https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/Annual+Report+Mandiri+2021+-+29+April+\\_compressed.pdf/e2695f1d-be57-3257-5172-e995a0087309?t=1654482072878](https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/Annual+Report+Mandiri+2021+-+29+April+_compressed.pdf/e2695f1d-be57-3257-5172-e995a0087309?t=1654482072878)
- Maybank. (2021). Laporan Tahunan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Laporan-Tahunan/Annual-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Maybank. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. <https://www.maybank.co.id/-/media/Downloaded-Content/Sustainability-Reports/Sustainability-Report-Maybank-Indonesia-2021.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Overview Taksonomi Hijau Indonesia dan Implementasinya dalam Pilot Project Pelaporan Bank. [https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/sflibrary/files/file\\_f19a5861-a941-4bf0-b318-4191b6140f74-18082022122115.pdf](https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/BE/uploads/sflibrary/files/file_f19a5861-a941-4bf0-b318-4191b6140f74-18082022122115.pdf).
- Permata. (2021). Laporan Tahunan 2021. [https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/AR2021\\_PB\\_26042022\\_hires.pdf](https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/AR2021_PB_26042022_hires.pdf)
- Permata. (2021). Laporan Keberlanjutan 2021. [https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Hires\\_PermataBank%20SR\\_2021.pdf](https://www.permatabank.com/sites/default/files/documents/pdf/Hires_PermataBank%20SR_2021.pdf)
- OJK. (2023). Taksonomi untuk Keuangan Berkelanjutan Indonesia. <https://shorturl.at/sA0Yh>
- OJK. (n.d). Sustainable Finance Roadmap Phase II. <https://www.ojk.go.id/keuanganberkelanjutan/en/about/read/3305/sustainable-finance-roadmap-phase-ii>
- OJK. (2021). Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia Tahap II. [https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-\(2021-2025\).aspx](https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Roadmap-Kuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-(2021-2025).aspx)
- OJK. (2014). Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. <https://www.ojk.go.id/Files/box/keuangan-berkelanjutan/roadmap-keuangan-berkelanjutan.pdf>
- Listiyani, Nurul. (2017). Dampak Pertambangan Terhadap Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan dan Implikasinya Bagi Hak-hak Warga Negara. <https://media.neliti.com/media/publications/225050-dampak-pertambangan-terhadap-lingkungan-e01f22b1.pdf>



Koalisi ResponsiBank Indonesia adalah sekelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia yang giat mendorong tanggung jawab industri keuangan di Indonesia pada aspek sosial, lingkungan, dan tata kelola untuk mendorong implementasi keuangan berkelanjutan. Sebagai pihak yang memiliki peran intermediari untuk menghimpun dana masyarakat melalui tabungan dan investasi serta menyalurkannya kembali melalui kredit dan investasi, industri keuangan, khususnya perbankan, tidak dapat hanya memperhatikan aspek finansial (profit) melainkan harus mempertimbangkan manusia (people), lingkungan (planet), kesejahteraan umum (prosperity), dan perdamaian (peace). Untuk menghindari dampak negatif atas kredit dan investasi yang disalurkan, perbankan perlu untuk memiliki kebijakan yang komprehensif dan cermat sebagai bagian integral dari praktik bisnis mereka. Pernerangan ini dilakukan oleh peneliti dari Koalisi ResponsiBank Indonesia yang terdiri dari tigabelas organisasi masyarakat sipil yaitu:



[www.responsibank.id](http://www.responsibank.id)

ResponsiBank\_Indo ResponsiBank Indonesia ResponsiBank Indonesia



**PRAKARSA**

Welfare Initiative for Better Societies

The PRAKARSA adalah lembaga penelitian dan advokasi kebijakan, sebuah "*think tank*" yang berbasis organisasi masyarakat sipil. The PRAKARSA didirikan untuk menciptakan masyarakat yang demokratis, adil, dan makmur melalui pengembangan ide, reformasi kebijakan dan institusi, serta inovasi pemecahan masalah berbasis bukti. The PRAKARSA fokus pada isu kebijakan fiskal, kebijakan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

Kami melakukan kegiatan penelitian, analisis kebijakan, dan pelatihan di berbagai topik terkait isu kesejahteraan. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, kami secara konsisten mengadopsi pendekatan kolaboratif dan engagement untuk bekerja sama dengan berbagai pihak: pemerintah, parlemen, organisasi masyarakat sipil, universitas, lembaga penelitian, organisasi internasional, sektor swasta, lembaga donor pembangunan, dan media massa.

Kami percaya bahwa pendekatan multi-stakeholder ini akan memperkuat karya dan inisiatif kami dalam produksi dan penyebaran pengetahuan serta proses pembuatan kebijakan berbasis bukti. Kami juga percaya bahwa jaringan akan memfasilitasi dan memperkuat satu sama lain. Oleh karena itu, kami telah menerima dukungan dari berbagai donor dan berpartisipasi dalam berbagai inisiatif bersama mitra The PRAKARSA.

**[www.theprakarsa.org](http://www.theprakarsa.org)**

Komplek Rawa Bambu 1  
Jl. A No. 8E Kel. Pasar Minggu,  
Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan

 +62 21 7811 798

 [perkumpulan@theprakarsa.org](mailto:perkumpulan@theprakarsa.org)

    The PRAKARSA

  PRAKARSA Podcast